

Tanggal Mula Perdagangan Saham Tanpa Hak (Ex-Right) - Pasar Reguler & Pasar Negosiasi	24 Februari 2003	Periode Pelaksanaan HMETD Saham Baru dan Waran Seri III Tanpa Warkat	20 - 27 Maret 2003
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham dengan Hak (Cum-Right) - Pasar Reguler & Pasar Negosiasi	7 Maret 2003	Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Tambahan	27 Maret - 4 April 2003
Tanggal Mula Perdagangan Saham Tanpa Hak (Ex-Right) - Pasar Tunai	10 Maret 2003	Tanggal Penetapan	28 Maret 2003 1 April 2003
Tanggal Terakhir Pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham yang Berhak Atas HMETD	12 Maret 2003	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Pembelian Saham Tambahan	4 April 2003
Periode Perdagangan HMETD Tanpa Warkat	13 Maret 2003	Tanggal Awal Perdagangan Waran Seri III	20 Maret 2003
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri III Tanpa Warkat di Bursa Efek Jakarta	12 Maret 2003 13 - 18 Maret 2003	Tanggal Akhir Perdagangan Waran Seri II - Pasar Reguler & Pasar Negosiasi	21 Maret 2006
	20 - 25 Maret 2003	Tanggal Akhir Perdagangan Waran Seri II - Pasar Tunai	24 Maret 2006
	20 Maret 2003	Periode Pelaksanaan Waran Seri II Akhir Masa Berlaku Waran Seri II	26 September 2003- 27 Maret 2006 27 Maret 2006

PROSPEKTUS

BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJULURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk

BIDANG USAHA

Bergerak Dalam Bidang Usaha Jasa Perbankan
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

KANTOR PUSAT

Gedung Bank Panin Senayan, I.I. Dasar
Jl. Jend. Sudirman No. 1
Jakarta 10270

Telp: (021) 5735425 (hunting) Fax: (021) 5735429

KANTOR CABANG

14 Kantor Cabang Pembantu, 3 Kantor Kas dan 1 Payment Point di Jakarta

PENAWARAN UMUM TERBATAS II KEPADA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU UNTUK MEMBELI SAHAM BIASA ATAS NAMA DISERTAI DENGAN PENERBITAN WARAN SERI III

Sebanyak-banyaknya 705.243.360 (tujuh ratus lima juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham yang akan ditawarkan dengan harga penawaran Rp 100,- (seratus rupiah) setiap sahamnya dimana melekak sebanyak-banyaknya sejumlah 423.146.016 (empat ratus dua puluh tiga juta seratus empat puluh enam ribu enam belas) Waran Seri III yang dibenarkan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para Pemegang Saham. Setiap pemegang 1 (satu) saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 Maret 2003 pukul 16.00 WIB mempunyai 1 (satu) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") untuk membeli sebanyak 1 (satu) saham baru dengan harga penawaran Rp 100 (seratus rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham, dimana pada setiap 10 (sepuluh) saham baru melekak 6 (enam) Waran Seri III yang diberikan secara cuma-cuma. Waran Seri III adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan pembelian saham Perseroan yang bernilai nominal Rp 100 (seratus rupiah) setiap saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 100 (seratus rupiah) setiap saham yang dapat dilakukan selama periode pelaksanaan Waran Seri III yaitu mulai tanggal 26 September 2003 sampai dengan tanggal 27 Maret 2006 dimana setiap 1 (satu) Waran Seri III berhak membeli 1 (satu) saham pada harga pelaksanaannya. Pemegang Waran Seri III tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham, termasuk hak atas dividen, selama Waran Seri III tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila setelah lewat periode pelaksanaan, maka setiap Waran Seri III yang belum dilaksanakan akan menjadi kadaluwarsa, tidak berlaku dan tidak bernilai.

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar Bursa Efek Jakarta selama 5 (lima) Hari Kerja mulai tanggal 20 Maret 2003 sampai dengan tanggal 26 Maret 2003. Pencatatan saham dan Waran Seri III Tanpa Warkat akan dilakukan di Bursa Efek Jakarta pada tanggal 20 Maret 2003. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 27 Maret 2003 dimana hak yang tidak dilaksanakan pada tanggal tersebut tidak berlaku lagi.

PERHATIAN KEPADA PEMEGANG SAHAM

- Pemegang saham yang tidak menggunakan haknya dalam Penawaran Umum Terbatas II ini dapat mengalami penurunan persentase kepemilikan (dilusi) dalam jumlah material sampai dengan 50,00 % sebelum Waran Seri III dilaksanakan dan 61,54 % setelah Waran Seri III dilaksanakan.
- Penawaran Umum Terbatas II menjadi efektif setelah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, dalam hal Rapat Umum Luar Biasa tidak menyelujui penerbitan HMETD, maka segala hal yang telah dilaksanakan oleh Perseroan dalam rangka penerbitan HMETD sesuai dengan jadwal tersebut diatas, dianggap tidak pernah ada.

Perseroan tidak menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI")

PT. Victoria Sekuritas dan PT Panin Sekuritas Tbk selaku Pembeli Siaga telah menyatakan kesanggupannya untuk membeli sebanyak-banyaknya 400.000.000 (empat ratus juta) sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham dari seluruh saham yang dikeluarkan dalam Penawaran Umum Terbatas II PT Bank Victoria International Tbk dengan perbandingan yang sama dengan Harga Penawaran yang tercantum dalam Prospektus ini yaitu Rp 100 (seratus rupiah) setiap saham sesuai dengan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas II PT Bank Victoria International No. 37 tanggal 22 Januari 2003 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal • 1 Februari 2003

PT Bank Victoria International Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas II dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "Penawaran Umum Terbatas II") melalui surat No. 00/DIR-VICT/19.002 pada tanggal 24 Januari 2003 kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (selanjutnya disebut BAPEPAM) di Jakarta sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.D.1 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-07/PM/2001 tanggal 23 Maret 2001 mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan peraturan No. IX.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-08/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 mengenai Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaan (selanjutnya disebut Undang-undang Pasar Modal).

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Terbatas II bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran data, keterangan atau laporan serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku serta kode etik dan norma profesinya masing-masing. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut serta dalam Penawaran Umum Terbatas II ini dengan tegas menyatakan tidak merupakan afiliasi dari Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang Republik Indonesia No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 No.64, Tambahan Lembaran Negara No.3608).

Sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas II ini, setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberikan penjelasan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya mendapat persetujuan tertulis dari Perseroan.

Sesuai dengan Peraturan No. IX.D.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-07/PM/2001 tanggal 23 Maret 2001 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, maka hak atas pecahan HMETD tersebut harus dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan ayat 2 dan ayat 3 Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.29 Tahun 1999 Tentang Pembelian Saham Bank Umum yang dikeluarkan sebagai pelaksanaan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto UU No.10 / 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992, ditetapkan bahwa Bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan per seratus) dari jumlah saham yang bersangkutan (ayat 2 Pasal 4); dan sekurang-kurangnya 1% (satu per seratus) dari saham Bank yang dimaksud ayat 2 yang tidak dicatat di Bursa Efek harus tetap dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia (ayat 3 Pasal 4). Dengan demikian untuk menghindari kepemilikan saham Perseroan, selaku bank umum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perbankan yang berlaku di Republik Indonesia, oleh Pemodal Asing yang melebihi 99% (sembilan puluh sembilan per seratus), maka Perseroan hanya akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan per seratus) dari jumlah saham yang diterbitkan Perseroan, sehingga seluruh saham Perseroan yang dicatatkan di Bursa Efek dapat dibeli oleh Pemodal Asing tanpa pembatasan. Berdasarkan daftar pemegang saham pada tanggal 30 Nopember 2002 porsi kepemilikan asing adalah sebesar 0,02%.

Penawaran Umum Terbatas II ini tidak didaftarkan berdasarkan undang-undang / peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar Indonesia menerima Prospektus ini atau Sertifikat Bukti HMETD, maka dokumen-dokumen tersebut tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran untuk membeli saham atau melaksanakan HMETD, kecuali bila penawaran tersebut, pembelian saham, maupun pelaksanaan HMETD tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap undang-undang / peraturan yang berlaku di negara tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh publik dan tidak terdapat lagi informasi yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR ISTILAH	ii
RINGKASAN	iv
I. PENAWARAN UMUM TERBATAS II	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM TERBATAS II	5
III. PERNYATAAN HUTANG	6
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	11
1. Umum	11
2. Keuangan	11
3. Prinsip-Prinsip Perbankan yang Sehat	16
4. Prospek Usaha	19
5. Kondisi Industri Perbankan	19
V. RISIKO USAHA	21
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR	23
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	24
1. Riwayat Singkat Perseroan	24
2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	24
3. Keterangan Singkat Tentang Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum	25
4. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan	28
5. Sumber Daya Manusia	30
6. Program Pendidikan, Pelatihan dan Kesejahteraan Karyawan	31
7. Struktur Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum	33
8. Transaksi dengan Pihak-Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	34
VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	35
1. Umum	35
2. Kegiatan Usaha	35
3. Pemasaran	40
4. Pengendalian Kegiatan Usaha	40
5. Tingkat Kesehatan Bank	41
6. Prospek Usaha	45
7. Asuransi	45
8. Keterangan Fiskal	47
9. Perkara-Perkara	48
IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	49
X. EKUITAS	53
XI. KEBIJAKAN DIVIDEN	55
XII. PERPAJAKAN	56
XIII. PIHAK YANG BERTINDAK SEBAGAI PEMBELI SIAGA	58
XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	59
XV. KETERANGAN TENTANG PAKET EFEK	61
XVI. PERSYARATAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN PAKET EFEK	70
XVII. KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU	76
XVIII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU	78
XVIII. INFORMASI TAMBAHAN	79

DAFTAR ISTILAH

ALCO	: Singkatan dari Asset Liabilities Committee atau Komite Aktiva dan Pasiva, yaitu komite yang merupakan kumpulan dari para pengambil keputusan di bidang pengelolaan aktiva dan pasiva yang diketuai oleh Presiden Direktur, bertugas menyusun strategi pengelolaan aktiva dan pasiva.
ATM	: Singkatan dari Anjungan Tunai Mandiri, yaitu mesin elektronik yang memudahkan nasabah dalam penarikan uang tunai, pemeriksaan saldo dan pemindahbukuan.
BMPK	: Singkatan dari Batas Maksimum Pemberian Kredit yaitu persentase perbandingan batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank yang diberikan kepada nasabah perorangan atau grupnya sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
BPPN	: Singkatan dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional yaitu badan khusus yang didirikan dalam rangka penyehatan perbankan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan.
Daftar Pemegang Saham Perseroan	: Daftar pemegang saham yang tercatat oleh Biro Administrasi Efek pada tanggal 30 November 2003 pukul 16.00 WIB
Harga Pelaksanaan Waran Seri III	: Harga yang ditetapkan untuk dapat menukarkan Waran Seri III menjadi Saham Perseroan, yaitu sebesar Rp 100,- (seratus rupiah) setiap saham atau harga pelaksanaan Waran Seri III baru apabila terjadi penyesuaian.
HMETD	: Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
KPEI	: PT Kliring Penjamin Efek Indonesia
KSEI	: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
KUK	: Singkatan dari Kredit Usaha Kecil yaitu kredit investasi dan / atau kredit modal kerja yang diberikan dalam rupiah dan / atau valuta asing kepada nasabah usaha kecil dengan batas kredit keseluruhan maksimum Rp 350 juta untuk membiayai usaha yang produktif.
NP	: PT Nata Patindo, pemegang saham Perseroan
Paket Efek	: Terdiri atas sebanyak-banyaknya 705.243.360 Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 100 setiap saham yang ditawarkan dengan harga Rp 100 setiap sahamnya dan sebanyak-banyaknya 423.146.016 Waran Seri III yang memberikan hak untuk membeli saham baru Perseroan
PDN	: Singkatan dari Posisi Devisa Netto atau dikenal dengan <i>Net Open Position</i> adalah angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari: (i) selisih bersih antara aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing; ditambah dengan (ii) selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing; yang semuanya

- dinyatakan dalam rupiah.
- Penawaran Umum Terbatas II : Sebanyak-banyaknya 705.243.360 (tujuh ratus lima juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus rupiah) setiap saham dan 423.146.016 (empat ratus dua puluh tiga juta seratus empat puluh enam ribu enam belas) Waran Seri III yang diterbitkan menyertai Saham Biasa Atas Nama tersebut yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para Pemegang Saham
- Penitipan Kolektif : Jasa penitipan kolektif sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal
- Perseroan : PT Bank Victoria International Tbk.
- Saham Hasil Pelaksanaan : Saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai akibat dari hasil pelaksanaan dan merupakan saham yang disetor penuh dimana pemegangnya akan memperoleh hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh sebelumnya.
- Sertifikat Bukti Kepemilikan (SBK) : Sertifikat atau tanda bukti yang dikeluarkan oleh KSEI kepada Pemegang Saham yang membuktikan kepemilikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, bagi yang HMETDnya tersimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.
- Sertifikat Bukti HMETD (SBHMETD) : Sertifikat yang dikeluarkan Perseroan kepada Pemegang Saham yang membuktikan kepemilikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, bagi yang HMETDnya tersimpan di luar Penitipan Kolektif di KSEI.
- SIC : PT Suryayudha Investindo Cipta, pemegang saham Perseroan
- SKAI : Satuan Kerja Audit Intern, yaitu satuan kerja yang melaksanakan fungsi audit internal
- Surat Kolektif Waran Seri II : Surat bukti akan kepemilikan sejumlah Waran Seri II dengan kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan dimana di dalamnya tercantum nama, alamat dan jumlah Waran Seri II serta hal-hal lainnya sehubungan dengan Waran Seri II tersebut.
- SPFAIB : Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank, yaitu standar pelaksanaan fungsi audit internal bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia
- Undang-Undang Perbankan : Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998.
- Waran Seri III : Surat Kolektif atau tanda bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang akan membenarkan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terperinci yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat di atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Perseroan didirikan di Jakarta dengan nama PT Bank Victoria pada tanggal 28 Oktober 1992. Selanjutnya, pada tanggal 8 Juni 1993, Perseroan mengalami perubahan nama menjadi PT Bank Victoria International.

Perseroan memperoleh izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk beroperasi sebagai bank umum pada tanggal 10 Agustus 1994 dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 5 Oktober 1994. Di samping itu, Perseroan juga telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia untuk beroperasi sebagai pedagang valuta asing dan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Mei 1997. Saat ini Perseroan melaksanakan kegiatan usahanya di Kantor Pusat Perseroan yang terletak di Gedung Bank Panin Senayan, Lantai Dasar, Jl Jend. Sudirman No. 1, Jakarta Pusat dan dibantu dengan 18 (delapan belas) kantor operasional yang meliputi 14 (empat belas) kantor cabang pembantu, 3 (tiga) kantor kas dan 1 (satu) kantor *payment point* yang berlokasi di wilayah Jakarta dan Tangerang. Perseroan juga mengoperasikan 1 (satu) *counter money changer* di Kantor Pusat.

Dengan misi utama untuk mengembangkan diri sebagai bank publik yang terpercaya, Perseroan menerapkan strategi-strategi sebagai berikut :

- Fokus pada segmen korporasi menengah dan retail
- Mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar korporasi menengah
- Meningkatkan efisiensi operasi
- Menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent banking*)
- Mendekatkan diri pada nasabah dengan memperluas jaringan kantor dan distribusi strategis

Kegiatan usaha Perseroan meliputi penghimpunan dana masyarakat yang kemudian disalurkan dalam bentuk pemberian kredit pada nasabah perorangan maupun perusahaan. Selain itu Perseroan juga melaksanakan transaksi antarbank serta kegiatan-kegiatan investasi melalui penempatan pada instrumen-instrumen yang aman dan menguntungkan.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dibuat pada tanggal 30 November 2002 oleh PT Adimitra Transferindo selaku Biro Administrasi Efek adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp.)	Persentase (%)
Modal Dasar	2.136.000.000	213.600.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
PT Suryayudha Investindo Cipta	170.700.000	17.070.000.000	24,36
PT Nata Palindo	104.780.000	10.478.000.000	14,95
Masyarakat	425.313.360	42.531.336.000	60,69
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :	700.793.360	70.079.336.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	1.435.206.640	143.520.664.000	

Resiko Usaha

Resiko utama yang dihadapi oleh Perseroan adalah antara lain ketidakmampuan debitur untuk membayar kembali kredit yang diberikan. Semakin besar porsi kredit yang bermasalah karena adanya keraguan atas kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjaman yang diberikan, semakin besar pula kebutuhan cadangan biaya penyisihan penghapusan kredit, yang pada akhirnya akan sangat mempengaruhi laba Perseroan. Selain itu, resiko lainnya adalah dengan belum pulihnya kondisi perekonomian nasional akan berdampak langsung pada sektor perbankan, sehingga dapat mempengaruhi kinerja Perseroan.

Strategi Perseroan

Dalam mengantisipasi situasi perekonomian yang sedang memburuk Perseroan berusaha untuk menjaga kinerjanya dengan melakukan strategi-strategi antara lain :

1. Perseroan memberikan perhatian yang lebih cermat dalam menangani pinjaman-pinjaman yang telah diberikan sehingga tingkat kolektibilitas dapat dipertahankan.
2. Perseroan berusaha dengan semaksimal mungkin untuk meningkatkan efisiensi dalam kegiatan operasinya dengan menekan biaya-biaya operasional.
3. Perseroan berusaha untuk menurunkan *cost of fund* dalam perolehan dana dari pihak luar sehingga mampu menghasilkan positif margin.
4. Perseroan akan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang prima sesuai kebutuhan nasabah serta terus mengembangkan berbagai macam produk simpanan maupun pinjaman yang lebih sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini.
5. Perseroan akan menerapkan keunggulan teknologi perbankan yang efektif dan efisien agar dapat meningkatkan daya saing Perseroan di masa sekarang maupun yang akan datang.

Penawaran Umum Terbatas II

Penawaran Umum Terbatas II ini dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham Perseroan sebanyak-banyaknya 705.243.360 (tujuh ratus lima juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus rupiah) setiap saham yang akan ditawarkan dengan harga Rp 100,- (seratus rupiah) setiap sahamnya di mana melekat sebanyak-banyaknya 423.146.016 (empat ratus dua puluh tiga juta seratus empat puluh enam ribu enam belas) Waran Seri III yang diterbitkan menyertai Saham Biasa Atas Nama pada Penawaran Umum Terbatas II ini yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para Pemegang Saham.

Setiap pemegang 1 (satu) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 Maret 2003 pukul 16:00 WIB mempunyai 1 (satu) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), di mana setiap pemegang 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru dengan harga penawaran sebesar Rp 100,- (seratus rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh saat pengajuan pemesanan pembelian saham, dimana setiap 10 (sepuluh) saham baru melekat 6 (enam) Waran Seri III yang diberikan secara cuma-cuma.

Waran Seri III adalah efek yang membenarkan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan pembelian saham Perseroan yang bernilai nominal Rp 100,- (seratus rupiah) setiap saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 100,- (seratus rupiah) setiap saham yang dapat dilakukan selama periode pelaksanaan Waran Seri III yaitu mulai tanggal 26 September 2003 sampai dengan tanggal 27 Maret 2006 dimana setiap 1 (satu) Waran Seri III berhak membeli 1 (satu) saham Perseroan pada harga pelaksanaannya. Pemegang Waran

Seri III tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham, termasuk hak atas dividen, selama Waran Seri III tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila setelah lewat periode pelaksanaan, maka setiap Waran Seri III yang belum dilaksanakan akan menjadi kadaluwarsa, tidak berlaku dan tidak bernilai.

PT Victoria Sekuritas dan PT Panin Sekuritas Tbk. selaku Pembeli Siaga telah menyatakan kesanggupannya untuk membeli sebanyak-banyaknya 400.000.000 (empat ratus juta) sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham dari seluruh saham yang dikeluarkan dalam Penawaran Umum Terbatas II PT Bank Victoria International Tbk dengan rincian sebagai berikut:

1. PT Victoria Sekuritas wajib membeli sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) saham;
2. PT Panin Sekuritas Tbk wajib membeli sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) saham;

dengan Harga Penawaran yang tercantum dalam Prospektus ini yaitu Rp 100 (seratus rupiah) setiap saham sesuai dengan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas II PT Bank Victoria International Tbk No. 37 tanggal 22 Januari 2003, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

Pemegang saham yang tidak menggunakan haknya dapat mengalami penurunan persentase kepemilikan (dilusi) dalam jumlah material sampai dengan maksimum 50,00% (lima puluh persen) sebelum Waran Seri III dilaksanakan dan 61,54% (enam puluh satu koma lima puluh empat persen) setelah Waran Seri III dilaksanakan.

Rencana Penggunaan Dana

Seluruh dana hasil Penawaran Umum Terbatas II, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan dengan perincian sebagai berikut :

- Sebesar 60 % akan dipergunakan untuk penambahan kredit
- Sebesar 40 % akan dipergunakan untuk pembelian surat berharga.

Dana yang diperoleh dari Hasil Pelaksanaan Waran Seri III, seluruhnya akan digunakan untuk menambah modal kerja Perseroan.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

	30 September	31 Desember		
	2002 (9 bulan)	2001 (1 tahun)	2000 (1 tahun)	1999 (1 tahun)
Aktiva	1.554.927	1.381.101	1.101.536	441.825
Kewajiban	1.474.928	1.312.824	1.038.158	387.401
Ekuitas	80.000	68.277	63.379	54.424
Pendapatan Bunga	186.998	152.703	90.037	69.824
Beban Bunga	163.247	134.419	75.583	60.546
Pendapatan Bunga-Bersih	23.751	18.284	14.454	9.278
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	5.149	992	278	164
Beban Operasional Lainnya	9.354	11.769	7.568	5.592
Beban Operasional Lainnya – Bersih	(23.759)	(12.790)	(8.317)	(5.654)
Laba Operasional	5.141	6.486	6.415	3.788
Pendapatan (Beban) Non Operasional	121	212	(93)	94
Laba Sebelum Beban Pajak	5.263	6.698	6.322	3.881
Laba Bersih	3.862	4.898	4.554	2.797

Kebijakan Dividen

Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen sesuai dengan kebijakan pembagian dividen sebelumnya yaitu pembayaran dividen sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun tanpa mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan serta kebutuhan dana yang diperlukan untuk investasi dalam rangka pengembangan usahanya.

Sejak melakukan Penawaran Umum Saham (Go Public) pada tahun 1999 sampai dengan saat ini, Perseroan pernah melakukan pembagian dividen tunai (kas) kepada para pemegang saham Perseroan untuk tahun buku 2000 sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah) untuk setiap saham.

Manajemen Perseroan bermaksud mengusulkan pembayaran dividen tunai kepada para Pemegang Saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham sebesar 20% untuk laba bersih sampai dengan Rp 15 miliar dan 30 % untuk laba bersih di atas Rp 15 miliar.

Perseroan berencana untuk mengeluarkan saham baru atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, sejak Pemyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

I. PENAWARAN UMUM TERBATAS II

Direksi atas nama Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas II kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sampai dengan sebanyak-banyaknya 705.243.360 (tujuh ratus lima juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus rupiah) setiap saham yang akan ditawarkan dengan harga Rp 100,- (seratus rupiah) setiap sahamnya di mana melekat sebanyak-banyaknya 423.146.016 (empat ratus dua puluh tiga juta seratus empat puluh enam ribu enam belas) Waran Seri III yang diterbitkan menyertai Saham Biasa Atas Nama pada Penawaran Umum Terbatas II ini yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para Pemegang Saham.

Setiap pemegang 1 (satu) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 Maret 2003 pukul 16:00 WIB mempunyai 1 (satu) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), di mana setiap pemegang 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru dengan harga penawaran sebesar Rp 100,- (seratus rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh saat pengajuan pemesanan pembelian saham, dimana setiap 10 (sepuluh) saham baru melekat 6 (enam) Waran Seri III yang diberikan secara cuma-cuma.



PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk

BIDANG USAHA

Bergerak Dalam Bidang Usaha Jasa Perbankan

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

KANTOR PUSAT

Gedung Bank Panin Senayan, Lt. Dasar

Jl. Jend. Sudirman No. 1

Jakarta 10270

Telp: (021) 5735425 (*hunting*) Fax: (021) 5735429

KANTOR CABANG

14 Kantor Cabang Pembantu, 3 Kantor Kas dan 1 Payment Point di Jakarta

Waran Seri III adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan pembelian saham Perseroan yang bernilai nominal Rp 100,- (seratus rupiah) setiap saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 100,- (seratus rupiah) setiap saham yang dapat dilakukan selama periode pelaksanaan Waran Seri III yaitu mulai tanggal 26 September 2003 sampai dengan tanggal 27 Maret 2006 dimana setiap 1 (satu) Waran Seri III berhak membeli 1 (satu) saham Perseroan pada harga pelaksanaannya. Pemegang Waran Seri III tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham, termasuk hak atas dividen, selama Waran Seri III tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila setelah lewat periode pelaksanaan, maka setiap Waran Seri III yang belum dilaksanakan akan menjadi kadaluwarsa, tidak berlaku dan tidak bernilai.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KETIDAKMAMPUAN DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI KREDIT YANG DIBERIKAN, DAN APABILA JUMLAHNYA MATERIAL DAPAT MENURUNKAN KINERJA PERSEROAN

DI SAMPING ITU, KRISIS EKONOMI YANG TERJADI SAAT INI MEMILIKI DAMPAK LANGSUNG PADA SEKTOR PERBANKAN, YANG PADA GILIRANNYA DAPAT MENURUNKAN PENDAPATAN DAN KEUNTUNGAN PERSEROAN

RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DIUNGKAPKAN PADA BAB V PROSPEKTUS INI

Perseroan didirikan di Jakarta dengan nama PT Bank Victoria berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 71 tanggal 28 Oktober 1992 juncto Akta Pembetulan No. 30 tanggal 8 Juni 1993, Keduanya dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-4903.HT.01.01.Th.93 tanggal 19 Juni 1993, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 29 Juni 1993 di bawah No.342/Leg/1993 tanggal 29 Juni 1993, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 15 Mei 1998, Tambahan No. 2602.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 61 tanggal 28 Februari 2001, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Notaris Fathiah Helmi, SH No. 178/PT-GP/PRT/VII/2001 tanggal 3 Juli 2001 sebagaimana telah diterima pada tanggal 10 Juli 2001, serta didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan pada tanggal 28 Agustus 2001 yang menerangkan mengenai kepastian jumlah modal ditempatkan dan disetor setelah pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas I, yaitu sejumlah 634.000.000 (enam ratus tiga puluh empat juta) saham.

Sebelum Penawaran Umum Terbatas II ini, Perseroan telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta. Jumlah saham yang dicatatkan adalah 693.785.426 (enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus dua puluh enam) saham yang merupakan 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah Saham Yang Ditempatkan dan Disetor Penuh	Yang Dicatatkan di Bursa Efek Jakarta		Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Jakarta
			Jumlah Saham	Persentase (%)	
1	Penawaran Umum Perdana	250.000.000	247.500.000	99%	30 Juni 1999
2	Company Listing	534.000.000	528.660.000	99%	30 Juni 1999
3	Penawaran Umum Terbatas I	100.000.000	99.000.000	99%	28 September 2000
4	Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan Waran Seri II	66.793.360	66.125.426	99%	

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dibuat pada tanggal 30 November 2002 oleh PT Adimitra Transferindo selaku Biro Administrasi Efek adalah sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp.)	Persentase (%)
Modal Dasar	2.136.000.000	213.600.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
PT Suryayudha Investindo Cipta	170.700.000	17.070.000.000	24,36
PT Nata Palindo	104.780.000	10.478.000.000	14,95
Masyarakat	425.313.360	42.531.336.000	60,69
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :	700.793.360	70.079.336.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	1.435.206.640	143.520.664.000	

Paket efek yang terdiri dari Saham Biasa Atas Nama dan Waran Seri III yang memberikan hak untuk membeli saham baru Perseroan, yang ditawarkan kepada Pemegang Saham dalam Penawaran Umum Terbatas II ini seluruhnya terdiri atas saham baru yang akan memberikan hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas II ini seluruhnya berasal dari portepel. Jumlah saham dan Waran Seri III yang akan dicatatkan Perseroan di Bursa Efek Jakarta adalah sejumlah 698.190.926 (enam ratus sembilan puluh delapan juta seratus sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh enam) saham atau 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh saham dan Waran Seri III yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas II. Sedangkan saham Perseroan sejumlah 1% (satu persen) yang tidak dicatatkan adalah merupakan saham milik PT Suryayudha Investindo Cipta.

Perhitungan jumlah saham baru yang ditawarkan berdasarkan asumsi bahwa pemegang Waran Seri II telah mengkonversikan seluruh Waran Seri II miliknya menjadi saham Perseroan sampai dengan tanggal 12 Maret 2003 pukul 16.00 yaitu pada tanggal Daftar Pemegang Saham Perseroan yang berhak atas HMETD.

Dengan asumsi bahwa seluruh hak yang timbul dari Waran Seri II dan Waran Seri III telah dilaksanakan melalui pembelian saham-saham Perseroan, maka struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sebelum Penawaran Umum Terbatas II dan sesudah Penawaran Umum Terbatas II secara proforma adalah sebagai berikut :

Uraian	Sebelum PUT II			Setelah PUT II		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.136.000.000	213.600.000.000		2.136.000.000	213.600.000.000	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh						
Saham Lama	700.793.360	70.079.336.000	99.37	700.793.360	70.079.336.000	38.22
Pemegang Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri II	4.450.000	445.000.000	0.63	4.450.000	445.000.000	0.24
Saham Baru	-	-		705.243.360	70.524.336.000	38.46
Pemegang Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri III	-	-		423.146.016	42.314.601.600	23.08
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	705.243.360	70.524.336.000	100.00	1.833.632.736	183.363.273.600	100.00
Saham dalam Portepel	1.430.756.640	143.075.664.000		302.367.264	30.236.726.400	

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, masih ada Waran Seri II yang belum dipergunakan untuk membeli saham Perseroan. Apabila sampai dengan tanggal 12 Maret 2003 pukul 16.00 tidak ada lagi pemegang Waran Seri II yang melaksanakan hak yang timbul dari warannya untuk membeli saham Perseroan, maka struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Terbatas II ini secara proforma adalah sebagai berikut :

Uraian	Sebelum PUT II			Setelah PUT II		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.136.000.000	213.600.000.000		2.136.000.000	213.600.000.000	
Modal Ditempatkan & Diselor Penuh						
Saham Lama	700.793.360	70.079.336.000	100,00	700.793.360	70.079.336.000	38,56
Saham Baru	-	-		700.793.360	70.079.336.000	38,56
Pemegang Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri III	-	-		416.026.015	41.602.601.600	22,88
Jumlah Modal Ditempatkan dan Diselor Penuh	700.793.360	70.079.336.000	100,00	1.817.612.735	181.761.273.600	100,00
Saham dalam Portepel	1.435.206.640	143.520.664.000		318.387.264	31.838.726.400	

Jika terdapat Waran Seri II dan Waran Seri III yang tidak dilaksanakan setelah masa berlaku kedua waran tersebut habis maka Waran Seri II dan Waran Seri III tersebut akan menjadi kadaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

Apabila pemegang HMETD tidak menggunakan haknya untuk membeli Saham Baru yang disertai Waran Seri III dalam rangka Penawaran Umum Terbatas II ini, mereka dapat menjual haknya kepada pihak lain dari tanggal 20 Maret 2003 sampai dengan 26 Maret 2003 melalui Bursa Efek Jakarta atau di luar bursa sesuai dengan Peraturan No. IX.D.1 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep.07/PM/2001 tanggal 23 Maret 2001 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

Apabila pemegang HMETD hanya mengambil sebagian dari haknya dalam Penawaran Umum Terbatas II ini, sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD yang melakukan pemesanan yang lebih besar dari haknya, sebagaimana tercantum dalam HMETD secara proporsional berdasarkan hak yang telah terlaksanakan.

PT Victoria Sekuritas dan PT Panin Sekuritas Tbk. selaku Pembeli Siaga telah menyatakan kesanggupannya untuk membeli sebanyak-banyaknya 400.000.000 (empat ratus juta) sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham dari seluruh saham yang dikeluarkan dalam Penawaran Umum Terbatas II PT Bank Victoria International Tbk dengan rincian sebagai berikut:

1. PT Victoria Sekuritas wajib membeli sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) saham;
2. PT Panin Sekuritas Tbk wajib membeli sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) saham;

dengan Harga Penawaran yang tercantum dalam Prospektus ini yaitu Rp 100 (seratus rupiah) setiap saham sesuai dengan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas II PT Bank Victoria International Tbk No. 37 tanggal 22 Januari 2003, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

Pemegang saham yang tidak menggunakan haknya dapat mengalami penurunan persentase kepemilikan (dilusi) dalam jumlah material sampai dengan maksimum 50,00% (lima puluh persen) sebelum Waran Seri III dilaksanakan dan 61,54% (enam puluh satu koma lima puluh empat persen) setelah Waran Seri III dilaksanakan.

Perseroan berencana untuk mengeluarkan saham baru atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM TERBATAS II

Seluruh dana hasil Penawaran Umum Terbatas II, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan dengan perincian sebagai berikut :

- Sebesar 60 % akan dipergunakan untuk penambahan kredit
- Sebesar 40 % akan dipergunakan untuk pembelian surat berharga.

Dana yang diperoleh dari Hasil Pelaksanaan Waran Seri III, seluruhnya akan digunakan untuk menambah modal kerja Perseroan.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil PUT II ini kepada Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan kepada Bapepam sesuai dengan Peraturan Nomor X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Apabila Perseroan bermaksud merubah penggunaan dananya tidak seperti yang diungkapkan dalam Prospektus ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan perubahan tersebut kepada Bapepam dengan disertai alasan dan pertimbangan, dan meminta persetujuan dari para pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pada tanggal 28 September – 26 Oktober 2000 Perseroan mengadakan Penawaran Umum Terbatas I dimana dana hasil penawaran tersebut setelah dikurangi biaya emisi, sepenuhnya telah direalisasikan sebagai berikut:

Penggunaan Dana	Rencana	Realisasi
Peningkatan Aktiva Produktif	100%	100%

III. PERNYATAAN HUTANG

Untuk masa sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2002, Perseroan mempunyai: (A) Kewajiban sebesar Rp 1,47 triliun dan (B) Kewajiban karena Komitmen dan Kontinjensi sebesar Rp 53,69 miliar, yang angka-angkanya diambil dari Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta & Mustofa dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai perubahan metode akuntansi pajak penghasilan dan penjelasan mengenai dampak memburuknya ekonomi di Indonesia terhadap Perseroan dengan perincian sebagai berikut :

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah) Jumlah
A. Kewajiban	
Kewajiban segera	8.472
Simpanan	
Pihak hubungan istimewa	1.533
Pihak ketiga	1.100.015
Simpanan dari bank lain	
Pihak ketiga	263.564
Hutang Pajak	4.921
Surat Berharga Yang Diterbitkan	90.513
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	2
Kewajiban Lain-lain	5.908
Jumlah Kewajiban	1.474.928
B. Kewajiban karena Komitmen dan Kontinjensi	
Komitmen	
Kewajiban karena komitmen	53.841
Jumlah kewajiban karena Komitmen	53.841
Kontinjensi	
Tagihan kontinjensi	
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	309
Kewajiban karena Kontinjensi	
Penerbitan jaminan dalam bentuk bank garansi	163
Jumlah kewajiban karena Kontinjensi	(146)
Jumlah Kewajiban karena Komitmen dan Kontinjensi	53.695

A. Kewajiban

1. *Kewajiban segera*

Kewajiban segera pada tanggal 30 September 2002 berjumlah sebesar Rp 8,47 milyar terdiri atas kewajiban atas bunga simpanan V-Link sebesar Rp 2,12 miliar, kewajiban atas bunga deposito sebesar Rp 3,86 miliar, kewajiban atas bunga obligasi sebesar Rp 1,15 miliar, kewajiban atas bunga *call money* Rp 166 juta, kewajiban atas jasa giro sebesar Rp 801 juta dan kewajiban atas bunga tabungan Rp 369 juta.

2. *Kewajiban dalam bentuk Simpanan*

Hutang dalam bentuk penempatan simpanan sebesar Rp 1,101,549 juta terdiri dari :

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)	
	Jumlah	
Giro		
- Pihak Ketiga		72.540
- Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa		181
Tabungan		
- Pihak Ketiga		34.505
- Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa		261
Deposito Berjangka		
- Pihak Ketiga		678.102
- Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa		619
Sertifikat Deposito - bersih		21.584
Simpanan V-Link		
- Pihak Ketiga		293.284
- Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa		473
Jumlah		1.101.549

Tingkat bunga rata-rata rekening giro sebesar 4% per tahun, tabungan sebesar 11% per tahun, deposito berjangka sebesar 14% per tahun, sertifikat deposito sebesar 14% per tahun, dan simpanan V-Link sebesar 14% per tahun.

3. *Simpanan dari Bank lain*

Simpanan dari bank lain berjumlah Rp 263,564 juta yang terdiri dari:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)	
	Bunga rata rata (%)	Jumlah
Pihak ketiga		
- Giro	9,25 %	59
- Deposito berjangka	13,75 %	10.666
- Sertifikat Deposito-net	13,60 %	88.339
- Call Money	13,80 %	164.500
Jumlah		263.564

4. Hutang Pajak

Hutang pajak Perseroan pada tanggal 30 September 2002 adalah sebesar Rp 4,921 miliar yang terdiri dari :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Hutang Pajak Kini	2.426
Hutang Pajak Penghasilan Pasal 21	30
Hutang Pajak Penghasilan Pasal 23	2.428
Hutang Pajak Penghasilan Pasal 25	37
Hutang Pajak Penghasilan Pasal 26	-
Jumlah	4.921

5. Surat-surat Berharga Yang Diterbitkan

Surat-surat berharga yang diterbitkan pada tanggal 30 September 2002 sebesar Rp 90,513 juta merupakan obligasi atas unjuk yang diterbitkan Perseroan dan terdaftar di Bursa Efek Surabaya, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Nilai nominal	92.000
Biaya emisi efek hutang	(1.487)
Jumlah obligasi – bersih	90.513

Wali amanat dari penerbitan obligasi ini adalah PT Bank Niaga Tbk. Pada pasar perdana, obligasi ini dikeluarkan dengan nilai kurs 100%.

Obligasi berjangka waktu 7 tahun, atas permintaan pemegang obligasi maupun Perseroan melalui mekanisme opsi put dan opsi call oleh Perseroan, pelunasan pokok obligasi dapat dilakukan lebih awal yaitu pada ulang tahun tanggal emisi tahun ke-5.

Bunga seri A yaitu tingkat bunga obligasi tetap sebesar 16,25% per tahun untuk kupon bunga obligasi ke-1 sampai dengan kupon bunga ke-28 dan bunga seri B yaitu tingkat bunga obligasi tetap sebesar 16% per tahun untuk kupon bunga obligasi ke-1 dan ke-2 dan mengambang untuk kupon bunga obligasi ke-3 sampai dengan kupon obligasi ke-28 dihitung berdasarkan rata-rata tingkat bunga deposito dalam mata uang Rupiah berjangka 6 bulan dari PT Bank Mandiri, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Bank Central Asia dan PT Bank Panin Tbk. ditambah premi tetap sebesar 2,5% per tahun.

6. Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi

Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi pada tanggal 30 September 2002 adalah sebesar Rp 1,626 juta yang merupakan estimasi kerugian yang terbentuk atas transaksi bank garansi pada tahun 2002 dan 2001. Kualitas transaksi komitmen dan kontinjensi pada tanggal 30 September 2002 dan 31 Desember 2001 seluruhnya digolongkan lancar.

Mutasi estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi adalah sebagai berikut:

Saldo awal periode	3.174
Penyisihan (pembukuan kembali) periode berjalan	(1.548)
Jumlah	1.626

7. Kewajiban lain-lain

Kewajiban lain-lain Perseroan pada tanggal 30 September 2002 adalah sebesar Rp 5,91 miliar yang terdiri dari pendapatan diterima di muka, beban pensiun yang masih harus dibayar, *arrangement fee* yang masih harus dibayar, biaya yang masih harus dibayar, biaya tenaga kerja yang masih harus dibayar dan lain-lain.

B. Kewajiban karena Komitmen dan Kontinjensi

Pada tanggal 30 September 2002 Perseroan memiliki kewajiban karena komitmen sebesar Rp 53,69 miliar merupakan fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan dan kewajiban karena kontinjensi sebesar Rp 163 juta yang merupakan penerbitan jaminan dalam bentuk bank garansi.

Setelah tanggal neraca sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran dinyatakan efektif, Perseroan tidak melakukan penarikan hutang baru maupun memperoleh kewajiban baru dalam jumlah yang material, kecuali yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

Kewajiban Perseroan Pada Tanggal 31 Desember 2002 (Tidak Diaudit)

Sesuai dengan laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2002 yang tidak diaudit, Perseroan mempunyai : (A) kewajiban sebesar Rp 1.481.641 juta dan (B) kewajiban karena komitmen dan kontinjensi sebesar Rp 63.405 juta dengan perincian sebagai berikut :

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)
	Jumlah
Kewajiban	
Simpanan	
Giro	42.403
Tabungan	51.278
Deposito Berjangka	930.512
Sertifikat Deposito - Bersih	-
Jumlah Simpanan	1.024.193
Kewajiban Segera Lainnya	198.560
Pinjaman yang Diterima	147.137
Hutang Pajak	2.989
Surat-surat Berharga Yang Diterbitkan	98.000
Kewajiban Lain-Lain	10.762
Jumlah Kewajiban	1.481.641
Kewajiban karena Komitmen dan Kontinjensi	
Komitmen	
Kewajiban karena Komitmen	
Fasilitas Kredit kepada nasabah yang belum digunakan	63.125
Jumlah Kewajiban karena Komitmen	
Kontinjensi	
Tagihan karena Kontinjensi	
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	(10)
Kewajiban karena Kontinjensi	
Penerbitan jaminan dalam bentuk:	
Bank Garansi	290
Jumlah Kewajiban karena Kontinjensi	280
Total Kewajiban karena Komitmen dan Kontinjensi	63.405

Melihat pada keadaan likuiditas Perseroan dan melihat hasil operasi perseroan secara historis, manajemen berkeyakinan akan dapat menyelesaikan seluruh kewajibannya sesuai dengan persyaratan sebagaimana mestinya.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

1. UMUM

Perseroan didirikan di Jakarta pada tahun 1992, bergerak dalam bidang usaha jasa perbankan di Indonesia dan mempunyai status sebagai bank umum. Kegiatan usaha Perseroan adalah melakukan penghimpunan dana masyarakat termasuk deposito berjangka, tabungan, giro dan sertifikat deposito yang kemudian disalurkan dalam bentuk pemberian kredit baik kepada individu maupun kepada perusahaan, juga transaksi antar bank dan melakukan investasi melalui penempatan pada jenis investasi yang aman dan menguntungkan.

Saat ini Perseroan melaksanakan kegiatan usahanya di Kantor Pusat Perseroan yang terletak di Gedung Bank Panin Senayan, Lantai Dasar, Jl Jend. Sudirman No. 1, Jakarta Pusat dan dibantu dengan 18 (delapan belas) kantor operasional yang meliputi 14 (empat belas) kantor cabang pembantu, 3 (tiga) kantor kas dan 1 (satu) kantor *payment point* yang berlokasi di wilayah Jakarta dan Tangerang. Di samping itu, dengan telah diperolehnya izin usaha sebagai pedagang valuta asing dari Bank Indonesia dengan Surat Izin No. 029/126/UOPM tanggal 25 Maret 1997, Perseroan juga mengoperasikan 1 (satu) *counter money changer* di Kantor Pusat.

Pemulihan ekonomi nasional yang berlangsung lambat dari krisis moneter tahun 1997 mempunyai dampak terhadap kegiatan usaha Perseroan. Namun adanya komitmen dan pengalaman dari manajemen Perseroan yang didukung kerjasama yang sangat baik dengan para nasabah serta pihak lainnya, Perseroan dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

2. KEUANGAN

Analisa keuangan ini disajikan berdasarkan angka-angka dari ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta dan Mustofa untuk masa sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2002 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001, 2000 dan 1999 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta dan Mustofa dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material dengan penjelasan mengenai penyajian kembali laporan keuangan tahun 2000 dan dampak memburuknya ekonomi di Indonesia terhadap Perseroan.

	(dalam jutaan Rupiah)			
	30	31 Desember		
	September	2001	2000	1999
	2002	(1 tahun)	(1 tahun)	(1 tahun)
	(9 bulan)			
Aktiva	1.554.927	1.381.101	1.101.536	441.825
Kewajiban	1.474.928	1.312.824	1.038.158	387.401
Ekuitas	80.000	68.277	63.379	54.424
Pendapatan Bunga	186.998	152.703	90.037	69.824
Beban Bunga	163.247	134.419	75.583	60.546
Pendapatan Bunga-Bersih	23.751	18.284	14.454	9.278
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	5.149	992	278	164
Beban Operasional Lainnya	9.354	11.769	7.568	5.592
Beban Operasional Lainnya - Bersih	(23.759)	(12.790)	(8.317)	(5.654)
Laba Operasional	5.141	6.486	6.415	3.788
Pendapatan (Beban) Non Operasional	121	212	(93)	94
Laba Sebelum Beban Pajak	5.263	6.698	6.322	3.881
Laba Bersih	3.862	4.898	4.554	2.796

2.1. Pendapatan dan Beban Operasional

a. Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga Perseroan adalah sebesar Rp 187 miliar untuk masa sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2002. Pendapatan bunga Perseroan tersebut terutama terdiri dari pendapatan bunga obligasi sebesar Rp 103,62 miliar, kredit pinjaman tetap sebesar Rp 25,18 miliar, dan penempatan pada bank lain dalam bentuk *Call Money* sebesar Rp 19,37 miliar.

Pada tahun 2001 pendapatan bunga Perseroan berjumlah sebesar Rp 152,70 miliar naik 70% atau sebesar Rp 62,67 miliar dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2000 yang besarnya Rp 90,04 miliar. Hal ini terutama dikarenakan adanya kenaikan pada pendapatan bunga obligasi sebesar 62,52 miliar atau sebesar 189,63% dari tahun 2000.

Pada tahun 2000 pendapatan bunga Perseroan berjumlah Rp 90,04 miliar naik sebesar Rp 20,21 miliar atau 28,95% dari tahun 1999 yang berjumlah sebesar Rp 69,82 miliar. Kenaikan ini terutama karena adanya peningkatan pada pendapatan bunga obligasi.

b. Beban Bunga

Untuk masa sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2002 beban bunga Perseroan adalah sebesar Rp 163,25 miliar. Beban bunga tersebut yang terutama adalah beban bunga deposito berjangka sebesar Rp 70,47 miliar, beban bunga pada simpanan V-Link sebesar Rp 46,73 miliar, beban bunga obligasi sebesar Rp 13,65 miliar dan sertifikat deposito sebesar Rp 13,20 miliar.

Pada tahun 2001 beban bunga Perseroan sebesar Rp 134,42 miliar atau mengalami kenaikan 77,84% sebesar Rp 58,84 miliar dibandingkan dengan tahun 2000 berjumlah sebesar Rp 75,58 miliar. Kenaikan terbesar pada bagian ini disebabkan karena beban bunga untuk produk Simpanan V-Link yang merupakan produk baru Perseroan pada tahun 2001, yang kemudian diikuti oleh beban bunga deposito berjangka.

Beban bunga Perseroan pada tahun 2000 sebesar Rp 75,58 miliar meningkat sebesar 24,84% atau sebesar Rp 15,04 miliar dibandingkan dengan tahun 1999 yang besarnya Rp 60,55 miliar. Peningkatan beban pada tahun 2000 terutama diakibatkan oleh kenaikan beban bunga obligasi dan beban bunga deposito berjangka.

c. Pendapatan Bunga - Bersih

Pendapatan bunga – bersih Perseroan untuk masa sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2002 adalah sebesar Rp 23,75 miliar.

Pada tahun 2001 pendapatan bunga – bersih Perseroan adalah sebesar Rp 18,28 miliar atau mengalami kenaikan sebesar Rp 3,83 miliar atau 26,50% dibandingkan dengan tahun 2000 yang besarnya Rp 14,45 miliar. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan yang cukup berpengaruh dari pendapatan bunga obligasi.

Pendapatan bunga – bersih Perseroan pada tahun 2000 adalah sebesar Rp 14,45 miliar atau mengalami peningkatan sebesar Rp 5,18 miliar atau 55,79% dari tahun 1999 yang berjumlah

sebesar Rp 9,28 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan dari pendapatan bunga yang berasal dari kredit yang diberikan - pinjaman tetap.

2.2. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya

a. Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya

Pendapatan (beban) operasional lainnya Perseroan untuk masa sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2002 adalah sebesar Rp 5,15 miliar. Pendapatan (beban) operasional lainnya terutama terdiri dari keuntungan bersih penjualan efek sebesar Rp 4,16 miliar dan pendapatan provisi dan komisi lainnya –bersih sebesar Rp 726,58 juta.

Pada tahun 2001 pendapatan (beban) operasional lainnya Perseroan adalah sebesar Rp 991,64 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp 713,67 atau 256,74% bila dibandingkan dengan tahun 2000 yang besarnya negatif Rp 277,97 juta. Hal tersebut terutama disebabkan oleh adanya keuntungan bersih penjualan efek dan pendapatan provisi dan komisi.

Pendapatan (beban) operasional lainnya Perseroan pada tahun 2000 adalah sebesar Rp 277,97 juta atau mengalami peningkatan sebesar Rp 114,23 juta atau sebesar 69,77% bila dibandingkan dengan tahun 1999 yang berjumlah sebesar Rp 163,74 miliar yang disebabkan terutama oleh kerugian penjualan surat-surat berharga yang cukup besar.

b. Beban Operasional Lainnya

Beban operasional lainnya Perseroan untuk masa sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2002 adalah sebesar Rp 9,35 miliar. Beban operasional lainnya tersebut terutama terdiri dari beban umum dan administrasi sebesar Rp 4,27 miliar dan beban tenaga kerja sebesar Rp 3,93 miliar.

Pada tahun 2001 beban operasional lainnya Perseroan adalah sebesar Rp 11,77 miliar atau mengalami penurunan sebesar Rp 2,42 miliar atau 20,52% dibandingkan dengan tahun 2000 yang besarnya mencapai Rp 6,70 miliar. Hal ini disebabkan terutama karena adanya kenaikan pada beban operasional umum dan administrasi seperti adanya kenaikan penyusutan aktiva tetap dan biaya iklan dan promosi.

Beban operasional lainnya Perseroan pada tahun 2000 adalah sebesar Rp 7,57 miliar. Terjadi kenaikan Rp 1,91 miliar atau sebesar 33,85% dibandingkan beban operasional lainnya pada tahun 1999 sebesar Rp 5,65 miliar. Hal tersebut terutama disebabkan oleh adanya kenaikan pada beban umum dan administrasi seperti premi asuransi, iklan dan promosi dan penelitian dan pengembangan produk.

c. Beban Operasional Lainnya - Bersih

Beban operasional lainnya – bersih Perseroan untuk masa sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2002 sebesar Rp 23,76 miliar. Bagian utama beban operasional lainnya-bersih ini terdiri dari beban penyisihan kerugian aktiva produktif sebesar Rp 14,41 miliar dan juga diikuti oleh beban operasional lainnya yang berjumlah sebesar Rp 9,35 miliar.

Pada tahun 2001 beban operasional lainnya – bersih Perseroan adalah sebesar Rp 12,79 miliar atau naik sebesar Rp 4,47 miliar atau 53,77% bila dibandingkan dengan tahun 2000 yang besarnya mencapai Rp 8,32 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya beban umum dan administrasi dan beban tenaga kerja.

Beban operasional lainnya – bersih Perseroan pada tahun 2000 adalah sebesar Rp 8,32 miliar atau meningkat sebesar Rp 2,83 miliar dan 51,50% bila dibandingkan dengan tahun 1999 yang berjumlah sebesar Rp 5,49 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya kenaikan pada beban umum dan administrasi dan penyusutan aktiva tetap.

d. **Laba Operasional**

Laba operasional Perseroan untuk masa sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2002 adalah sebesar Rp 5,14 miliar. Dimana pendapatan bunga bersih berjumlah Rp 23,75 miliar dan beban operasional bersih berjumlah sebesar Rp 23,30 miliar.

Pada tahun 2001 laba operasional Perseroan adalah sebesar Rp 6,49 miliar meningkat sebesar Rp 71 juta atau 1,11% dibandingkan pada tahun 2000 yang besarnya Rp 6,42 miliar. Peningkatan pada tahun 2001 hanya 1,11%, hal ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada pendapatan bunga dan pendapatan operasional lainnya.

Laba operasional Perseroan pada tahun 2000 adalah sebesar Rp 6,42 miliar atau mengalami kenaikan sebesar Rp 2,63 miliar atau sebesar 69,36% jika dibandingkan pada tahun 1999 yang berjumlah sebesar Rp 3,79 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan bunga.

e. **Laba Bersih**

Laba bersih Perseroan untuk masa sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2002 adalah sebesar Rp 3,86 miliar. Setelah laba operasional ditambahkan dengan pendapatan non operasional sebesar Rp 121,20 juta dan dikurangi oleh beban pajak sebesar Rp 1,40 miliar maka Perseroan membukukan laba bersih sebesar Rp 3,86 miliar. Pendapatan non operasional sebagian besar disebabkan dari keuntungan penjualan aktiva tetap.

Pada tahun 2001 laba bersih Perseroan sebesar Rp 4,90 miliar mengalami peningkatan sebesar Rp 344 juta atau sebesar 7,55% menjadi sebesar Rp 4,55 miliar pada tahun 2000. Secara keseluruhan komponen dari pendapatan dan beban operasional mengalami kenaikan sehingga laba operasional meningkat sedikit tapi Perseroan memperoleh peningkatan dari pendapatan non operasional.

Laba bersih Perseroan pada tahun 2000 adalah sebesar Rp 4,55 miliar atau mengalami kenaikan sebesar Rp 1,76 miliar atau sebesar 62,77% bila dibandingkan dengan tahun 1999 yang berjumlah Rp 2,80 miliar. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya laba operasional Perseroan.

2.3. Aktiva, Kewajiban dan Ekuitas

a. **Aktiva**

Jumlah aktiva Perseroan pada tanggal 30 September 2002 adalah sebesar Rp 1,55 triliun. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar Rp 173,83 miliar atau 12,59% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 1,38 triliun. Bagian terbesar dari aktiva Perseroan adalah akun surat-surat berharga sebesar Rp 741,64 miliar, kredit yang diberikan sebesar Rp 455,22 miliar dan penempatan pada bank lain sebesar Rp 247,49 miliar.

Pada tanggal 31 Desember 2001 jumlah aktiva Perseroan berjumlah sebesar Rp 1,38 triliun atau mengalami kenaikan sebesar Rp 279,56 miliar atau 25,38% dari jumlah aktiva pada

tanggal 31 Desember 2000 yang berjumlah sebesar Rp 1,10 triliun. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya kenaikan pada akun efek-efek terutama pada obligasi pemerintah.

Jumlah aktiva Perseroan pada tanggal 31 Desember 2000 adalah sebesar Rp 1,10 triliun, meningkat sebesar Rp 659,71 miliar atau 149,32% dibandingkan dengan jumlah aktiva pada tanggal 31 Desember 1999 yang berjumlah sebesar Rp 441,83 miliar. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan pada akun surat-surat berharga terutama pada Sertifikat Bank Indonesia dan obligasi dari Rp 24,82 miliar pada tanggal 31 Desember 1999 menjadi Rp 666,69 miliar per tanggal 31 Desember 2000. Selain itu, Perseroan juga meningkatkan jumlah kredit yang diberikan dari Rp 61,46 miliar dari tanggal 31 Desember 1999 menjadi Rp 160,39 miliar pada tanggal 31 Desember 2000.

b. Kewajiban

Jumlah kewajiban Perseroan pada tanggal 30 September 2002 adalah sebesar Rp 1,47 triliun. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar Rp 162,10 miliar atau 12,35% dari posisi pada tanggal 31 Desember 2001 yang berjumlah sebesar Rp 1,31 triliun. Kewajiban Perseroan terutama terdiri kewajiban segera sebesar Rp 8,47 miliar, simpanan sebesar Rp 1,10 triliun dan simpanan dari bank lain sebesar Rp 263,56 miliar.

Pada tanggal 31 Desember 2001 jumlah kewajiban Perseroan berjumlah Rp 1,31 triliun, mengalami kenaikan sebesar 26,46% atau Rp 274,67 miliar dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2000 yang besarnya Rp 1,04 triliun. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya kenaikan pada simpanan dari bank lain – pihak ketiga sebesar Rp 196,20 miliar, dibandingkan pada tahun sebelumnya yang hanya berjumlah Rp 12,68 miliar.

Jumlah kewajiban Perseroan pada tanggal 31 Desember 2000 adalah sebesar Rp 1,04 triliun, meningkat sebesar Rp 650,76 miliar atau 167,98% dibandingkan posisi kewajiban pada tanggal 31 Desember 1999 yang berjumlah Rp 387,40 miliar. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan pada deposito berjangka dari Rp 235,22 miliar pada tanggal 31 Desember 1999 menjadi Rp 704,87 miliar pada tanggal 31 Desember 2000. Selain itu Perseroan juga menerbitkan surat berharga sejumlah Rp 97,44 miliar untuk tahun 2000.

c. Ekuitas

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 30 September 2002 adalah sebesar Rp 80 miliar. Jumlah ini meningkat sebesar Rp 11,72 miliar atau 17,17% dari posisi pada tanggal 31 Desember 2001 yang berjumlah sebesar Rp 68,28 miliar. Saldo laba untuk masa sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2002 berjumlah Rp 10,03 miliar.

Pada tanggal 31 Desember 2001 jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp 68,28 miliar atau mengalami peningkatan Rp 4,90 miliar atau 7,73% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2000 yang sebesar Rp 63,38 miliar karena adanya saldo laba sebesar Rp 6,17 miliar per 31 Desember 2001 sedangkan pada tanggal 31 Desember 2000, Perseroan hanya mencatatkan laba sebesar Rp 1,27 miliar.

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2000 adalah sebesar Rp 63,38 miliar, mengalami peningkatan sebesar 16,45% atau sebesar Rp 8,96 miliar dibandingkan pada ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 1999 yang berjumlah Rp 54,42 miliar. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp 10 miliar pada tahun 2000 melalui pelaksanaan PUT I. Pada tahun 2000, Perseroan mencatatkan laba sebesar Rp 1,27 miliar dan pada tahun 1999 sebesar Rp 3,06 miliar.

2.4. Imbal Hasil Ekuitas dan Imbal Hasil Investasi

a. Imbal Hasil Ekuitas

Imbal hasil ekuitas atau *Return on Equity (ROE)* adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih dari ekuitas yang ditanamkan, yang diukur dari perbandingan antara laba bersih dengan rata-rata jumlah ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan pada tanggal 30 September 2002 dan selama tahun 2001, 2000 dan 1999 masing-masing adalah sebesar 5,21%, 7,44%, 7,73% dan 6,73%.

b. Imbal Hasil Aktiva

Imbal hasil aktiva atau *Return on Asset (ROA)* adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih dari aktiva yang dimiliki, yang diukur dari perbandingan antara laba bersih dengan rata-rata jumlah aktiva. Imbal hasil aktiva Perseroan pada tanggal 30 September 2002 dan selama tahun 2001, 2000 dan 1999 masing-masing adalah sebesar 0,26 %, 0,39%, 0,59% dan 0,57 %.

2.5. Likuiditas Perseroan

Likuiditas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya dengan menjaga cadangan wajib (perbandingan antara saldo rekening pada Bank Indonesia dengan dana pihak ketiga) yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Perseroan selalu menjaga cadangan wajibnya rata-rata di atas 3%. Perseroan meningkatkan cadangan wajib tersebut menjadi minimal 5% dari simpanan masyarakat sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mulai bulan April 1997. Hal ini juga dapat dilihat dari posisi LDR (*Loan to Deposit Ratio*) Perseroan pada tanggal 30 September 2002, 31 Desember 2001, 2000, dan 1999 adalah sebesar 54,63 % , 30,35%; 17,79%; dan 18,21%.

3. PRINSIP-PRINSIP PERBANKAN YANG SEHAT

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, kondisi kesehatan perbankan selalu dimonitor oleh Bank Indonesia. Salah satu prinsip kesehatan yang perlu diperhatikan oleh manajemen bank adalah CAMEL yang terdiri dari *Capital Adequacy, Asset Quality, Management, Earnings Sustainability* dan *Liquidity*.

1. Kecukupan Modal (*Capital Adequacy*)

Berdasarkan SK Dir no. 31/146/Kep/Dir tanggal 12 Nopember 1998, pemerintah mengharuskan bank-bank umum untuk mencapai rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum adalah sebesar 4%. Pada tanggal 13 Desember 2001, berdasarkan Ketentuan Bank Indonesia PBI No:3/21/PBI/2001, saat ini mengharuskan bank-bank umum untuk mencapai rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum adalah sebesar 8%.

Dalam mengikuti petunjuk tersebut di atas maka Perseroan telah dapat memenuhi kewajiban rasio kecukupan modal (CAR) yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia selama ini. Oleh karena itu Perseroan merupakan bank yang sehat dengan rasio CAR yang telah melebihi ketentuan Bank Indonesia.

Tabel di bawah ini menunjukkan rasio kecukupan modal (CAR) Perseroan untuk masa yang berakhir pada tanggal 30 September 2002 dan 31 Desember 2001, 2000 dan 1999.

	30 September 2002	31 Desember		
		2001	2000	1999
Minimum CAR	8%	8%	4%	4%
CAR Perseroan	8,91%	15,31%	18,76 %	34,44%

Dengan tercatatnya saham Perseroan di Bursa Efek maka Perseroan memiliki akses dan kemampuan untuk selanjutnya melakukan penambahan modal apabila diperlukan di masa yang akan datang.

Apabila kondisi nilai CAR berada di bawah ketentuan Bank Indonesia maka akan berakibat menurunnya kepercayaan dari para deposan maupun mitra usaha Bank. Hal ini disebabkan oleh keraguan mereka akan kelangsungan usaha Perseroan sebagai Bank.

2. Kualitas Aktiva Produktif (*Asset Quality*)

Krisis ekonomi yang sedang terjadi merupakan penyebab daripada menurunnya kualitas aktiva produktif yang dimiliki oleh Perseroan terutama kredit yang diberikan oleh Perseroan. Krisis ekonomi tersebut telah mengakibatkan daya beli konsumen menurun yang berakibat melemahnya kegiatan usaha pada sebagian nasabah Perseroan. Sebagai dampaknya maka pengembalian kredit yang diberikan menjadi semakin menurun baik secara kualitas maupun secara kuantitas.

Tabel berikut ini menunjukkan perkembangan kualitas kredit Perseroan masa 30 September 2002 dan 31 Desember 2001, 2000 dan 1999.

(Dalam Jutaan Rupiah)

Kategori	30 Sept 2002		31 Desember					
			2001		2000		1999	
	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
Lancar	380.914	80,75	189.191	93,72	137.753	84,58	48.262	74,43
Dalam Perhatian khusus	69.043	14,64	10.339	5,12	21.652	13,29	6.277	9,68
Kurang Lancar	18.223	3,86	208	0,10	260	0,16	7.932	12,23
Diragukan	1.132	0,24	1.495	0,74	2.827	1,74	-	0,00
Macet	2.413	0,51	632	0,31	374	0,23	2.372	3,66
Total Kredit	471.725	100,00	201.865	100,00	162.866	100,00	64.843	100,00

Jumlah kredit bermasalah mengalami penurunan sampai dengan tanggal 30 September 2002 yang disebabkan karena tingkat suku bunga telah menurun, semakin stabilnya nilai Rupiah terhadap mata uang asing dan tingkat likuiditas yang semakin meningkat menyebabkan penurunan jumlah kredit yang bermasalah.

3. Manajemen (*Management*)

Penilaian terhadap manajemen risiko meliputi kualitas manajemen risiko, risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, risiko hukum, risiko pemilik dan pengurus. Perseroan berusaha menekan berbagai risiko yang dapat timbul dari kegiatan operasi perbankan termasuk pula risiko atas kredit yang telah diberikan dengan selalu berpegang teguh pada prinsip *prudential banking* dalam setiap kebijakannya dengan selalu memperhatikan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Perseroan memiliki standar khusus dalam pemberian kredit yaitu dengan melakukan proses dan analisa yang mendetail seperti penilaian atas karakter, kemampuan nasabah dan nilai jaminan yang diberikan atas besarnya pemberian kredit.

Perseroan memiliki manajemen yang ditunjang oleh para anggota Direksi Perseroan dan diawasi oleh jajaran anggota Komisaris Perseroan yang telah berpengalaman antara 10 sampai dengan 25 tahun di bidang perbankan. Perseroan dalam jajaran pejabat seniornya juga ditunjang oleh orang-orang yang memiliki kapabilitas serta pengalaman luas dalam industri perbankan dan keuangan.

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan juga berusaha menerapkan *Good Corporate Governance*, dimana manajemen Perseroan akan bertindak sesuai dengan peraturandan perundangan yang berlaku dengan mengindahkan pula aspek-aspek transparansi serta menjauhi praktek usaha yang bertentangan dengan hukum.

Perseroan selalu berpegang teguh pada kepercayaan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu aset terpenting dalam memajukan usahanya. Guna meningkatkan pendayagunaan sumber daya manusia, Perseroan secara konsisten dan berkala melakukan pelatihan karyawannya dimana mereka diberikan pelatihan sesuai dengan bidangnya sehingga karyawan yang bersangkutan dapat bekerja lebih produktif. Program pelatihan yang diadakan terbagi menjadi dua yaitu pelatihan internal dan eksternal.

4. Rentabilitas (*Earnings Sustainability*)

Pendapatan Perseroan terutama berasal dari pendapatan bunga terutama dari obligasi yang sangat dipengaruhi oleh kualitas aktiva produktif yang dimiliki oleh Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan dalam mengelola aktiva produktif yang dimiliki selalu mengacu pada prinsip kehati-hatian (*Prudent Banking*). Tingkat rentabilitas dapat diukur dengan:

Imbal Hasil Rata-Rata Ekuitas (ROAE)

Imbal hasil ekuitas atau *Return on Equity (ROE)* adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih dari ekuitas yang ditanamkan, yang diukur dari perbandingan antara laba bersih dengan rata-rata jumlah ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan pada tanggal 30 September 2002 dan selama tahun 2001, 2000 dan 1999 masing-masing adalah sebesar 5,21%, 7,44%, 7,73% dan 6,73%.

Imbal Hasil Rata-Rata Aktiva (ROAA)

Imbal hasil aktiva atau *Return on Asset (ROA)* adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih dari aktiva yang dimiliki, yang diukur dari perbandingan antara laba bersih dengan rata-rata jumlah aktiva. Imbal hasil aktiva Perseroan pada tanggal 30 September 2002 dan selama tahun 2001, 2000 dan 1999 masing-masing adalah sebesar 0,26%, 0,39%, 0,59% dan 0,57%.

5. Likuiditas (*Liquidity*)

Penilaian terhadap faktor likuiditas dilakukan dengan menilai rasio kewajiban bersih *Call Money* terhadap aktiva lancar dan rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank. Manajemen Perseroan selalu berusaha untuk menjaga tingkat likuiditas Perseroan pada level tertentu agar dapat memenuhi kewajiban keuangannya dan memenuhi kebutuhan nasabah tepat pada waktunya dan tercermin pada rasio *Loan to Deposit (LDR)* yang selalu berada di bawah 60,00%. Posisi LDR Perseroan per 30 September 2002, 31 Desember 2001, 2000 dan 1999 adalah 54,63%, 30,35%, 17,79% dan 18,21%. Karena Perseroan memiliki nasabah yang cukup banyak dan beraneka ragam guna memenuhi sumber dana pihak ketiga maka kemungkinan untuk menghadapi masalah likuiditas termasuk minimal.

4. PROSPEK USAHA

Seperti diketahui saat ini Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi sehubungan dengan terjadinya gejolak nilai tukar mata uang, menurunnya nilai kapitalisasi pasar di bursa efek yang mengakibatkan merosotnya Indek Harga Saham Gabungan dan menurunnya kegiatan ekonomi. Oleh karena itu sektor perbankan dituntut untuk mampu melakukan konsolidasi usaha serta restrukturisasi permodalan agar mampu mempertahankan dan mengembangkan usahanya. Untuk itu Perseroan melakukan usaha-usaha untuk lebih meningkatkan kinerja keuangannya termasuk juga usaha-usaha untuk meningkatkan likuiditas dan permodalan.

Adapun strategi-strategi yang akan diterapkan oleh Perseroan dalam menghadapi krisis ekonomi di antaranya memperkuat struktur permodalan, melakukan penagihan kredit yang lebih cepat, meningkatkan volume usaha dalam bidang pasar uang antar bank dan efisiensi di segala bidang.

Mengingat sumber utama pendapatan Perseroan masih mengandalkan pendapatan dari hasil penempatan pada pasar uang antar bank dan pemberian kredit, maka kebijakan-kebijakan perkreditan maupun yang lainnya senantiasa ditingkatkan dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian (*prudent banking*) yang telah dijalankan Perseroan selama ini. Di lain pihak Perseroan menyadari, bahwa iklim persaingan yang semakin ketat di masa mendatang akan menyebabkan semakin menipisnya spread antara pendapatan bunga dan biaya bunga (*Net Interest Margin*) yang diperoleh. Menghadapi kondisi seperti ini, Perseroan akan terus berusaha meningkatkan kontribusi pendapatan imbal jasa (*Fee Based Income*) terhadap pendapatan Perseroan melalui jasa-jasa perbankan yang telah dijalankan Perseroan selama ini dan pemberian jasa-jasa perbankan baru lainnya seperti pembukaan tempat penukaran uang (*Money Changer*) dan akan ikut serta dalam program ATM bersama.

Sesuai dengan target pasar yang dibidik Perseroan saat ini, Perseroan akan terus memfokuskan strategi bisnisnya ke sektor retail yang meliputi industri menengah kecil dan perorangan/badan usaha kecil yang saat ini masih belum banyak dilayani oleh perbankan namun memiliki potensi ekonomi yang cukup besar.

5. KONDISI INDUSTRI PERBANKAN

Kondisi perbankan Indonesia pada tahun 2002 menunjukkan keadaan yang semakin membaik. Hal ini ditunjukkan dengan suku bunga yang terus menurun sepanjang tahun yang lalu. Kinerja perbankan juga semakin membaik dengan langkah Bank Indonesia membatasi pembelian kredit di BPPN dan penundaan pemberlakuan aturan kredit bermasalah maksimum 5% sampai dengan bulan Juni tahun 2003. Penurunan suku bunga ini diharapkan mampu memperlancar penyaluran kredit. Bank Sentral juga tetap pada kebijakan pelonggaran moneter untuk tahun 2003 ini. Langkah ini dipastikan bisa menjadi stimulus pemulihan ekonomi Indonesia.

Membbaiknya kinerja perbankan juga terlihat dari peningkatan profitabilitas perbankan. Tanda-tanda makin stabilnya perbankan juga karena bank-bank mulai melakukan perekrutan karyawan-karyawan baru, mulai meningkatnya pertumbuhan kredit meskipun masih lambat. Fungsi bank sebagai alat intermediasi belum menunjukkan arah pemulihan yang diharapkan karena masih tingginya resiko seperti belum stabilnya kondisi politik, sosial keamanan dan makro ekonomi serta lambatnya proses restrukturisasi perusahaan.

Makin meningkatnya persaingan dengan bank-bank asing dan keberadaan obligasi pemerintah yang akan menipiskan margin laba bank-bank tersebut. Komposisi aktiva produktif perbankan pada saat ini masih didominasi oleh surat berharga atau obligasi pemerintah (44,5%) sehingga pendapatan bunga

perbankan secara keseluruhan tergantung pada bunga surat berharga disamping SBI dan kredit. Ketergantungan bank-bank pada pendapatan bunga pada surat berharga (terutama obligasi pemerintah) menempatkan posisi bank-bank tersebut rentan likuiditasnya jika sampai terjadi penundaan pembayaran bunga obligasi oleh pemerintah.

Kebijakan pemerintah yang lebih menekankan industri perbankan pada prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking*) dan independensi BI dari campur tangan pemerintah diharapkan akan menyebabkan industri perbankan setelah krisis menjadi lebih tangguh di masa mendatang.

Pemerintah diharapkan dapat mengatasi persoalan-persoalan perbankan tersebut dengan menempuh sejumlah langkah termasuk percepatan restrukturisasi asset dan penjualan asset-asset yang ada di BPPN, privatisasi atau divestasi saham pemerintah di bank-bank yang telah direstrukturisasi serta menciptakan iklim yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi. Dari industri perbankan juga diharapkan adanya perbaikan internal manajemen, *outlook* dan *good corporate governance* sehingga fungsi bank sebagai lembaga intermediasi dapat ikut serta menggerakkan pembangunan perekonomian.

Program restrukturisasi perbankan nasional akan tetap dijalankan secara sistematis sebagai bagian integral dan utama dalam upaya pemulihan perekonomian nasional. Upaya demikian bertujuan untuk menciptakan sinergi positif dan seimbang antara pertumbuhan perekonomian makro dengan perbankan mikro khususnya melalui pelaksanaan terpadu berbagai langkah kebijakan pembenahan perbankan.

Secara umum, perbankan nasional belum pulih dari krisis. Membesarnya NPL, semakin menurunnya CAR, dan rendahnya LDR disebabkan oleh kondisi ekonomi makro yang belum mendukung. Suku bunga masih tinggi, rupiah belum stabil benar, dan sebagian besar perusahaan belum direstrukturisasi utangnya. Namun, dalam situasi seperti itu, sejumlah bank menunjukkan kinerja yang mengesankan, kepercayaan masyarakat atas perbankan telah berangsur-angsur pulih sehingga mendorong pertumbuhan penghimpunan dana pada tingkat yang relatif tinggi khususnya pada kelompok bank yang memiliki derajat kredibilitas yang lebih besar.

V. RESIKO USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam resiko usaha. Ruang lingkup usaha Perseroan yang di antaranya meliputi kegiatan pemberian kredit, pengelolaan dana, pengembangan produk-produk baru perbankan serta pelayanan kepada nasabah dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif bagi kelangsungan usaha Perseroan. Menurut manajemen Perseroan, resiko-resiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan adalah sebagai berikut :

1. Resiko Kredit

Kredit yang diberikan kepada para nasabah merupakan aktiva terbesar yang dimiliki Perseroan sebagai suatu bank. Hal ini mempunyai implikasi bahwa perputaran pemberian kredit sangat tergantung pada kelancaran pengembalian kredit oleh nasabah atas pokok pinjaman dan beban bunga. Ketidaklancaran dalam pengembalian kredit dapat menimbulkan kredit bermasalah yang dapat menurunkan pendapatan dan kesehatan Perseroan.

2. Resiko Perekonomian

Kondisi perekonomian nasional maupun internasional mempunyai dampak langsung di seluruh sektor usaha, khususnya sektor perbankan. Perubahan kondisi perekonomian yang kurang menguntungkan seperti penurunan laju pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi kegiatan Perseroan baik dalam penghimpunan maupun penyaluran dana, yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat keuntungan Perseroan.

3. Resiko Persaingan

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat sejak deregulasi perbankan tahun 1988, yang diikuti dengan pertumbuhan lembaga keuangan lainnya serta era globalisasi yang membuka industri perbankan di Indonesia terhadap bank-bank asing menyebabkan semakin ketatnya persaingan di sektor usaha ini. Ketidakmampuan Perseroan dalam menempatkan posisi serta mempertahankan loyalitas nasabah akan mengurangi pangsa pasar Perseroan yang pada akhirnya dapat menurunkan kinerja Perseroan.

4. Resiko Kecukupan Penyisihan Penghapusbukuan Kredit

Bank Indonesia selaku Bank Sentral mensyaratkan seluruh bank di Indonesia untuk melakukan penyisihan penghapusbukuan kredit berdasarkan penilaian atas kredit yang diberikan dalam kategori kredit lancar dan kredit bermasalah. Kredit bermasalah selanjutnya diklasifikasikan dalam dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Alokasi penyisihan penghapusbukuan kredit yang tidak memenuhi ketentuan minimal Bank Indonesia dapat menurunkan penilaian atas kesehatan Perseroan.

5. Resiko Likuiditas

Ketidaksesuaian antara jangka waktu penghimpunan dana dari pihak ketiga yang pada umumnya lebih pendek daripada jangka waktu penyaluran kredit yang diberikan dapat menyebabkan masalah likuiditas yang akan mempengaruhi kemampuan Perseroan di dalam memenuhi kewajibannya kepada para nasabah. Hal ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.

6. Resiko Kecukupan Modal

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai Rasio Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio), setiap bank termasuk Perseroan diisyaratkan untuk mempertahankan Rasio Kecukupan Modal. Berdasarkan SK Dir no: 31/146/Kep/Dir tanggal 12 Nopember 1998, pemerintah mengharuskan bank-bank umum untuk mencapai rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum adalah sebesar 4%. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia PBI No. 3/21/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 mengharuskan bank-bank umum untuk mencapai rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sebesar

8%. Ketidakmampuan untuk memenuhi persyaratan tersebut akan mengakibatkan diturunkannya penilaian tingkat kesehatan yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Perseroan.

7. Resiko Operasional

Sistem operasional, teknologi, prosedur dan pengawasan dalam lingkungan Perseroan yang tidak mendukung dapat mengganggu kelancaran operasional sehingga akan mengurangi mutu pelayanan terhadap nasabah yang pada akhirnya akan menurunkan kinerja Perseroan.

8. Resiko Tingkat Bunga

Resiko tingkat bunga adalah resiko kemungkinan turunnya pendapatan bunga bersih dan nilai pasar portfolio aktiva akibat perubahan tingkat bunga di pasar uang. Komposisi portfolio termasuk instrumen aktiva, pasiva, dan rekening administratif yang sensitif terhadap tingkat bunga. Oleh karena aktiva dan pasiva seperti deposito pada bank lain, investasi dalam surat berharga, pinjaman, deposito berjangka, pinjaman jangka panjang dan kewajiban-kewajiban pasar uang lainnya, memiliki berbagai tingkat bunga dan jangka waktu, perubahan-perubahan pada tingkat bunga dapat mengakibatkan kenaikan atau penurunan pendapatan bunga bersih.

9. Resiko Kebijakan Pemerintah

Sebagai industri yang banyak menyangkut kepentingan umum, perbankan merupakan sektor yang banyak memperoleh pengawasan dan pengaturan dari Pemerintah. Kegagalan dalam mengantisipasi kebijakan Pemerintah dan otoritas moneter dapat menurunkan kegiatan dan kinerja Perseroan.

10. Resiko Teknologi

Resiko teknologi adalah resiko yang muncul seiring dengan semakin ketatnya persaingan antar bank dalam memberikan berbagai jenis pelayanan kepada nasabah, sehingga kelemahan dalam aspek teknologi dapat menurunkan kecepatan dan mutu pelayanan dan pada akhirnya mengakibatkan turunnya kemampuan bersaing Perseroan.

11. Resiko Industri Perbankan

Resiko pada industri Perbankan di Indonesia pada saat ini adalah akibat krisis ekonomi yang terjadi berkepanjangan. Dalam usahanya menahan laju krisis ini, Pemerintah menerapkan kebijakan uang ketat. Hal ini menyebabkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) meningkat sangat tajam sehingga industri perbankan mengalami margin bunga negatif. Pada saat yang bersamaan kegiatan usaha yang sudah melemah terpuak oleh tingginya suku bunga pinjaman yang meningkat sehingga pada akhirnya meningkatkan tingkat kredit bermasalah. Hal ini menyebabkan industri perbankan menderita kerugian yang besar yang mengakibatkan permodalan bank menjadi berkurang dan tingkat CAR berada di bawah batasan tingkat yang sehat yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia.

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan auditor independen pada tanggal 10 Januari 2003 berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta & Musiofa untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2002 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan tambahan paragraf penjelasan tentang dampak memburuknya kondisi perekonomian Indonesia terhadap Perseroan.

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan di Jakarta dengan nama PT Bank Victoria berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 71 tanggal 28 Oktober 1992 juncto Akta Perbetulan No. 30 tanggal 8 Juni 1993, Keduanya dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-4903.HT.01.01.Th.93 tanggal 19 Juni 1993, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 29 Juni 1993 di bawah No.342/Leg/1993 tanggal 29 Juni 1993, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 15 Mei 1998, Tambahan No. 2602.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 61 tanggal 28 Februari 2001, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Notaris Fathiah Helmi, SH No. 178/PT-GP/PRT/VII/2001 tanggal 3 Juli 2001 sebagaimana telah diterima pada tanggal 10 Juli 2001, serta didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan pada tanggal 28 Agustus 2001 yang menerangkan mengenai kepastian jumlah modal ditempatkan dan disetor setelah pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas I, yaitu sejumlah 634.000.000 (enam ratus tiga puluh empat juta) saham.

Perseroan memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 402/KMK.017/1994 tanggal 10 Agustus 1994 dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 5 Oktober 1994.

Di samping itu, Perseroan juga telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia dengan Surat Izin No. 29/126/UOPM tanggal 25 Maret 1997 sebagai pedagang valuta asing.

2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Perkembangan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sejak saat berdiri sampai dengan saat Penawaran Umum Terbatas I tahun 2000 telah disajikan dalam Prospektus dalam rangka Penawaran Umum Perdana, Penawaran Umum Obligasi Bank Victoria I tahun 2000, dan Penawaran Umum Terbatas I tahun 2000. Selanjutnya perkembangan struktur permodalan kepemilikan saham dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Terbatas I tahun 2000 sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut :

Tahun 2001

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 61 tanggal 28 Februari 2001, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Notaris Fathiah Helmi, SH No. 178/PT-GP/PRT/VII/2001 tanggal 3 Juli 2001 sebagaimana telah diterima pada tanggal 10 Juli 2001, serta didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan pada tanggal 28 Agustus 2001, diterangkan mengenai kepastian jumlah modal ditempatkan dan disetor setelah pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas I, yaitu sejumlah 634.000.000 (enam ratus tiga puluh empat juta) saham, sehingga struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp.)	Persentase (%)
Modal Dasar	2.136.000.000	213.600.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
PT Suryayudha Investindo Cipta	170.700.000	17.070.000.000	26,92
PT Nata Palindo	104.780.000	10.478.000.000	16,53
Masyarakat	358.520.000	35.852.000.000	56,55
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :	634.000.000	63.400.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	1.502.000.000	150.200.000.000	

Tahun 2002

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 30 November 2002 yang dibuat oleh PT Adimitra Transferindo selaku Biro Administrasi Efek adalah sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp.)	Persentase (%)
Modal Dasar	2.136.000.000	213.600.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
PT Suryayudha investindo Cipta	170.700.000	17.070.000.000	24,36
PT Nata Patindo	104.780.000	10.478.000.000	14,95
Masyarakat	425.313.360	42.531.336.000	60,69
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :	700.793.360	70.079.336.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	1.435.206.640	143.520.664.000	

3. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

a. PT Nata Patindo ("NP")

Riwayat Singkat

PT Nata Patindo didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 69 tanggal 22 Januari 1996 yang diubah dengan Akta Perubahan No. 16 tanggal 3 Juni 1996, keduanya dibuat di hadapan Esther Daniar Iskandar, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-1595.HT.01.01.TH.97 tanggal 7 Maret 1997 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan No. 1735/BH.09.03/X/97 tanggal 31 Oktober 1997 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 2 tanggal 6 Januari 1998 Tambahan No. 153.

Anggaran Dasar NP telah beberapa kali diubah. Berdasarkan Akta Benita Acara Rapat No.226 tanggal 23 Mei 1997 yang dibuat di hadapan Irawan Soerodjo, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-6140.HT.01.04.TH.97 tanggal 4 Juli 1997 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No.1735/BH.09.03/X/97 tanggal

31 Oktober 1997, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.2 tanggal 6 Januari 1998, Tambahan No.154, mengenai peningkatan modal dasar. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 35 tanggal 14 Mei 1998 yang dibuat di hadapan Irawan Soerodjo, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-13.287 HT.01.04 TH 98 tanggal 8 September 1998 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 3 tanggal 8 Januari 1999 Tambahan No. 212, Modal dasar NP telah ditingkatkan dari Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) menjadi Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), dan Modal ditempatkan dan disetor ditingkatkan dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) menjadi Rp 6.250.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Kemudian berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 99 tanggal 28 Juli 1998 yang dibuat di hadapan Irawan Soerodjo, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-13.287 HT.01.04.TH.98 tanggal 8 September 1998 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 3 tanggal 8 Januari 1999 Tambahan No. 212, Modal ditempatkan dan disetor NP ditingkatkan menjadi Rp 11.250.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Akta Perseroan Terbatas no.69 tanggal 22 Januari 1996 juncto Akta Perubahan No. 16 tanggal 3 Juni 1996 yang keduanya dibuat di hadapan Esther Daniar Iskandar, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.2 tanggal 6 Januari 1998, Tambahan No.153, maksud dan tujuan NP adalah :

- Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan umum
- Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perindustrian
- Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pembangunan perumahan (*real estate*) dan kontraktor

Permodalan

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 6 tanggal 11 Februari 2003 dan Akta Jual Beli Saham No. 7 tanggal 11 Februari 2003, yang keduanya dibuat dihadapan Fenny Tjitra, SH, Notaris di Jakarta, pemegang saham NP adalah sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	25.000	25.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
1. Sukmawati	11.249	11.249.000.000	99,99
2. Liauw Indarto Halim	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.250	11.250.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	13.750	13.750.000.000	

Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 3 September 2001 yang dibuat di hadapan Laurensia Siti Nyoman, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Notaris yang bersangkutan No. 50/IX/K/2001 tanggal 3 September 2001, susunan Direksi dan Komisaris Natapatindo adalah sebagai berikut:

Direktur : Liauw Indarto Halim
 Komisaris : Ny. Sukmawati

b. PT Suryayudha Investindo Cipta ("SIC")

Riwayat Singkat

PT Suryayudha Investindo Cipta didirikan berdasarkan Akta No. 72 tanggal 14 April 1997 dibuat di hadapan Soekaimi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-5520.HT.01.01.TH.97 tanggal 26 Juni 1997, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 3 Juli 1997 di bawah No. 1054/BH.09.03/VII/97 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 12 September 1997 Tambahan No. 4060.

Terakhir Anggaran Dasar SIC diubah dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.121 tanggal 31 Juli 1998 yang dibuat di hadapan Irawan Soerodjo, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan No. C2-19.878.HT.01.04.TH.98 tanggal 14 Oktober 1998 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan pada tanggal 15 Januari 1999 No. 1054/BH.09.03/1/1999 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.18 tanggal 2 Maret 1999 Tambahan No. 1434, yang mengatur mengenai peningkatan modal dasar dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) menjadi Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan peningkatan Modal ditempatkan dan disetor dari Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) menjadi Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Maksud dan Tujuan

Sesuai Akta Perseroan Terbatas No. 72 tanggal 14 April 1997 dibuat di hadapan Soekaimi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.73 tanggal 12 September 1997, Tambahan No. 4060, maksud dan tujuan SIC adalah :

- Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan umum, industri, agrobisnis, pengadaan barang, jasa, transportasi, pembangunan, design interior, percetakan.

Permodalan

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 4 tanggal 11 Februari 2003 dan Akta Jual Beli Saham No. 5 tanggal 11 Februari 2003, yang keduanya dibuat dihadapan Fenny Tjitra, SH, Notaris di Jakarta, pemegang saham SIC adalah sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	20.000.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
1. Sukmawati	8.483.400	8.483.400.000	54,00
2. Benny Luhur	7.226.600	7.226.600.000	46,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.710.000	15.710.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	4.290.000	4.290.000.000	

Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 tanggal 3 September 2001 yang dibuat di hadapan Laurensia Siti Nyoman, S.H., selaku, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Notaris yang bersangkutan No. 49/IX/K/2001 tanggal 3 September 2001 sebagaimana telah diterima pada tanggal 24 Oktober 2001, susunan Direksi dan Komisaris Suryayudha adalah sebagai berikut :

Direktur : Liauw Indarto Halim
Komisaris : Ny. Sukmawati

4. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, Perseroan diurus oleh Direksi di bawah pengawasan Komisaris yang anggota-anggotanya dipilih dan diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. Kewajiban dan hak anggota Komisaris dan Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. 62 tanggal 28 Februari 2001, dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

Direktur Utama : Untung Woenardi
Direktur : Agus Antarksa Sidharta
Direktur Kepatuhan : Didit Wijayanto Wijaya

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. 95 tanggal 28 Juni 2002, dibuat oleh Agung Prihatin, SH, pengganti khusus dari Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia melalui Surat Pemberitahuan No. C-UM.02.01.1388 tanggal 20 Agustus 2002 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta dan diterima pada tanggal 20 Agustus 2002 susunan komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

Komisaris Utama (Komisaris Independen) : Sulistiawati
Komisaris : Harijanto Gunawan

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai anggota Komisaris dan Direksi Perseroan :

KOMISARIS

SULISTIAWATI, Komisaris Utama



Warga Negara Indonesia, lahir di Yogyakarta pada tanggal 24 Mei 1959. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi pada Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 1984. Memulai karir di Citibank NA, Jakarta dengan jabatan terakhir sebagai Vice President of Corporate Finance (1984 – 1992). Bekerja di PT Danareksa Finance, Jakarta menjabat sebagai Direktur (1992-1993); Chase Manhattan Bank, NA, Jakarta (1993-1996) sebagai Vice President Project Finance. Menjabat sebagai Direktur Utama di PT Duta Kirana Finance, Jakarta (1996-1998). Sebagai Assistant Project Manager pada Anlaufstellebeschaft, Zurich, Switzerland (1998-2000). Pada tahun 2000 diangkat sebagai Komisaris Perseroan.

HARIJANTO GUNAWAN, Komisaris



Warga Negara Indonesia, lahir di Surabaya pada tanggal 17 April 1961. Menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Magister Manajemen Universitas Tujuh Belas Agustus 1945, Surabaya pada tahun 1996 dan gelar Sarjana Arsitektur juga diperoleh dari Universitas Kristen Petra, Surabaya pada tahun 1986. Pernah bekerja di UK Petra, Surabaya (1988-1990) sebagai Kepala Bidang Registrasi Mahasiswa; PT Sinarindo Megantara, Surabaya (1990-1992) sebagai Manager Umum & Personalia; Bank Ekonomi Raharja, Jakarta (1992-1997) dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi General Affair kantor Pusat; pada tahun 1997-1998 menjabat sebagai Kepala Divisi Operasional pada Perseroan sebelum diangkat sebagai Komisaris Perseroan pada tahun 1998.

DIREKSI



UNTUNG WOENARDI, Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, lahir di Surabaya pada tanggal 27 April 1958. Menyelesaikan pendidikan pada Golden Gate University, USA dengan gelar Master of Business Administration in Banking pada tahun 1987 dan pada Ngee Ann College, Singapore pada tahun 1980. Pernah bekerja di Bank Surya Indonesia (1981-1988) dengan jabatan terakhir sebagai Direktur, serta Bank Ekonomi Raharja (1989-1997) sebagai Wakil Direktur Utama. Sejak tahun 1997 menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan.

AGUS ANTARIKSA SIDHARTA, Direktur



Warga Negara Indonesia, lahir di Surabaya pada tanggal 29 Agustus 1961. Menyelesaikan pendidikan S1 Ekonomi Manajemen di Universitas Tarumanagara, Jakarta pada tahun 1986. Memulai karir di Bank Dagang Nasional Indonesia di Jakarta sebagai analis kredit (1987-1990) dengan jabatan terakhir sebagai Senior Marketing, kemudian sebagai Kepala Divisi Kredit di Bank Tiara Asia Kantor Pusat di Jakarta (1991-1994). Beliau juga pernah bekerja di Bank Mayora Kantor Pusat di Jakarta dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi Kredit (1994-1995), serta Bank Ekonomi Raharja (1995-1997) dengan jabatan terakhir sebagai Pimpinan Cabang Kantor Pusat di Jakarta. Sejak tahun 1997 bergabung dengan Perseroan sebagai Kepala Divisi Corporate dan sejak tahun 1999 menjabat sebagai Direktur Perseroan.

DIDIT WIJAYANTO WIJAYA, Direktur Kepatuhan



Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tanggal 6 Maret 1965. Menyelesaikan pendidikan di Jakarta Institute of Management Studies dengan gelar Master of Business Administration pada tahun 1998 dan di Universitas Indonesia, Jakarta dengan gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 1990. Memulai karir di PT Metro Corp Indonesia di Jakarta sebagai Sales Manager (1983-1984), kemudian bekerja di Gunung Sewu Bearing Co. sebagai *Chief Accountant* (1984-1986). Beliau juga pernah bekerja sebagai *Private Tax Consultant* (1987-1988) dan bekerja di PT Northindo Utama dengan jabatan terakhir sebagai *Managing Director* (1988-1997). Karir di bank dimulai dengan bekerja di Bank Shinta sebagai *Head of Product Development and*

Promotion dan jabatan terakhir adalah sebagai kandidat Direktur (1997-2000). Sejak Juni tahun 2000 bergabung dengan Perseroan sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan.

Komite Audit terdiri dari:

Ketua Komite Audit : Sulistiawati
 Anggota : A. Julianto
 Anggota : Febriandy Chandra

5. SUMBER DAYA MANUSIA

Komposisi Karyawan

Seiring dengan perkembangan usaha Perseroan, sumber daya manusia yang ada terus mengalami peningkatan terutama pada kualitasnya. Sampai dengan tanggal 30 September 2002, jumlah karyawan Perseroan adalah 155 orang yang terbagi atas Karyawan Tetap yang berjumlah 63 Karyawan dan lainnya merupakan karyawan yang dikontrak perseroan dan pihak ketiga.

Perkembangan jumlah dan komposisi karyawan berdasarkan jenjang jabatan, jenjang pendidikan dan jenjang usia disajikan dalam tabel-tabel di bawah ini :

Komposisi karyawan menurut jenjang jabatan

Kategori	30-Sep		31 Desember							
	2002		2001		2000		1999		1998	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Direksi	3	1,9%	3	2,3%	3	4,8%	3	7,0%	2	4,3%
Manajer	22	14,2%	15	11,4%	14	22,6%	10	23,3%	16	34,0%
Pelaksana	130	83,9%	114	86,4%	45	72,6%	30	89,8%	29	61,7%
Jumlah	155	100,0%	132	100,0%	62	100,0%	43	100,0%	47	100,0%

Komposisi karyawan menurut jenjang pendidikan

Kategori	30-Sep		31 Desember							
	2002		2001		2000		1999		1998	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pasca Sarjana (S2)	2	1,3%	2	1,5%	2	3,2%	1	2,3%	2	4,3%
Sarjana (S1)	43	27,7%	40	30,3%	17	27,4%	14	32,6%	17	36,2%
Sarjana Muda (D3)	40	25,8%	27	20,5%	22	35,5%	13	30,2%	11	23,4%
Non Sarjana	70	45,2%	63	47,7%	21	33,9%	15	34,9%	17	36,2%
Jumlah	155	100,0%	132	100,0%	62	100,0%	43	100,0%	47	100,0%

Komposisi karyawan menurut jenjang usia

Kategori	30-Sep				31 Desember					
	2002		2001		2000		1999		1998	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
21 - 30	79	51,0%	72	54,5%	28	45,2%	23	53,5%	23	48,9%
31 - 40	62	40,0%	53	40,2%	28	45,2%	15	34,9%	18	38,3%
41 - 50	13	8,4%	6	4,5%	5	8,1%	4	9,3%	4	8,5%
51 - 60	1	0,6%	1	0,8%	1	1,6%	1	2,3%	2	4,3%
Jumlah	155	100,0%	132	100,0%	62	100,0%	43	100,0%	47	100,0%

Calatan :

Sampai dengan tanggal 30 September 2002, sejumlah 92 karyawan Perseroan merupakan karyawan yang dikontrak oleh Perseroan dan pihak ketiga. Sampai dengan saat ini, Perseroan tidak mempekerjakan tenaga asing.

6. PROGRAM PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN

Menyadari pentingnya sumber daya manusia sebagai mitra usaha Perseroan, manajemen Perseroan menjadikan pengembangan sumber daya manusia sebagai salah satu fokus utama aktivitas Perseroan di dalam pencapaian tujuan perusahaan. Untuk itu, Perseroan aktif mengikutsertakan karyawannya untuk ambil bagian dalam berbagai program pendidikan dan pelatihan, yang secara garis besar dapat dikategorikan dalam dua kelompok :

a. Pelatihan yang diadakan di dalam lingkungan Perseroan (*in-house training*)

- *In-house training* untuk calon karyawan
Calon karyawan dari berbagai lulusan perguruan tinggi dari berbagai disiplin ilmu dididik oleh instruktur intern dari Perseroan
- *In-house training* untuk karyawan
Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia diadakan *in-house training* dengan memanfaatkan instruktur intern maupun dengan mengundang instruktur dari lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan. Pelatihan-pelatihan yang diadakan antara lain : Pelatihan *Customer Service*, *Know Your Customer*, Pelatihan Pendeteksian uang palsu kepada karyawan

b. Pelatihan yang diadakan di luar lingkungan Perseroan

Perseroan juga menyelenggarakan pelatihan di luar lingkungan Perseroan yang disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan antara lain pendidikan dan pelatihan oleh Perbanas, Institut Bankir Indonesia, IPPM dan lain-lain.

Dalam usaha meningkatkan kesejahteraan karyawan, Perseroan memberikan berbagai fasilitas seperti Tunjangan Hari Raya, Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), upah karyawan di atas upah minimum regional dan pemberian jaminan kesehatan dalam bentuk penggantian biaya pengobatan dan perawatan rumah sakit sampai dengan batas tertentu. Fasilitas-fasilitas tersebut diberikan kepada seluruh karyawan Perseroan yang telah berstatus karyawan tetap.

Koperasi Karyawan Victoria

Pada tanggal 25 Agustus 1998 Perseroan mendirikan Koperasi Karyawan PT Bank Victoria International (disingkat Kopkar Victoria), berkedudukan di gedung Bank Panin Senayan lantai dasar, Jl. Jend. Sudirman No. 1, Senayan, Jakarta Pusat, yang mana Akta Pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah pada tanggal 21 September 1998 dengan nomor 025/BH/KDK.9.1/IX/1998.

Kopkar Victoria menyelenggarakan usaha:

1. Menyediakan barang-barang kebutuhan primer dan sekunder bagi anggota dan masyarakat.
2. Menyediakan jasa alat tulis kantor, jasa boga, jasa antar jemput anggota.

Susunan pengurus Koperasi Karyawan Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Rapat pengurus tanggal 15 Juli 2000 mengenai Pergantian Pengurus Koperasi Karyawan Perseroan yang efektif sejak tanggal 1 Mei 2000 adalah sebagai berikut:

Ketua satu	:	Endah Imawati Budiman
Ketua dua	:	Agus Antanksa Sidharta
Bendahara	:	Sari Idayanti
Sekretaris	:	Entin Farida

Dana Pensiun Victoria ("DPV")

Riwayat Singkat

Dana Pensiun Victoria berkedudukan di Jakarta ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Victoria International Tbk Nomor 104/DIR-VICT/XI/99 tanggal 29 Nopember 1999 tentang Peraluran Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Victoria, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor KEP-074/KM.17/2000 tanggal 17 Pebruari 2000 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Victoria dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 27 tanggal 3 April 2000 Tambahan Nomor 27.

Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan Peraturan DPV, maksud dibentuknya DPV adalah untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti serta meningkatkan kesejahteraan hidup karyawan yang menjadi peserta dan pihak yang berhak.

Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Victoria International Tbk Nomor 105/DIR-VICT/XI/99 tanggal 29 November 1999 tentang Penunjukan Dewan Pengawas Dana Pensiun Victoria (DPV) serta Surat Keputusan Direksi PT Bank Victoria International Tbk Nomor 002/KEP-DIR/VICT/IV/00 tanggal 10 April 2000 tentang Penunjukan Pengurus Dana Pensiun Victoria (DPV), maka susunan Dewan Pengawas dan Pengurus DPV adalah sebagai berikut :

Dewan Pengawas

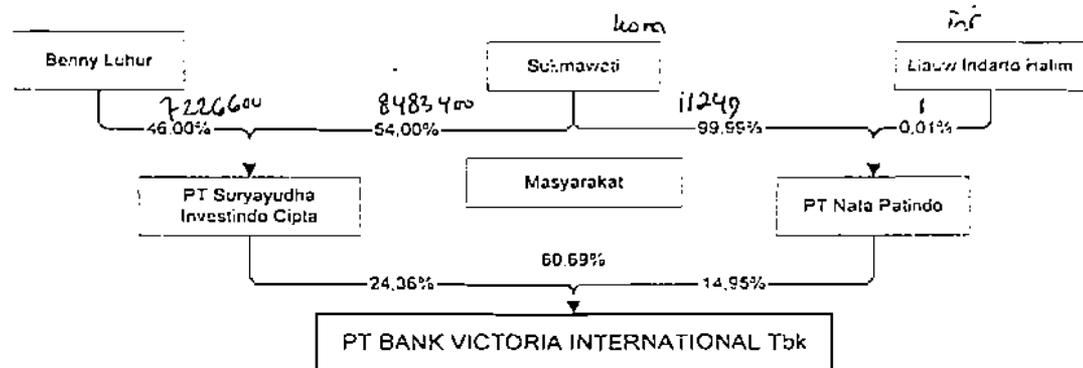
Ketua : Ahmad Hidayat
 Wakil Ketua I : Untung Woenardi
 Wakil Ketua II : Harijanto Gunawan
 Anggota : Agus Antariksa Sidharta
 Andoko Setyo Wicaksono
 Faltojo

Penqurus

Ketua : Djulianto
 Wakil Ketua : Drs. Djoko Muljono K
 Sekretaris : Novita Indriyani
 Bendahara : Cinlin Susanto
 Anggota : Ferly Adhi

7. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Hubungan Kepemilikan



Hubungan Pengurusan dan Pengawasan

Nama	Perseroan	NP	SIC
Sukmawati		Kom	Kom
Liauw Indarto Halim		Dir	Dir
Sulisliawali	Komut / Komin		
Harijanto Gunawan	Kom		
Untung Woenardi	Dirut		
Agus Antariksa Sidharta	Dir		
Didit Wijayanto Wijaya	Dir.Kep		

Keterangan :

Komut : Komisaris Utama
 Komin : Komisiaris Independen
 Kom : Komisaris
 NP : PT Nata Patindo
 Dirut : Direktur Utama
 Dir : Direktur
 Dir.Kep : Direktur Kepatuhan
 SIC : PT Suryayudha Investindo Cipta

8. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan mempunyai hubungan usaha dengan pihak-pihak terafiliasi, yaitu pihak yang mempunyai hubungan secara langsung atau tidak langsung, mengendalikan, dikendalikan atau di bawah satu pengendalian dan mempunyai hubungan sebagai pemegang saham utama dari Perseroan.

Transaksi-transaksi Perseroan dengan para pihak terafiliasi dapat dirinci sebagai berikut :

Jenis Transaksi	(dalam ribuan rupiah)		
	30 September 2002	31 Desember 2001	31 Desember 2000
Giro Pada bank lain	-	-	660.011
Efek-efek	-	-	115.000.000
Kredit	1.976.898	2.628.146	617.677
Penyertaan Saham	10.218.963	10.038.408	10.000.000
Jumlah	12.195.861	12.666.554	126.277.688

Seluruh syarat-syarat dan kondisi yang berlaku dalam transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa tersebut diatas adalah normal dan sama dengan seperti halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.

Perseroan tidak memiliki transaksi diluar usaha pokok Perseroan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.

VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. Umum

Perseroan memperoleh izin operasi sebagai bank umum berdasarkan izin operasi dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 402/KMK.017/1994 tanggal 10 Agustus 1994. Di samping itu, Perseroan juga memperoleh izin usaha sebagai pedagang valuta asing dari Bank Indonesia dengan Surat Izin No. 029/126/UOPM tanggal 25 Maret 1997.

Dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat dalam industri perbankan, penyusunan strategi pemasaran yang tepat sangat penting dalam menentukan keberhasilan bank tersebut. Perseroan memfokuskan usaha pemasarannya pada perusahaan skala menengah ke bawah yang memiliki potensi ekonomi yang sangat besar.

Pada pokoknya usaha pemasaran Perseroan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mentargetkan nasabah-nasabah dalam sektor industri tertentu yang diperkirakan mempunyai prospek usaha yang bagus.
2. Memfokuskan pada perusahaan-perusahaan potensial skala menengah ke bawah.
3. Menciptakan produk-produk yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan nasabah.
4. Ekspansi/pembukaan cabang-cabang di dalam dan luar kota yang strategis dan potensial dalam sektor industri dan perdagangan.

2. Kegiatan Usaha

Perseroan memulai kegiatan operasi perbankan sebagai bank umum sejak tanggal 5 Oktober 1994, dengan melakukan kegiatan usaha sebagai penghimpun dana masyarakat yang kemudian disalurkan dalam bentuk pemberian kredit kepada perseorangan maupun perusahaan. Selain itu Perseroan juga melaksanakan transaksi antar bank serta kegiatan-kegiatan investasi melalui penempatan pada instrumen-instrumen yang aman dan menguntungkan.

Jaringan Cabang

Sampai dengan tahun 2002, Bank Victoria telah mempunyai satu kantor pusat dan 18 (delapan belas) kantor operasional yang tersebar di wilayah Jakarta dan Tangerang, 9 (sembilan) diantaranya terletak di Kantor Unit Pelayanan PLN. Kantor-kantor operasional yang dimiliki oleh perseroan di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Lokasi	Status Operasional	Status Kepemilikan	Periode Sewa
KPO / KPNO Jakarta-Gedung Panin Senayan	Kantor Pusat	Sewa	01-10-02 s/d 30-09-03
Jakarta - Graha BIP	Kantor Cabang Pembantu	Sewa	01-08-01 s/d 31-07-04
Jakarta - Kebon Jeruk	Kantor Cabang Pembantu	Kerjasama	10-07-02 s/d 10-07-04
Jakarta - Rawamangun	Kantor Cabang Pembantu	Kerjasama	28-08-02 s/d 27-03-04
Jakarta - Ciracas	Kantor Cabang Pembantu	Kerjasama	25-09-02 s/d 24-09-04
Jakarta - Gedung Aricbimo	Kantor Cabang Pembantu	Sewa	01-11-02 s/d 31-10-04
Jakarta - PBM Kemayoran	Kantor Kas	Sewa	22-03-02 s/d 21-03-05
Jakarta - Duren Tiga	Kantor Cabang Pembantu	Kerjasama	25-09-02 s/d 24-09-04
Jakarta - Kemang Utara	Kantor Cabang Pembantu	Kerjasama	01-04-02 s/d 31-08-03
Jakarta - Bulungan	Kantor Cabang Pembantu	Kerjasama	02-01-02 s/d 31-12-03
Jakarta - Muara Karang	Kantor Cabang Pembantu	Milik Sendiri	.
Jakarta - Meruya	Kantor Kas	Sewa	05-07-02 s/d 05-07-07
Jakarta - Barito	Kantor Cabang Pembantu	Sewa	01-08-02 s/d 31-07-07
Jakarta - Puri Indah	Kantor Cabang Pembantu	Sewa	01-08-02 s/d 31-07-03
Jakarta - Slipi	Kantor Cabang Pembantu	Sewa	02-12-02 s/d 01-12-04
Jakarta - Taman Palem	Kantor Cabang Pembantu	Milik Sendiri	-
Tangerang - Pamulang	Payment Point	Kerjasama	02-10-00 s/d 01-10-03
Tangerang - Ciputat	Kantor Cabang Pembantu	Kerjasama	25-09-00 s/d 24-09-03
Tangerang - Bintaro	Kantor Kas	Kerjasama	01-05-01 s/d 01-05-03

Di bawah ini akan diinci lebih jauh mengenai kegiatan usaha utama Perseroan selaku bank yang terdiri dari penghimpunan dana, penempatan dana serta pendapatan imbal jasa (*fee based income*).

Penghimpunan Dana

Kegiatan operasional perbankan Perseroan selain didanai dari modal sendiri dan laba ditahan, juga diperoleh terutama dari penghimpunan dana masyarakat melalui giro, tabungan dan deposito berjangka.

Dalam menghimpun dana masyarakat, Perseroan menawarkan beberapa produk seperti:

1. **Rekening Giro**
Bentuk simpanan dana pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek dan bilyet giro dengan jasa giro yang menarik.
2. **Tabungan Victoria**
Bentuk simpanan dana pihak ketiga dengan bunga harian yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas buka.
3. **Tabungan V-Pro**
Bentuk simpanan dana pihak ketiga (dikhususkan untuk para profesional) dengan bunga harian yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas buka.
4. **Tabungan V-Junior**
Bentuk simpanan dana pihak ketiga (dikhususkan untuk anak dan remaja) dengan bunga harian yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas buka.
5. **Taska Victoria (Tabungan Kesejahteraan Keluarga)**
Bentuk simpanan dana pihak ketiga dengan bunga menarik dari saldo terendah.
6. **Deposito Berjangka**
Simpanan berjangka dengan jangka waktu 1,3,6 dan 12 bulan dengan bunga yang bersaing.
7. **Sertifikat Deposito (Negotiable Certificate of Deposit/VNCD)**
Selain bunga yang menarik, bunga dari deposito langsung dibayar di muka. Deposito ini bersifat atas unjuk dan dapat diperdagangkan.
8. **V-Link**
Investasi dalam bentuk surat berharga pemerintah dengan bunga menarik dan dapat dijadikan jaminan kredit. Investasi ini berjangka waktu 1, 3, dan 6 bulan dan dapat dicairkan kapan saja. Resiko investasi yang aman karena dijamin oleh pemerintah.
9. **Deposit On Call**
Simpanan dana pihak ketiga dalam jangka pendek (di bawah 1 bulan) dengan bunga yang menarik.

Pada saat ini aktivitas di bidang penghimpunan dana ditekankan pada simpanan deposito berjangka. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan *basis core deposit* agar Perseroan dapat terus berkembang dengan sehat.

Perkembangan perhimpunan dana Perseroan sejak tahun 1999 adalah sebagai berikut :

Perkembangan Penghimpunan Dana

(dalam jutaan Rupiah)

Jenis	30 September	31 Desember		
	2002	2001	2000	1999
Giro	72.721	19.702	127.442	32.195
Tabungan	34.766	24.923	16.477	14.878
Deposito	678.720	555.044	695.936	235.221
Sertifikat Deposito	21.584	73.972	73.903	32.210
Simpanan V-Link	293.757	330.281	-	-
Jumlah	1.101.548	1.003.922	913.758	314.504

**Perkembangan Penghimpunan Dana
Berdasarkan Jangka Waktu**

Tabungan

(dalam jutaan Rupiah)

Jenis	30 September	31 Desember		
	2002	2001	2000	1999
Tabungan Victoria	7.708	24.780	16.283	14.593
Tabungan Taska	102	143	194	285
Tabungan V-Pro	26.834	-	-	-
Tabungan V-Junior	121	-	-	-
Jumlah	34.766	24.923	16.477	14.878

Deposito Berjangka

(dalam jutaan Rupiah)

Jenis	30 September	31 Desember		
	2002	2001	2000	1999
On call	-	-	-	41.799
1 bulan	399.797	491.653	538.957	159.363
3 bulan	212.518	32.029	137.982	4.559
6 bulan	3.641	3.231	12.797	29.400
12 bulan	62.765	28.130	6.200	100
Jumlah	678.720	555.043	695.936	235.221

Sertifikat Deposito

(dalam jutaan Rupiah)

Jenis	30 September	31 Desember		
	2002	2001	2000	1999
1 bulan	4.000	36.000	4.000	16.700
3 bulan	6.500	22.500	65.500	16.000
6 bulan	11.307	16.807	5.500	-
Bunga dibayar dimuka	(223)	(1.335)	(1.097)	(490)
Jumlah	21.584	73.972	73.903	32.210

Simpanan V-Link

Jenis	(dalam jutaan Rupiah)			
	30 September	31 Desember		
	2002	2001	2000	1999
On Call	180.162	6.000	-	-
1 bulan	84.803	296.766	-	-
3 bulan	28.792	26.265	-	-
6 bulan		1.250	-	-
Jumlah	293.757	330.281	-	-

Penempatan Dana

Dalam menempatkan dananya, Perseroan menyalurkan kredit ke sektor-sektor yang dianggap mempunyai prospek yang baik. Kredit diberikan melalui suatu proses studi kelayakan yang selektif dengan cara melakukan penelitian secermat mungkin sebelum dibawa ke komite kredit.

Jenis-jenis fasilitas kredit yang ditawarkan Perseroan :

1. Kredit Modal Kerja
2. Kredit Investasi
3. Kredit Usaha Kecil (KUK)
4. Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
5. Kredit Kendaraan Bermotor
6. Kredit Profesi (dokter, pengacara, notaris)
7. Bank garansi

Berikut ini disajikan tabel yang merinci perkembangan penempatan dan penyaluran dana dalam aktiva produktif Perseroan mulai tahun 1999 sampai dengan 30 September 2002 :

Perkembangan Aktiva Produktif

Jenis	(dalam jutaan Rupiah)			
	30 September	31 Desember		
	2002	2001	2000	1999
Giro pada Bank lain – bersih *)	316	25	659	146
Penempatan pada Bank lain – bersih	247.488	9.900	173.469	330.706
Surat Berharga-bersih	741.638	1.060.174	666.686	24.816
Surat berharga yang dibeli dengan janji akan dijual kembali	-	27.256	-	-
Kredit yang Diberikan – bersih	455.218	198.046	160.387	61.462
Penyertaan saham	10.117	9.938	9.912	3.727
Jumlah	1.454.777	1.305.339	1.011.113	420.857

Aktiva produktif Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2002 adalah sebesar Rp 1,46 trilyun. Jumlah penempatan dana pada bank lain-bersih untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2002 adalah sebesar Rp 247,488 miliar sedangkan Surat-Surat Berharga-bersih adalah sebesar Rp 741,64 miliar.

Sedangkan jumlah kredit yang diberikan oleh Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2002 meningkat menjadi sebesar Rp 455,22 miliar dikarenakan Perseroan mulai memberikan kredit baru.

Perkembangan Penyaluran Kredit berdasarkan Sektor Usaha

(dalam jutaan Rupiah)

Sektor Usaha	30 September	31 Desember		
	2002	2001	2000	1999
Lembaga Pembiayaan	41.790	29.834	15.000	-
Real Estat	2.658	-	10.000	-
Distribusi	144.784	75.647	83.216	35.946
Industri	75.866	51.930	9.184	7.389
Jasa Pengangkutan	-	-	-	-
Kontraktor	9.056	9.009	9.797	-
Lain-lain	197.571	35.445	35.669	21.508
Jumlah Kredit	471.725	201.865	162.866	64.843
<i>Dikurangi,</i>				
Pinjaman Endorsemen				-
Penyisihan Penghapusan	(16.507)	(3.819)	(2.479)	(3.381)
Jumlah kredit - bersih	455.218	198.046	160.387	61.462

Perkembangan Penyaluran Kredit berdasarkan Jangka Waktu

(dalam jutaan Rupiah)

Jangka Waktu	30 September	31 Desember		
	2002	2001	2000	1999
Kurang dari 1 Tahun	119.078	86.857	57.262	45.214
1-2 Tahun	113.650	75.201	83.443	3.000
2 - 5 Tahun	193.703	23.099	10.587	11.994
Lebih dari 5 Tahun	45.293	16.708	11.574	4.635
Jumlah Kredit	471.725	201.865	162.866	64.843
<i>Dikurangi,</i>				
Pinjaman Endorsemen				-
Penyisihan Penghapusan	(16.507)	(3.819)	(2.479)	(3.381)
Jumlah kredit - bersih	455.218	198.046	160.387	61.462

Perkembangan Penyaluran Kredit berdasarkan Jenis Kredit

(dalam jutaan Rupiah)

Jenis Kredit	30 September	31 Desember		
	2002	2001	2000	1999
Pinjaman Tetap	198.231	135.046	137.506	47.194
Pinjaman Rekening Koran	47.552	38.256	11.481	6.061
Pinjaman Konsumsi	169.207	13.069	13.321	10.988
Pinjaman Tetap dengan angsuran	55.992	15.000	-	-
Pinjaman Karyawan	742	495	558	600
Jumlah Kredit	471.725	201.866	162.866	64.843
<i>Dikurangi,</i>				
Pinjaman Endorsemen				-
Penyisihan Penghapusan	(16.507)	(3.819)	(2.479)	(3.381)
Jumlah kredit - bersih	455.218	198.046	160.387	61.462

Pendapatan Imbal Jasa (Fee Based Income)

Dengan kecenderungan tingkat persaingan yang semakin ketat, maka selisih antara pendapatan bunga dan beban bunga akan semakin kecil. Dalam menghadapi keadaan ini, Perseroan berusaha meningkatkan kegiatan-kegiatan lain yang menghasilkan pendapatan non bunga (*fee based income*), yaitu dengan jalan mengembangkan kegiatan-kegiatan melalui jasa-jasa perbankan seperti transfer, inkaso, kliring, *payroll*, *standing order (standing instruction)*, referensi dan bank garansi.

3. Pemasaran

Ketatnya persaingan yang dihadapi sektor perbankan semakin hari semakin terasa, hal inilah yang mendorong Perseroan untuk menciptakan strategi pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan daya saingnya.

Saat ini kendala di bidang pemasaran adalah belum berkembangnya jumlah jaringan cabang. Untuk mengatasi kendala tersebut Perseroan telah merencanakan untuk mengembangkan beberapa jaringan kantor cabang di lokasi yang potensial dan strategis di seluruh Indonesia agar lebih dekat dengan target pasar.

Perseroan memiliki fokus usaha pada bisnis ritel (*Retail Banking*) dan bisnis korporasi kelas menengah (*corporate banking*) mengingat besarnya jumlah populasi di Indonesia dan taraf hidup masyarakat yang akan terus membaik. Dengan pulihnya perekonomian dimasa yang akan datang maka Perseroan akan memperluas penyaluran kredit kepada nasabah-nasabah baru.

Bagi Perseroan, nasabah adalah faktor terpenting dalam menunjang keberhasilan usaha. Oleh karena itu Perseroan berusaha untuk lebih meningkatkan jasa perbankan dengan memberikan pelayanan yang prima dan berkualitas serta menciptakan berbagai produk dan jasa pelayanan perbankan yang lebih maju seperti kartu kredit dan ATM sehingga Perseroan dapat lebih meningkatkan daya saingnya terhadap bank-bank lain.

4. Pengendalian Kegiatan Usaha

ALCO (*Asset Liabilities Committee*) adalah sebuah komite yang dimiliki oleh Perseroan yang mempunyai tugas untuk mengevaluasi posisi aset dan kewajiban Perseroan serta menjaga keselarasan posisi dana dan kredit Perseroan. Komite ini mempunyai anggota antara lain Direksi, Kepala Divisi, dan Pemimpin Cabang yang bertanggung jawab terhadap keseimbangan posisi aset dan kewajiban Perseroan sebagai antisipasi terhadap kondisi perekonomian.

Perseroan secara periodik menyelenggarakan *budget meeting* untuk mengetahui kinerja Perseroan sebulan terakhir dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Pada setiap akhir tahun anggaran diadakan Rapat Kerja yang melibatkan seluruh jajaran manajemen Perseroan. Rapat kerja tersebut bertujuan untuk mengetahui posisi Perseroan pada tahun sebelumnya serta rencana kerja tahun berikutnya melalui pembahasan secara bersama-sama antara manajemen Kantor Pusat dengan seluruh cabangnya. Dari Rapat Kerja ini diharapkan terbentuk kerangka strategi dan langkah kerja yang konkrit, implementatif dan akan memperoleh komitmen dari semua tingkatan manajemen untuk digunakan sebagai pedoman kerja.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999, tugas dan tanggung jawab SKAI adalah membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak langsung, serta memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen. Disamping itu SKAI harus mampu mengidentifikasi segala kemungkinan

untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana serta meningkatkan kegiatan yang ada di Perseroan.

5. Tingkat Kesehatan Bank

Bank Indonesia menyampaikan Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum melalui Surat Edaran Bank Indonesia No. 30/23/UPPB tanggal 19 Maret 1998 yang mengubah Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/11/Kep/Dir tanggal 30 April 1997. Perhitungan tingkat kesehatan Bank ini diadopsi dengan beberapa modifikasi dari ketentuan *Bank for International Settlements* (BIS). Perhitungan tingkat kesehatan ini mempertimbangkan aspek-aspek Modal (*Capital*), kualitas Aktiva Produktif (*Asset*), Manajemen (*Management*), Rentabilitas (*Earnings*) dan Likuiditas (*Liquidity*).

Rasio Kecukupan Modal (CAR)

Berdasarkan SK Dir no. 31/146/Kep/Dir tanggal 12 Nopember 1998, pemerintah mengharuskan bank-bank umum untuk mencapai rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum adalah sebesar 4%. Pada tanggal 13 Desember 2001, berdasarkan Ketentuan Bank Indonesia PBI No:3/21/PBI/2001, saat ini mengharuskan bank-bank umum untuk mencapai rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum adalah sebesar 8%.

Dalam mengikuti petunjuk tersebut di atas maka Perseroan telah dapat memenuhi kewajiban rasio kecukupan modal (CAR) yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia selama ini. Oleh karena itu Perseroan merupakan bank yang sehat dengan rasio CAR yang telah melebihi ketentuan Bank Indonesia.

Posisi CAR Perseroan pada tanggal 30 September 2002, 31 Desember 2001, 2000, dan 1999 berturut-turut adalah sebesar 8,91%; 15,31%; 18,76%; dan 34,44%

Tabel berikut menunjukkan modal dan rasio kecukupan modal Bank Victoria pada tanggal 30 September 2002, 31 Desember 2001, 2000, dan 1999 :

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	30 September 2002	31 Desember		
		2001	2000	1999
Modal Inti (Tier I) :				
Modal disetor	69.829	63.400	63.400	53.400
Agio	139	(1.292)	(1.292)	-
Modal sumbangan	-	-	-	-
Cadangan umum	-	-	-	-
Laba bersih tahun sebelumnya	5.067	759	3.057	259
Laba (rugi) bersih tahun berjalan (50%)	1.126	2.488	-	2.088
Laba (rugi) bersih tahun berjalan (100%)	-	-	4.042	-
Subtotal	76.162	65.355	69.207	55.747
Modal Pelengkap (Tier II) :				
Selisih revaluasi aktiva tetap	-	-	-	-
Penyisihan atas kemungkinan kerugian pada aktiva produktif	10.758	4.917	4.228	2.100
Modal pinjaman	-	-	-	-
Pinjaman subordinasi (maksimum 50% Tier I)	-	-	-	-
Subtotal	10.758	4.917	4.228	2.100

Total Modal Inti & Modal Pelengkap	86.920	70.272	73.435	57.847
Penyertaan	(10.219)	(10.038)	(10.000)	-
Total Modal	76.701	60.233	63.435	57.847
Jumlah ATMR	860.609	393.338	338.220	167.972
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	8.91 %	15.31 %	18.76 %	34.44 %
Persentase Modal Inti	99.30 %	108.50 %	109.10 %	96.37 %

Kualitas Aktiva Produktif

Dalam hal pemberian kredit, Perseroan mendasarkan pada prinsip kehati-hatian yaitu dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Sebagai bank yang berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian tersebut Perseroan selalu selektif dalam pemberian pinjaman. Untuk itu Perseroan selalu memelihara kualitas aktiva produktif (KAP) yang telah diterapkan. Hal ini dapat dilihat dari komposisi kredit menurut kolektibilitas dan persentase penyisihan penghapusan terhadap total kredit yang diberikan seperti tersaji pada tabel berikut:

Komposisi Kredit Berdasarkan Kolektibilitas

(dalam jutaan Rupiah)

Kolektibilitas	30 September		31 Desember					
	2002		2001		2000		1999	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Lancar	380.913	80,75	189.191	93,72	137.752	84,58	48.261	74,43
Dalam Perhatian Khusus	69.043	14,64	10.339	5,12	21.653	13,29	6.277	9,68
Kurang Lancar	18.223	3,96	208	0,10	260	0,16	7.932	12,23
Diragukan	1.132	0,24	1.495	0,74	2.827	1,74	-	0,00
Macet	2.413	0,51	632	0,31	374	0,23	2.372	3,66
Jumlah Kredit	471.725	100,00	201.865	100,00	162.866	100,00	64.843	100,00
Penyisihan Penghapusan	(16.507)		(3.819)		(2.479)		(3.381)	
Jumlah	455.218		198.046		160.387		61.462	

Memburuknya kondisi perekonomian merupakan penyebab utama meningkatnya jumlah kredit bermasalah sekaligus memperburuk kualitas kredit yang diberikan kepada nasabah. Kriteria-kriteria yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam mengklasifikasikan kredit juga telah diubah dan diperbaharui sejak bulan Maret 1998. Hal ini telah menyebabkan penurunan atas penilaian kredit Perseroan.

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (termasuk Kredit)

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar prosentase tertentu dari nominal berdasarkan penggolongan Kredit atau Kualitas Aktiva Produktif sebagaimana diatur dalam peraturan Bank Indonesia. Tujuan pembentukan PPAP untuk mengurangi risiko kerugian akibat kegagalan kredit yang diberikan. Dana yang diambil untuk pembentukan PPAP diambil dari laba dan modal bank. Maka semakin besar Kredit atau Aktiva Produktif yang bermasalah, semakin besar Kredit atau Aktiva Produktif yang bermasalah, semakin besar pula laba dan modal bank yang dikurangi sehingga hal ini mempengaruhi tingkat kesehatan bank. Untuk mengurangi risiko

tersebut, kredit sebaiknya dijamin oleh agunan-agunan yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang pembentukan PPAP. Perseroan telah membentuk PPAP sesuai dengan peraturan Bank Indonesia.

Pembentukan PPAP menurut Peraturan BI adalah sesuai dengan tabel di bawah ini:

Periode Laporan	Cadangan Umum Lancar	Cadangan Khusus			
		Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
31-12-1998 s/d 31-05-1999	0,25 %	1,25 %	3,75 %	50,00 %	100 %
30-06-1999 s/d 30-11-1999	0,50 %	1,875 %	5,50 %	50,00 %	100 %
31-12-1999 s/d 31-05-2000	0,625 %	2,50 %	7,50 %	50,00 %	100 %
30-06-2000 s/d 30-11-2000	0,75 %	3,00 %	10,00 %	50,00 %	100 %
31-12-2000 s/d 31-05-2001	0,875 %	4,00 %	12,50 %	50,00 %	100 %
30-06-2001 dan seterusnya	1,00 %	5,00 %	15,00 %	50,00 %	100 %

Tabel berikut ini memperlihatkan rincian penyisihan penghapusan kredit Perseroan

(Dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	30 September 2002	31 Desember				
		2001	2000	1999	1998	1997
Penyisihan penghapusan kredit pada awal periode	3.819	2.479	3.381	3.641	1.830	710
Penghapusan kredit selama periode berjalan	-	-	(150)	(116)	(17.366)	(1.453)
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapus	82	92	124	1.161	1.416	-
Penghapusan bersih	-	-	-	-	-	-
Penyisihan selama periode berjalan	12.606	1.247	(876)	(1.305)	17.780	2.576
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	-	-	-	-	-	-
Penyisihan penghapusan kredit pada akhir periode	15.507	3.819	2.479	3.381	3.641	1.830
Rasio penyisihan penghapusan kredit dalam periode tertentu terhadap jumlah rata-rata kredit						

Posisi Devisa Netto (PDN)

Perseroan sampai dengan saat ini masih beroperasi dengan status Bank Non Devisa sehingga tidak memiliki Posisi Devisa Netto (PDN).

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Sesuai dengan surat keputusan No. 31/16/UPPB tanggal 31 Desember 1998, BI melakukan pembatasan atas persentase kredit bank yang dapat disalurkan kepada debitur atau grup debitur yang terkait (afiliasi) maupun tidak terkait (non-afiliasi) terhadap modal bank. Bank tidak boleh menyalurkan kredit kepada pihak afiliasi maupun non-afiliasi melebihi persentase modal bank, yaitu sebesar 10%, untuk afiliasi, sedangkan untuk non-afiliasi adalah sebagai berikut:

- 30% dari modal sejak berlakunya surat keputusan tersebut sampai dengan 31 Desember 2001
- 25% dari modal untuk tahun 2002
- 20% dari modal sejak tanggal 1 Januari 2003

Untuk periode yang berakhir tanggal 30 September 2002, Perseroan dalam menyalurkan kredit pada debitur atau grup debitur telah memenuhi peraturan mengenai BMPK yang telah ditentukan oleh Bank

Indonesia. Besarnya BMPK Perseroan selama tahun 1999 sampai dengan 30 September 2002 adalah sebagai berikut :

Tahun	BMPK Pihak Terkait	BMPK Pihak Tidak terkait	Ketentuan Bank Indonesia	
			Pihak Terkait	Pihak Tidak Terkait
1999	0.84 %	25.70 %	10 %	30 %
2000	0.90 %	26.30 %	10 %	30 %
2001	0.75 %	23.42 %	10 %	30 %
Sept 2002	0.71 %	19.56 %	10 %	25 %

Persentase daripada kredit yang diberikan oleh Perseroan kepada pihak ketiga untuk tanggal 30 September 2002, 31 Desember 2001, 2000, 1999 dan 1998 adalah sebesar 99,64%, 98,70%, 99,62%, 97,33% dan 85,17%.

Kredit yang telah diberikan kepada pihak terafiliasi berturut-turut sebesar 0,36%, 1,30%, 0,38%, 2,67% dan 14,83% untuk tanggal 30 September 2002, 31 Desember 2001, 2000, 1999 dan 1998.

Perseroan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya selalu mematuhi ketentuan batas maksimum pemberian kredit (BMPK) sehingga untuk tanggal laporan yang berakhir pada tanggal 30 September 2002 tidak terdapat pelanggaran BMPK.

Rasio antara Pinjaman dengan Dana Pihak Ketiga (LDR)

Dalam menjalankan operasinya Perseroan mengharapkan peningkatan kredit yang bersifat realistis dan konservatif, untuk mengantisipasi agar tingkat LDR (*Loan to Deposit Ratio*) tetap dalam kriteria sehat berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 26/5/87/PPP tanggal 29 Mei 1993. Bank Indonesia menentukan posisi LDR di bawah 110%.

Hal ini juga dapat dilihat dari posisi LDR (*Loan to Deposit Ratio*) Perseroan pada tanggal 30 September 2002, 31 Desember 2001, 2000, dan 1999 adalah sebesar 33,35%, 16,50%, 17,80% dan 19,54%.

Giro Wajib Minimum

Berdasarkan surat keputusan Bank Indonesia No.30/89A/KEP/DIR tanggal 20 Oktober 1999, Bank Indonesia mewajibkan bank umum untuk menjaga Giro Wajib Minimum dalam bentuk rekening tanpa bunga pada BI sebesar 5% dari Dana Pihak Ketiga dalam rupiah bukan bank dan 3% dari Dana Pihak Ketiga dalam valuta asing termasuk bank di Indonesia.

Giro Wajib Minimum yang dimiliki Perseroan untuk mata uang Rupiah pada tanggal 30 September 2002, 31 Desember 2001, 2000, dan 1999 adalah masing masing sebesar Rp 42,44 miliar, Rp 33,20 miliar, Rp 47,88 miliar, dan Rp 13,74 miliar .

Adapun posisi Giro Wajib Minimum Perseroan pada tanggal 30 September 2002, 31 Desember 2001, 2000, dan 1999 adalah sebesar 5,05 %, 5,24 %, 5,18 % dan 5,53 %.

6. Prospek Usaha

Di tengah situasi sosial politik yang masih labil sehingga mempengaruhi proses pemulihan ekonomi di tahun-tahun mendatang, Perseroan berusaha lebih keras untuk memenuhi komitmen Perseroan agar selalu memberikan yang terbaik bagi para nasabah. Strategi Perseroan adalah meningkatkan sumber dana, meningkatkan kuantitas pelayanan kepada nasabah, pembenahan organisasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Strategi dalam meningkatkan sumber dana diutamakan dengan meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepada nasabah, dengan melakukan diversifikasi produk. Penelaahan atas produk yang dimiliki dan melakukan studi banding dengan produk kompetitor yang sejenis sebelum melakukan pengembangan produk, dilakukan secara berkala. Promosi kepada masyarakat melalui sarana media cetak maupun elektronik, penyelenggaraan *event-event* dengan melakukan kerja-sama dengan perusahaan-perusahaan *consumer goods*, diharapkan akan membuat produk yang ditawarkan menjadi lebih menarik dan diminati oleh masyarakat. Selain itu, Perseroan juga ingin memberikan tambahan kemudahan bagi para nasabah untuk meningkatkan pelayanan yang efektif dan efisien bagi nasabah. Hal ini akan dilakukan melalui penyempurnaan kebijakan, sistem prosedur serta pengembangan teknologi dan juga mulai menggunakan jaringan ATM.

Strategi dalam meningkatkan kuantitas pelayanan kepada nasabah dilakukan dengan memperluas jaringan kantor. Dengan meningkatkan kuantitas pelayanan, maka Perseroan akan lebih mudah untuk memperkenalkan produk-produk perbankan yang dimiliki kepada *customer* yang baru dan *customer* yang ada lebih luas lagi, sehingga secara tidak langsung akan mendukung strategi Perseroan diatas untuk meningkatkan sumber dana. Sehubungan dengan hal diatas, Perseroan merencanakan untuk membuka beberapa kantor operasional di wilayah Jabotabek, Bandung, Semarang, dan Surabaya.

Pembenahan organisasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia akan dilakukan secara terus menerus guna meningkatkan kemampuan bersaing dari Perseroan. Beberapa cara yang akan ditempuh adalah dengan mengadakan program program pelatihan dan training bagi para karyawan. Sehingga kemampuan karyawan diharapkan akan lebih baik bagi individual maupun organisasional, dan secara tidak langsung akan mempengaruhi hasil kinerja karyawan terhadap nasabah.

7. Asuransi

Perseroan telah mengasuransikan seluruh aktiva yang dimilikinya termasuk bangunan, kendaraan dan uang tunai terhadap musibah kebakaran dan musibah umum lainnya dalam jumlah pertanggungan yang memadai. Perseroan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan perusahaan-perusahaan asuransi yang tersebut di bawah ini.

- A. Perseroan telah mengasuransikan uang kas yang dimiliki/ dikuasai/ digunakan Perseroan sebagai berikut:

Penanggung	Keterangan	Jumlah Pertanggungan	Periode
PT. Asuransi Multi Artha Guna	Cash in Transit Pst & Cab	Rp. 50.000.000.000	01-10-02 s/d 01-03-03
PT. Asuransi Multi Artha Guna	Cash In Safe Pusat	Rp. 2.000.000.000	01-02-03 s/d 01-02-04
PT. Asuransi Multi Artha Guna	Cash in Safe BIP	Rp. 200.000.000	01-02-03 s/d 01-02-04
PT. Asuransi Multi Artha Guna	Cash in Safe KBJ	Rp. 250.000.000	01-02-03 s/d 01-02-04
PT. Asuransi Multi Artha Guna	Cash in Safe Rawamangun	Rp. 250.000.000	01-02-03 s/d 01-02-04
PT. Asuransi Multi Artha Guna	Cash in Safe Ciracas	Rp. 250.000.000	01-02-03 s/d 01-02-04
PT. Asuransi Multi Artha Guna	Cash in Safe Ariobimo	Rp. 250.000.000	01-02-03 s/d 01-02-04

PT. Asuransi Multi Artha Guna	Cash in Safe Kemayoran	Rp. 250.000.000	01-02-03 s/d 01-02-04
PT. Asuransi Multi Artha Guna	Cash in Safe Pasar Minggu	Rp. 200.000.000	01-02-03 s/d 01-02-04
PT. Asuransi Multi Artha Guna	Cash in Safe Mampang	Rp. 200.000.000	01-02-03 s/d 01-02-04
PT. Asuransi Multi Artha Guna	Cash in Safe Ciputat	Rp. 200.000.000	01-02-03 s/d 01-02-04
PT. Asuransi Multi Artha Guna	Cash in Safe Pamulang	Rp. 200.000.000	01-02-03 s/d 01-02-04
PT. Asuransi Multi Artha Guna	Cash in Safe Bulungan	Rp. 100.000.000	01-02-03 s/d 01-02-04
PT. Asuransi Multi Artha Guna	Cash in Safe Bintaro	Rp. 100.000.000	01-02-03 s/d 01-02-04
PT. Asuransi Multi Artha Guna	Cash in Safe Puri Indah	Rp. 150.000.000	01-02-03 s/d 01-02-04
PT. Asuransi Multi Artha Guna	Cash in Safe Meruya Ilir	Rp. 150.000.000	01-02-03 s/d 01-02-04
PT. Asuransi Multi Artha Guna	Cash in Safe Muara Karang	Rp. 400.000.000	01-02-03 s/d 01-02-04
PT. Asuransi Multi Artha Guna	Cash in Safe Bantoe	Rp. 400.000.000	01-02-03 s/d 01-02-04

B. Perseroan telah mengasuransikan kendaraan bermotor yang dimiliki/ dikuasai/ digunakan Perseroan.

Penanggung	Obyek Tanggungan	Jumlah Pertanggungan
PT. Asuransi Multi Artha Guna	19 unit Sepeda Motor	Rp. 140.500.000
PT. Asuransi Multi Artha Guna	27 unit Mobil	Rp. 4.675.265.000
PT. Asuransi Panin	1 unit Mobil	Rp. 250.000.000

C. Perseroan telah mengasuransikan bangunan-bangunan yang dimiliki/ dikuasai/ digunakan Perseroan.

Penanggung	Polis No.	Obyek Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan	Periode Pertanggungan
PT. Asuransi Multi Artha Guna	JKT.BG.013.000222	Inventaris Kantor – Cabang BIP Jl. Gatot Subroto Kav. 23	Rp. 64.675.000	18-10-02 s/d 18-10-03
PT. Asuransi Multi Artha Guna	JKT.F.013.006004	Building – Cabang BIP Jl. Gatot Subroto Kav. 23	Rp. 64.675.000	18-10-02 s/d 18-10-03
PT. Asuransi Multi Artha Guna	JKT.F.013.008007	Building – Cabang Kebon Jeruk Komplek Taman Kebon Jeruk A/9	Rp. 87.755.000	18-10-02 s/d 18-10-03
PT. Asuransi Multi Artha Guna	JKT.BG.013.000220	Inventory – Cabang Kebon Jeruk Komplek Taman Kebon Jeruk A/9	Rp. 87.755.000	18-10-02 s/d 18-10-03
PT. Asuransi Multi Artha Guna	JKT.F.013.008005	Building – Cabang Rawamangun Jl. Balai Pustaka Timur No. 18	Rp. 64.195.000	18-10-02 s/d 18-10-03
PT. Asuransi Multi Artha Guna	JKT.BG.013.000221	Inventaris – Cabang Rawamangun Jl. Balai Pustaka Timur No. 18	Rp. 64.195.000	18-10-02 s/d 18-10-03
PT. Asuransi Multi Artha Guna	JKT.F.013.008098	Building – Cabang Ciracas Jl. Centex Raya No. 1	Rp. 58.505.000	14-11-02 s/d 14-11-03
PT. Asuransi Multi Artha Guna	JKT.BG.013.000232	Inventaris – Cabang Ciracas Jl. Centex Raya No. 1	Rp. 58.505.000	14-11-02 s/d 18-11-03
PT. Asuransi Multi Artha Guna	JKT.F.013.008008	Building – Cabang Gedung Anobimo Jl. HR. Rasuna Said Kav. X-2/5	Rp. 82.790.000	18-10-02 s/d 18-10-03
PT. Asuransi Multi Artha Guna	JKT.BG.013.000218	Inventaris – Cabang Gedung Anobimo Jl. HR. Rasuna Said Kav. X-2/5	Rp. 82.790.000	18-10-02 s/d 18-10-03
PT. Asuransi Multi Artha Guna	JKT.F.013.009006	Building – Cabang Kemayoran Bursa Mobil Kemayoran Blk. S-304	Rp. 68.180.000	18-10-02 s/d 18-10-03
PT. Asuransi Multi Artha Guna	JKT.BG.013.000225	Inventaris – Cabang Kemayoran Bursa Mobil Kemayoran Blk. S-304	Rp. 68.180.000	18-10-02 s/d 18-10-03
PT. Asuransi Multi Artha Guna	JKT.F.013.008100	Building – Cabang Pasar Minggu Jl. Raya Pasar Minggu No. 18	Rp. 91.865.000	14-11-02 s/d 14-11-03
PT. Asuransi Multi Artha Guna	JKT.BG.013.000231	Inventaris – Cabang Pasar Minggu Jl. Raya Pasar Minggu No. 18	Rp. 92.465.000	14-11-02 s/d 18-11-03
PT. Asuransi Multi Artha Guna	JKT.F.013.008003	Building – Cabang Mampang Jl. Kemang Utara IX	Rp. 75.180.000	18-10-02 s/d 18-10-03
PT. Asuransi Multi Artha Guna	JKT.BG.013.000223	Inventaris – Cabang Mampang Jl. Kemang Utara IX	Rp. 75.180.000	18-10-02 s/d 18-10-03
PT. Asuransi Multi Artha Guna	JKT.F.013.008009	Building – Cabang Ciputat Jl. R.E. Martadinata Km. 27	Rp. 63.210.000	18-10-02 s/d 18-10-03

PT. Asuransi Multi Artha Guna	JKT.BG.013.000219	Inventaris – Cabang Ciputat Jl. R.E. Martadinata Km. 27	Rp. 63.210.000	16-10-02 s/d 18-10-03
PT. Asuransi Multi Artha Guna	JKT.F.013.006002	Building – Cabang Pamulang Jl. Raya Siliwangi	Rp. 74.275.000	13-10-02 s/d 18-10-03
PT. Asuransi Multi Artha Guna	JKT.BG.013.000224	Inventaris – Cabang Pamulang Jl. Raya Siliwangi	Rp. 74.275.000	16-10-02 s/d 18-10-03
PT. Asuransi Multi Artha Guna	JKT.F.013.006010	Building – Cabang Bulungan Jl. Sisimangaraja No. 1	Rp. 43.735.000	18-10-02 s/d 18-10-03
PT. Asuransi Multi Artha Guna	JKT.BG.013.000217	Inventaris – Cabang Bulungan Jl. Sisimangaraja No. 1	Rp. 43.735.000	16-10-02 s/d 18-10-03
PT. Asuransi Multi Artha Guna	JKT.F.013.006099	Building – Cabang Bintaro Jl. Raya Bintaro Blok C/38	Rp. 60.160.000	14-11-02 s/d 18-10-03
PT. Asuransi Multi Artha Guna	JKT.BG.013.000233	Inventaris – Cabang Bintaro Jl. Raya Bintaro Blok C/38	Rp. 60.160.000	14-11-02 s/d 18-10-03
PT. Asuransi Multi Artha Guna	JKT.F.013.006864	Building – Apart. Hayam Wuruk 1609 Jl. Hayam Wuruk No. 108	Rp. 600.000.000	12-11-02 s/d 12-11-03
PT. Asuransi Multi Artha Guna	JKT.F.013.115863	Building – Apart. Hayam Wuruk 5125 Jl. Hayam Wuruk No. 108	Rp. 600.000.000	12-11-02 s/d 12-11-03
PT. Asuransi Multi Artha Guna	JKT.F.013.006966	Building – Ruko Sunter B/17 Jl. Sunter Permai Raya B/17	Rp. 450.000.000	26-09-02 s/d 26-09-03
PT. Panin Insurance	A.0102.08.0176	Building – Kantor Pusat Jl. Jend. Sudirman No. 1	Rp. 1.150.000.000	01-08-02 s/d 01-08-03
PT. Asuransi Multi Artha Guna	JKT.F.013.006882	Building – Cabang Muara Karang Jl. Pluit Karang Barat No. 22-23	Rp. 143.285.000	11-05-02 s/d 11-05-03
PT. Asuransi Multi Artha Guna	JKT.BG.013.000252	Inventaris – Cabang Muara Karang Jl. Pluit Karang Barat No. 22-23	Rp. 143.285.000	15-05-02 s/d 15-05-03
PT. Asuransi Multi Artha Guna	JKT.F.013.008908	Building – Apart. Brawijaya Jl. Brawijaya XII No. 1	Rp. 500.000.000	11-07-02 s/d 11-07-02
PT. Asuransi Multi Artha Guna	JKT.F.013.009093	Building – Cabang Barito Jl. Barito II No. 41	Rp. 2.250.900.000	27-09-02 s/d 27-09-03
PT. Asuransi Multi Artha Guna	JKT.BG.013.000261	Inventaris – Cabang Barito Jl. Barito II No. 41	Rp. 288.100.000	11-09-02 s/d 11-09-03
PT. Asuransi Multi Artha Guna	JKT.F.013.009103	Building – Taman Palem Ruko Palem Lestari B1.D1/19D	Rp. 550.000.000	30-09-02 s/d 30-09-03
PT. Asuransi Multi Artha Guna	JKT.F.013.006967	Building – Sunter Blok A/9 Jl. Sunter Permai Raya A/9	Rp. 550.000.000	26-09-02 s/d 26-09-03

8. Keterangan Fiskal

Berdasarkan Surat Keterangan Fiskal Nomor : SR-413/WPJ.07/BD.03/2002 tanggal 11 Desember 2002, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah VII Jakarta Raya Khusus a.n Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2003, diterangkan mengenai perpajakan perusahaan sebagai berikut :

1) Tunggalan Pajak sampai saat ini

PPH	PPN	PBB
Nihil	Nihil	Nihil

2) SPT Tahunan PPH

Tahun Pajak	Penghasilan Kena Pajak (Rp)
1999	5.009.098.000
2000	7.630.322.000
2001	5.798.682.000

3) PPh Final

Tahun Pajak	Obyek	PPh Final (Rp)
2000	Bunga	5.520.776.110
	Sewa Tanah/ Bangunan	-
	Jasa Konstruksi/Konsultan	-
2001	Bunga	17.187.414.364
	Sewa Tanah/ Bangunan	-
	Jasa Konstruksi/Konsultan	-
2002	Bunga	13.023.695.437
	Sewa Tanah/ Bangunan	3.403.371
	Jasa Konstruksi/Konsultan	-

4) PBB yang dibayar menurut Wajib Pajak

Tahun Pajak	Jumlah STTS	PBB yang dibayar (Rp)	Keterangan
2002	-	1.495.728	Wajib Pajak menyewa gedung pada PT Amana Jaya

9. Perkara-perkara

Perkara-perkara perdata yang sedang dihadapi oleh Perseroan sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

1. Perkara No. 60/Pdt.G/2000/PN. JKT. PST, antara Sri Inawati Sutanto, sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat.
2. Perkara no. 469/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Pst., antara Saut Manahan Simangunsong, sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat.

Pengadilan Negeri Tangerang

1. Perkara No. 265/Pdt.G/1998/PN.TNG, antara Perseroan, sebagai Penggugat melawan Steady Winarto sebagai Tergugat.

Adapun perkara-perkara tersebut di atas secara material tidak akan mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.

IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk masa sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2002 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta dan Mustofa dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001, 2000 dan 1999 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta dan Mustofa dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material dengan penjelasan mengenai penyajian kembali laporan keuangan tahun 2000 dan dampak memburuknya ekonomi di Indonesia terhadap Perseroan.

(dalam jutaan Rupiah)

	30 September		31 Desember	
	2002 (9 Bulan)	2001 (1 Tahun)	2000 (1 Tahun)	1999 (1 Tahun)
AKTIVA				
Kas	4.143	1.969	721	2.511
Giro pada Bank Indonesia	43.729	31.953	58.316	8.859
Giro pada Bank Lain – Bersih	316	25	659	146
Penempatan pada Bank lain – Bersih	247.488	9.900	173.469	330.706
Efek-efek – Bersih				
Pihak hubungan istimewa	-	-	113.994	-
Pihak ketiga	741.638	1.060.174	552.692	24.816
Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali - Bersih	-	27.256	-	-
Kredit – Bersih				
Pihak hubungan istimewa	1.957	2.602	612	1.663
Pihak ketiga	453.261	195.445	159.775	59.799
Penyertaan saham - Bersih	10.117	9.938	9.913	3.727
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	18.835	24.131	16.025	3.331
Aktiva tetap – Bersih	14.874	7.092	6.005	2.394
Aktiva pajak tangguhan	2.711	1.101	1.180	668
Aktiva Lain-lain	15.861	9.514	8.178	3.205
Jumlah Aktiva	1.554.927	1.381.101	1.101.536	441.825
KEWAJIBAN DAN EKUITAS				
KEWAJIBAN				
Kewajiban Segera	8.472	9.027	9.288	1.205
Simpanan				
Giro				
Pihak hubungan istimewa	181	201	3.645	19.931
Pihak Ketiga	72.540	19.501	123.797	12.265
Tabungan				
Pihak hubungan istimewa	261	33	109	5.696
Pihak Ketiga	34.505	24.890	16.367	9.182
Deposito Berjangka				
Pihak hubungan istimewa	619	150	8.840	17.643
Pihak Ketiga	678.102	554.893	687.096	217.578
Sertifikat Deposito – Bersih	21.584	73.972	73.903	32.210
Simpanan V-link	293.757	330.281	-	-
Simpanan dari Bank lain	263.564	196.202	12.679	69.050
Hutang Pajak	4.921	2.618	2.480	1.530
Surat Berharga Yang Diterbitkan	90.513	98.051	97.436	-
Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	2	3	-	-
Kewajiban Lain-Lain	5.908	3.001	2.517	1.111
Jumlah Kewajiban	1.474.928	1.312.824	1.038.158	387.401
Jumlah Ekuitas	80.000	68.277	63.379	54.424
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	1.554.927	1.381.101	1.101.536	441.825

LAPORAN RUGI LABA

(dalam jutaan Rupiah, kecuali laba bersih per saham dalam Rupiah penuh)

	2002	2001	2000	1999
	(9 Bulan)	(1 Tahun)	(1 Tahun)	(1 Tahun)
Pendapatan Bunga	186.998	152.703	90.037	69.824
Seban Bunga	163.247	134.419	75.583	60.546
Pendapatan Bunga - Bersih	23.751	18.284	14.454	9.278
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	5.149	992	278	164
Beban Operasional Lainnya	9.354	11.769	7.568	5.592
Beban Operasional Lainnya - Bersih	(23.759)	(12.790)	(8.317)	(5.654)
Laba Operasional	5.141	6.486	6.415	3.788
Pendapatan (Beban) Non Operasional	121	212	(93)	94
Laba Sebelum Beban Pajak	5.263	6.698	6.322	3.881
Beban Pajak	(1.400)	(1.800)	(1.768)	(1.084)
Laba Bersih	3.862	4.898	4.554	2.797
Laba bersih per saham				
(dalam Rupiah penuh)				
Dasar	6	8	11	7
Dilusian	-	-	-	7

RASIO - RASIO

(Disajikan dalam persentase (%))

URAIAN	30 Sept	31 Desember		
	2002	2001	2000	1999
RASIO KEUANGAN				
Jumlah Kewajiban/Jumlah Aktiva	94,86	95,06	94,25	87,68
Jumlah Kewajiban/Jumlah Ekuitas	1843,67	1922,80	1638,02	711,82
Jumlah Kredit yang Diberikan - Bersih/ Jumlah Aktiva	29,28	14,34	14,56	13,91
Jumlah Aktiva Produktif- Bersih/ Jumlah Aktiva	93,57	94,54	91,79	95,25
Jumlah Simpanan/ Jumlah Aktiva	70,84	72,69	82,95	71,18
Rasio Usaha				
Pendapatan Bunga/ Jumlah Aktiva Produktif - Bersih	12,85	11,70	8,90	16,59
Pendapatan Bunga-Bersih/ Rata-rata Jumlah Aktiva	1,62	1,47	1,87	1,89
Pendapatan Bunga-Bersih/ Rata-rata Jumlah Ekuitas	32,04	27,78	24,54	22,33
Pendapatan Bunga - Bersih/ Rata-rata Jumlah Aktiva Produktif - Bersih	1,72	1,58	2,02	2,00
Beban Operasional Lainnya - Bersih/ Rata-rata Jumlah Aktiva	(1,62)	(1,03)	(1,08)	(1,15)
Beban Operasional Lainnya - Bersih/ Rata-rata Jumlah Ekuitas	(32,05)	(19,43)	(14,12)	(13,61)
Beban Operasional Lainnya - Bersih/ Rata-rata Jumlah Ak.Prod.-Bersih	(1,13)	(0,99)	(0,85)	(1,22)
Laba Bersih/ rata-rata Jumlah Aktiva	0,26	0,39	0,59	0,57
Laba Bersih/ rata-rata Jumlah Ekuitas	5,21	7,44	7,73	6,73
Laba Bersih/ rata-rata Jumlah Ak. Prod.- Bersih	0,28	0,52	0,64	0,60
Pendapatan Operasional - Bersih/ Rata-rata Jumlah Aktiva	0,35	0,52	0,49	0,77
Laba Sebelum Pajak Penghasilan/Pendapatan Bunga	2,81	4,14	4,31	5,56
Laba Bersih/ Pendapatan Bunga	2,07	3,21	5,06	4,01
Pendapatan Bunga	N/C	69,60	28,95	(82,85)

	30 September	31 Desember		
	2002	2001	2000	1999
Rasio Pertumbuhan				
Pendapatan Operasional.- Bersih	N/C	69,36	N/A	59,21
Laba Bersih	N/C	7,56	62,77	71,61
Jumlah Aktiva	12,59	25,38	149,32	(18,43)
Jumlah Kewajiban	12,35	26,46	167,98	(24,48)
Jumlah Ekuitas	17,17	7,73	16,45	89,90
Kredit yang diberikan - Bersih/ Jumlah Aktiva Produktif- Bersih	31,29	15,17	15,86	14,60
Kredit yang diberikan - Bersih/ Dana Pihak Ketiga (LDR)	54,63	30,35	17,80	19,54
Penyisihan Penghapusan Kredit/ Kredit yang Diberikan	3,50	1,89	1,52	5,21
Rasio Kecukupan Modal - (CAR)	8,91	15,31	18,76	34,44

Catatan:

N/C : tidak dapat diperbandingkan

X. EKUITAS

Tabel di bawah ini menunjukkan perkembangan posisi ekuitas Perseroan untuk masa sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2002 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001 dan 2000 yang angka-angkanya diambil dari Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta & Mustofa, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material dengan penjelasan mengenai penyajian kembali laporan keuangan tahun 2000 dan dampak memburuknya ekonomi di Indonesia terhadap Perseroan.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 September	31 Desember	
	2002	2001	2000
Modal Dasar, nilai nominal Rp 100 per saham pada tahun 2002, 2001 dan 2000	213.600	213.600	213.600
Modal Ditempatkan dan Disetor penuh	69.829	63.400	63.400
Tambahan modal disetor - bersih	139	(1.292)	(1.292)
Saldo Laba	10.031	6.169	1.271
Jumlah Ekuitas	80.000	68.277	63.379

Adapun susunan Modal Saham Perseroan pada tanggal 30 September 2002 berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Hans Tuanakotta & Mustofa adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp.)	Persentase (%)
Modal Dasar	2.136.000.000	213.600.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
PT Suryayudha Investindo Cipta	170.700.000	17.070.000.000	24,45
PT Nata Palindo	104.780.000	10.478.000.000	15,01
PT Panin Insurance Tbk	9.671.500	967.150.000	1,38
Dana Pensiun Asuransi Panin	8.520.000	852.500.000	1,22
Tn. Agus Antarksa Sidharta - direktur	850.000	85.000.000	0,12
Tn. Untung Woenardi - direktur utama	150.500	15.050.000	0,02
Tn. Harijanlo Gunawan - komisaris	5.500	550.000	0,00
Lain-lain (kurang dari 5%)	403.615.860	40.361.586.000	57,80
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :	698.293.360	69.829.336.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	1.437.706.640	143.770.664.000	

Pada tanggal 24 Januari 2003 dengan Surat Direksi No. 00/DIR-VICT/19.002, Direksi Perseroan mengajukan pernyataan pendaftaran emisi saham kepada Bapepam dalam rangka Penawaran Umum Terbatas II kepada para pemegang saham dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 705.243.360 (tujuh ratus lima juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 100 (seratus rupiah) per saham yang akan ditawarkan dengan harga Rp 100 (seratus rupiah) per saham dimana melekat sebanyak-banyaknya 423.146.016 (empat ratus dua puluh tiga juta seratus empat puluh enam ribu enam belas) Waran Seri III yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham.

Seandainya Penawaran Umum Terbatas II kepada para pemegang saham dalam rangka penerbitan dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 705.243.360 (tujuh ratus lima juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh) saham dengan nilai nominal Rp 100 (seratus rupiah) per saham dan harga penawaran sebesar Rp 100 (seratus rupiah) per saham serta Waran Seri II sebanyak-banyaknya 4.450.000 (empat juta empat ratus lima puluh ribu) waran dan Waran Seri III sebanyak-banyaknya 423.146.016 (empat ratus dua puluh tiga juta seratus empat puluh enam ribu enam belas) waran dilaksanakan menjadi saham Perseroan pada tanggal 30 September 2002, maka struktur ekuitas Perseroan secara Proforma pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2002

(dalam jutaan Rupiah, kecuali data per saham)

Uraian	Modal Dasar	Modal Disetor	Tambahan modal disetor	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas pada tanggal 30 September 2002 menurut laporan keuangan, dengan nilai nominal Rp 100 per saham	213.600	69.829	139	10.031	80.000
Perubahan Ekuitas setelah tanggal 30 September 2002 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut :					
- Penukaran seluruh Waran Seri II sebanyak-banyaknya 4.450.000 Waran menjadi 4.450.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham dan harga pelaksanaan Rp 125 per saham	-	445	111	-	556
- Penawaran Umum Terbatas II saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 705.243.360 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham dengan harga penawaran Rp 100 per saham	-	70.524	-	-	70.524
- Penukaran seluruh Waran Seri III sebanyak-banyaknya 423.146.016 waran menjadi 423.146.016 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham dan harga pelaksanaan Rp 100 per saham	-	42.315	-	-	42.315
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 September 2002 setelah Penawaran Umum Terbatas II dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham serta Waran Seri II dan Waran Seri III dilaksanakan menjadi saham Perseroan	213.600	183.113	250	10.031	193.395

Seandainya sampai dengan tanggal 12 Maret 2003 pukul 16:00 tidak ada pemegang Waran Seri II yang mengkonversikan Waran Seri II menjadi saham Perseroan maka struktur ekuitas Perseroan secara proforma pada tanggal 30 September 2002 adalah sebagai berikut:

PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2002

(dalam jutaan Rupiah, kecuali data per saham)

Uraian	Modal Dasar	Modal Disetor	Tambahan Modal disetor	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas pada tanggal 30 September 2002 menurut laporan keuangan, dengan nilai nominal Rp100 per saham	213.600	69.829	139	10.031	80.000
Perubahan Ekuitas setelah tanggal 30 September 2002 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut :					
Penawaran Umum Terbatas II saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 705.243.360 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham dengan harga penawaran Rp 100 per saham	-	70.524	-	-	70.524
- Penukaran seluruh Waran Seri III sebanyak-banyaknya 423.146.016 waran menjadi 423.146.016 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham dan harga pelaksanaan Rp 100 per saham	-	42.315	-	-	42.315
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 September 2002 setelah Penawaran Umum Terbatas II dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham serta Waran Seri III dilaksanakan menjadi saham Perseroan	213.600	182.668	139	10.031	192.839

XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh termasuk saham baru dalam rangka Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama termasuk hak atas dividen.

Perseroan merencanakan untuk membayarkan dividen kas (tunai) kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya pembayaran dividen kas (tunai) akan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tetap memperhatikan tingkat kesehatan Perseroan dan kebutuhan dana yang diperlukan untuk investasi dalam rangka pengembangan usaha, tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Dalam menghadapi krisis ekonomi yang mengakibatkan perlunya penjaminan dari Bank Indonesia terhadap dana nasabah, perbankan nasional yang mengikutsertakan diri dalam penjaminan tersebut bersedia untuk tidak membagikan dividen kas (tunai) kepada pemegang saham, selama penjaminan tersebut masih berlangsung, atau selama kewajiban bank tersebut terhadap Pemerintah belum terbayar, sepanjang bank tersebut tidak memenuhi ketentuan permodalan yang dipersyaratkan, kecuali ditentukan lain oleh BPPN. Ketentuan-ketentuan ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum, Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Keputusan Menteri Keuangan No. 26/KMK.017/1998 tanggal 28 Januari 1998 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.

Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan di atas, Perseroan menerapkan kebijakan dividen kas (tunai) atas laba bersih Perseroan setelah ketentuan-ketentuan di atas terpenuhi sebagai berikut :

Laba Bersih setelah Pajak	Dividen Kas (Tunai) terhadap Laba Bersih setelah Pajak
Sampai dengan Rp 15 miliar	20%
Lebih dari Rp 15 miliar	30%

Tabel berikut menunjukkan dividen tunai yang dibayarkan kepada para pemegang saham untuk setiap tahun buku sejak Penawaran Umum Perdana Perseroan

Tahun Buku	Laba (Rugi) Bersih (Rp juta)	Jumlah Dividen Tunai dari Laba Bersih (Rp juta)	Jumlah Dividen Tunai Setiap Saham (Rp)	Persentase Dividen Tunai/ Laba Bersih (%)
1999	2.798	-	-	-
2000	4.554	6.340	10	83.30 %
2001	4.898	-	-	-

XII. PERPAJAKAN

Sesuai dengan ketentuan yang tercakup dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983, tentang Pajak Penghasilan ("Undang-Undang Pajak Penghasilan"), dividen termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan, kecuali dividen yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri wajib dipotong pajak dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto, atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari negara yang telah menandatangani suatu Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan Indonesia, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.101/1996, tanggal 29 Maret 1996, tentang "Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda".

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri wajib dipotong pajak dengan tarif sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto. Tarif ini juga berlaku atas pembayaran dividen kepada Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi, sesuai dengan ketentuan yang tercakup dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-28/PJ-43/1995, tanggal 22 Mei 1995, perihal "Pajak Penghasilan Pasal 23 atas bunga Obligasi dan Dividen yang diterima Wajib Pajak orang pribadi" (Seri Pph Pasal 23/Pasal-26 No. 6), dimana dikatakan bahwa bunga obligasi dan dividen baik dari saham atau sekuritas, baik yang diperdagangkan di Pasar Modal maupun tidak, yang terutang atau dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi dalam tahun 1995 dan seterusnya, dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen).

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997, tanggal 29 Mei 1997, tentang "Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tanggal 23 Desember 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek", yaitu sebesar:

- i. 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham; dan
- ii. tambahan 0,50% atas transaksi penjualan saham pendiri yang dihitung berdasarkan nilai saham pada penutupan bursa di akhir tahun 1996 untuk saham yang telah diperdagangkan di bursa efek pada atau sebelum tahun 1996; atau; nilai saham perusahaan pada saat penawaran umum perdana untuk saham yang diperdagangkan di bursa efek setelah tanggal 1 Januari 1997.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 651/KMK.04/1994, tanggal 29 Desember 1994, tentang "Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Tidak Termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan", penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang bersumber dari penanaman modal dalam bentuk obligasi atau saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.42/1993, tanggal 29 Januari 1993, tentang " Pajak Penghasilan Atas Bukti Right ", hasil Penjualan Bukti Right (HMETD) oleh pemegang saham dianggap sebagai penghasilan yang merupakan Objek Pajak Penghasilan. Penghasilan dari penjualan Bukti HMETD di Indonesia yang dilakukan oleh pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak luar negeri terkena pemotongan pajak penghasilan (*withholding tax*) sebesar 20% dari perkiraan penghasilan netto yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pada saat ini peraturan pelaksanaan berkaitan dengan ketentuan tersebut belum dikeluarkan,

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 2000, tanggal 20 April 2000, tentang "Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai", atas dokumen yang berkaitan dengan transaksi penjualan saham di Indonesia dikenakan Bea Meterai sebesar Rp 6.000 (enam ribu Rupiah) atas transaksi dengan nilai lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) atau Rp 3.000 (tiga ribu Rupiah) atas transaksi sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah). Transaksi dengan nilai kurang dari Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) tidak dikenakan Bea Meterai.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM TERBATAS II INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM TERBATAS II INI.

XIII. PIHAK YANG BERTINDAK SEBAGAI PEMBELI SIAGA

Berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas II PT Bank Victoria International Tbk No. 37 tanggal 22 Januari 2003, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang bertindak selaku Pembeli Siaga adalah:

PT Victoria Sekuritas
Graha BIP, Lt.8
Jl. Gatot Subroto Kav. 23
Jakarta 12930, Indonesia

PT Panin Sekuritas Tbk
Gedung Bursa Efek Jakarta, Tower 1, Suite 1205
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Pokok-pokok yang tercantum dalam Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas II PT Bank Victoria International Tbk No.37 tanggal 22 Januari 2003 menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembeli Siaga berjanji dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham setelah tanggal terakhir Periode Pendaftaran Sertifikat Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 400.000.000 (empat ratus juta) saham, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini dan peraturan dan ketentuan di bidang Pasar Modal dan peraturan bursa efek di mana saham-saham Emiten tercatat serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
- b. Selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah tanggal penjatahan Sertifikat Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Emiten wajib memberitahukan kepada Pembeli Siaga jumlah saham yang tidak dibeli oleh para pemegang saham dan wajib dibeli dan dibayar oleh Pembeli Siaga.
- c. Hak atas saham-saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham atau pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dibeli oleh Pembeli Siaga dengan harga penawaran yaitu Rp 100 (seratus rupiah) seliap saham, dengan perincian sebagai berikut :
 - PT Victoria Sekuritas wajib membayar sebanyak-banyaknya Rp 20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah).
 - PT Panin Sekuritas Tbk wajib membayar sebanyak-banyaknya Rp 20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah).Apabila sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham atau pemegang HMETD kurang dari 400.000.000 saham, maka pembeli siaga akan membeli HMETD dengan perbandingan PT Panin Sekuritas Tbk berbanding PT Victoria Sekuritas sama dengan 1:1.
- d. Pembeli Siaga harus membayar kepada Emiten seluruh harga dari sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham atau pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan dari Emiten.
- e. Untuk perjanjian ini dan segala akibatnya dan pelaksanaannya, para pihak memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PT Victoria Sekuritas dan PT Panin Sekuritas Tbk menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran Umum Terbatas II ini adalah sebagai berikut :

Akuntan Publik :

Hans Tuanakotta & Mustofa
Wisma Antara Lt. 4
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 17
Jakarta 10110

Tugas dan kewajiban pokok Akuntan Publik di dalam Penawaran Umum Terbatas II ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Menurut standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Dalam hal ini, Akuntan Publik bertanggungjawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya. Audit yang dilakukan Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan dan juga penilaian atas dasar prinsip akuntansi yang dipergunakan dan estimasi yang signifikan yang dibuat oleh manajemen tentang penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum :

LOU & Mitra
Plaza DM (d/h Plaza Mashill) Lt.2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 25
Jakarta 12920

Tugas dan kewajiban pokok Konsultan Hukum selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum Terbatas II adalah melakukan pemeriksaan fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan tersebut dimuat dalam laporan pemeriksaan segi hukum, yang menjadi dasar dari pendapat hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, sesuai dengan kode etik, standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku.

Notaris :

Fathiah Helmi, SH
Jl. Kimangunsarkoro No.77 A
Menteng, Jakarta Pusat

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum Terbatas II antara lain membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Terbatas II antara lain Pernyataan Penerbitan Waran Seri III dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham serta Waran Seri III.

Biro Administrasi Efek :

PT Adimitra Transferindo
Jl. Bukit Gading Raya Blok A No.7
Kelapa Gading Barat
Jakarta Utara - 14241

Ruang lingkup tugas Badan Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Terbatas II ini termasuk menentukan Daftar Pemegang Saham yang berhak, menerbitkan dan mengirimkan Sertifikat Bukti HMETD,

melayani permohonan balik nama atas Sertifikat Bukti HMETD yang sudah diperjualbelikan dan memproses pemesanan saham sesuai dengan hak yang dimiliki dan ketentuan yang berlaku sampai dengan penerbitan Surat Kolektif Saham. Dalam hal ini terjadi adanya hak yang tidak dilaksanakan, maka Biro Administrasi Efek bersama Perseroan akan melakukan proses penjatahan atas pemesanan tambahan, mencetak Konfirmasi Penjatahan dan menyiapkan Laporan Penjatahan. Biro Administrasi Efek juga bertanggung jawab untuk menyesuaikan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Surat Kolektif Saham terhadap setiap tambahan saham yang telah diterbitkan karena adanya pelaksanaan hak, memeriksa kelengkapan dokumen para pemesan dan membenarkan tanda terima pemesanan pembelian saham, menyerahkan Surat Kolektif Saham yang telah selesai diproses.

Lembaga dan Profesi penunjang pasar modal dalam rangka Penawaran Umum Terbatas II ini menyatakan tidak ada hubungan afiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.

XV. KETERANGAN TENTANG PAKET EFEK

Paket efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas II ini terdiri dari sebanyak-banyaknya 705.243.360 (tujuh ratus lima juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 100 (seratus rupiah) setiap saham yang akan ditawarkan dengan harga Rp 100 (seratus rupiah) setiap sahamnya di mana melekat sebanyak-banyaknya sejumlah 423.146.016 (empat ratus dua puluh tiga juta seratus empat puluh enam ribu enam belas) Waran Seri III yang diterbitkan menyertai Saham Biasa Atas Nama pada Penawaran Umum Terbatas II ini yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para Pemegang Saham.

Setiap pemegang 1(satu) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal tanggal 12 Maret 2003 pukul 16:00 WIB mempunyai 1 (satu) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) untuk membeli 1 (satu) saham baru dengan harga penawaran sebesar Rp 100 (seratus rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh saat pengajuan pemesanan pembelian saham, dimana pada setiap 10 (sepuluh) saham baru melekat 6 (enam) Waran Seri III yang diberikan secara cuma-cuma.

KETERANGAN MENGENAI SAHAM

Yang dimaksud dengan saham yang ditawarkan adalah sebanyak-banyaknya 705.243.360 (tujuh ratus lima juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 100 (seratus rupiah) setiap saham yang akan ditawarkan dengan harga Rp 100 (seratus rupiah) setiap sahamnya.

Saham yang ditawarkan ini memiliki hak yang sama dan sederajat seperti halnya saham-saham lain yang telah dikeluarkan Perseroan.

Saham-saham tersebut akan dicatatkan dan diperdagangkan secara tanpa warkat di Bursa Efek Jakarta.

KETERANGAN MENGENAI WARAN SERI III

Waran Seri III yang diterbitkan Perseroan seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya 423.146.016 (empat ratus dua puluh tiga juta seratus empat puluh enam ribu enam belas) Waran Seri III Atas Nama yang diberikan secara cuma-cuma kepada Para Pemegang Saham baru dan atau Pemegang HMETD yang melaksanakan haknya untuk melakukan pembelian saham. Waran Seri III tersebut diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri III Penawaran Umum Terbatas II PT Bank Victoria International Tbk No. 34 tanggal 22 Januari 2003 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta.

Keterangan mengenai Waran Seri III di bawah ini merupakan rangkuman dari Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri III, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam akta tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelola Administrasi Waran Seri III pada setiap hari dan jam kerja.

1. Definisi

- a. Waran Seri III adalah Surat Kolektif Waran Seri III atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang akan memberikan hak kepada pemegangnya untuk pertama kalinya merupakan pemegang saham yang berasal dari saham yang ditawarkan/dijual melalui Penawaran Umum Terbatas II untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan sesuai dengan syarat dan kondisi serta penerbitan Waran Seri III dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku. Waran Seri III ini akan diadministrasikan secara elektronik di dalam Penitipan Kolektif

KSEI dan sebagai tanda bukti awal kepemilikan akan diterbitkan Formulir Konfirmasi Penjatahan Waran Seri III.

- b. Surat Kolektif Waran Seri III adalah surat bukti akan kepemilikan sejumlah Waran Seri III dengan kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan dimana di dalamnya tercantum nama, alamat dan jumlah Waran Seri III serta hal-hal lainnya sehubungan dengan Waran Seri III tersebut.
- c. Formulir Konfirmasi Penjatahan Waran Seri III adalah surat bukti akan kepemilikan sejumlah Waran Seri III dengan kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan dimana di dalamnya tercantum nama, alamat dan jumlah Waran Seri III serta hal-hal lainnya sehubungan dengan Waran Seri III tersebut.
- d. Pelaksanaan berarti pelaksanaan hak pembelian saham baru oleh Pemegang waran.
- e. Harga Pelaksanaan adalah harga yang telah ditetapkan untuk dapat menukarkan Waran Seri III menjadi saham Perseroan, yaitu sebesar Rp 100 (seratus rupiah) setiap sahamnya, atau harga pelaksanaan Waran Seri III baru apabila terjadi penyesuaian.
- f. Saham Hasil Pelaksanaan adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai akibat dari hasil pelaksanaan dan merupakan saham yang disetor penuh dimana pemegangnya akan memperoleh hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh sebelumnya.

2. Hak Atas Waran Seri III

Para pemilik HMETD atau pemilik Sertifikat Bukti Kepemilikan (SBK) yang sah yang dikeluarkan oleh KSEI, yang telah melaksanakan HMETD tersebut menjadi saham, atau pihak lain yang namanya tertera sebagai pemilik Waran Seri III yang sah yang diperoleh melalui pembelian Waran Seri III selama masa perdagangan Waran Seri III yang diadakan dari tanggal 20 Maret 2003 sampai dengan tanggal 21 Maret 2006 untuk perdagangan di Pasar Reguler & Pasar Negosiasi, tanggal 24 Maret 2006 untuk perdagangan di Pasar Tunai.

3. Bentuk dan Denominasi

Waran Seri III yang diterbitkan Perseroan adalah Waran Seri III Atas Nama. Untuk pemegang saham yang telah melakukan imobilisasi saham atau mengkonversikan sahamnya ke dalam penitipan kolektif KSEI atas saham yang telah dimilikinya maka Perseroan tidak akan menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri III, tetapi waran tersebut akan didistribusikan secara elektronik dalam penitipan kolektif KSEI dan sebagai bukti kepemilikan adalah Konfirmasi Penjatahan Waran Seri III. Sedangkan bagi pemegang saham yang belum melakukan imobilisasi (konversi) atas saham yang telah dimilikinya maka waran akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Waran Seri III.

Waran Seri III ini tercatat serta akan diperdagangkan secara tanpa warkat di Bursa Efek Jakarta sejak 20 Maret 2003 sampai dengan tanggal 21 Maret 2006 untuk perdagangan di Pasar Reguler & Pasar Negosiasi, tanggal 24 Maret 2006 untuk perdagangan di Pasar Tunai.

Surat Kolektif Waran Seri III ini memiliki denominasi dengan pecahan terkecil adalah 500 atau sesuai dengan jumlah penjatahan saham.

4. Hak untuk Membeli Saham Perseroan

Setiap Pemegang Waran Seri III berhak untuk melakukan pembelian akan saham baru Perseroan dengan menukarkan Waran Seri III yang dimilikinya pada setiap hari kerja selama masa berlakunya pelaksanaan. Dengan membayar harga pelaksanaan sebesar Rp 100 (seratus rupiah), atau harga pelaksanaan baru bila terjadi penyesuaian, Pemegang 1 (satu) Waran Seri III berhak untuk mendapatkan 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp 100 (seratus rupiah) setiap saham.

5. Jangka Waktu Waran Seri III

Jangka waktu Waran Seri III adalah 3 (tiga) tahun kalender yang dihitung sejak tanggal pencatatan Waran Seri III yang paling awal di Bursa Efek Jakarta yaitu tanggal 20 Maret 2003 sampai dengan tanggal 27 Maret 2006 pada pukul 16:00 WIB.

6. Pemberitahuan Atas Perubahan Isi Pernyataan Waran Seri III

Perseroan memiliki hak untuk merubah isi Pernyataan Penerbitan Waran Seri III, kecuali untuk merubah jangka waktu Waran Seri III, dengan ketentuan telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Waran Seri III yang mewakili lebih dari 50% dari jumlah Waran Seri III yang beredar. Dalam hal ini, Perseroan wajib untuk mengumumkan rencana perubahan tersebut di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang minimal salah satunya memiliki peredaran yang luas dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan. Pengumuman tersebut dilakukan dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani Pengubahan Penerbitan Waran Seri III dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut pemegang waran seri III lebih dari 50 % (lima puluh persen) tidak menyatakan keberatan secara tertulis kepada Emiten maka pemegang waran seri III dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.

Setiap perubahan atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri III harus dilakukan melalui Akta Notaris yang mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri III sejak tanggal akta perubahan dibuat dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri, Peraturan Pasar Modal dan Ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

7. Masa Perdagangan Waran Seri III

Masa perdagangan Waran Seri III adalah setiap hari bursa, terhitung sejak tanggal Pencatatan Waran Seri III pada Bursa Efek Jakarta yaitu tanggal 20 Maret 2003 sampai dengan tanggal 21 Maret 2006 pada pukul 16:00 WIB untuk perdagangan di Pasar Reguler & Pasar Negosiasi, tanggal 24 Maret 2006 pada pukul 16:00 WIB untuk perdagangan di Pasar Tunai.

8. Masa Berlaku Pelaksanaan

Masa berlaku pelaksanaan adalah setiap hari kerja, terhitung 6 bulan setelah tanggal pencatatan yaitu tanggal 26 September 2003 sampai tanggal 27 Maret 2006 pada pukul 16:00 WIB.

Pemegang Waran Seri III memiliki hak untuk menukarkan sebagian atau seluruh Warannya menjadi saham baru. Jika harga pasar saham Perseroan menjadi lebih rendah dari harga pelaksanaannya. Pemegang Waran Seri III berhak untuk tidak menukarkan Warannya menjadi saham baru karena secara terontis, Waran Seri III yang diterbitkan Perseroan menjadi tidak bernilai. Sesudah melampaui masa berlaku Pelaksanaan, setiap Waran Seri III yang belum dilaksanakan menjadi tidak bernilai dan tidak berlaku untuk keperluan apapun dan Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban untuk menerbitkan saham baru.

9. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri III

- a) Setiap Pemegang Waran Seri III dapat menukarkan Warannya menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham dalam portepel Perseroan selama masa laku pelaksanaan pada jam kerja yang umum berlaku dengan melakukan pembayaran harga pelaksanaannya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri III.
- b) Penukaran Waran Seri III dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri III.
- c) Pada tanggal pelaksanaan, para Pemegang Waran Seri III yang bermaksud untuk menukarkan Warannya menjadi saham baru wajib untuk menyerahkan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri III:
 - i. Permohonan untuk melakukan pelaksanaan (selanjutnya disebut "Formulir Pelaksanaan") dan;
 - ii. Surat Kolektip Waran Seri III asli atau konfirmasi tertulis asli yang dikeluarkan oleh KSEI yang akan dilaksanakan (kedua dokumen ini selanjutnya disebut "Dokumen Pelaksanaan")
 - iii. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri III yang bersangkutan kepada Perseroan.

Formulir Pelaksanaan dilekatkan pada setiap Surat Kolektip Waran Seri III atau konfirmasi tertulis asli yang dikeluarkan oleh KSEI. Dengan diterimanya Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri III wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan (selanjutnya disebut "Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan")

- d) Dokumen Pelaksanaan yang telah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri III tidak dapat dibatalkan dan ditank kembali.
- e) Pemegang Waran Seri III yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan selama masa berlaku Pelaksanaan tidak dapat lagi melaksanakan hak pelaksanaannya menjadi saham.
- f) Dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri III menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri III akan melakukan penelitian terhadap keabsahan Waran Seri III, Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaftaranya Pemegang Waran Seri III di dalam Daftar Pemegang Waran Seri III dan dapat tidaknya pemodal asing melakukan pelaksanaan.

Pada hari kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri III akan meminta persetujuan Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri III dilaksanakan, dan Perseroan pada hari kerja selanjutnya harus sudah membenkan keputusan mengenai hal tersebut di atas kepada Pengelola Administrasi Waran Seri III. Dalam 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri III akan membenkan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri III mengenai diterima atau ditolaknya permohonan untuk melakukan pelaksanaan.

Selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri III menerima persetujuan Perseroan, para Pemegang Waran Seri III dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri III dimana Pengelola Administrasi Waran Seri III wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri III yang bersangkutan.

- g) Saham Hasil Pelaksanaan yang dimiliki oleh pemegangnya yang sah memiliki hak yang sama dan sederajat dengan saham lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- h) Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri III menjadi saham baru dan pencatatan saham hasil pelaksanaan pada Bursa Efek Jakarta.

10. Pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri III

Pemegang Waran Seri III yang akan melaksanakan Waran Seri III menjadi saham biasa dapat melakukan pembayaran harga pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindahbukuan, ataupun setoran tunai (*in good funds*) dalam rupiah kepada rekening Perseroan dengan perincian sebagai berikut :

Rekening atas Nama :
 PT Bank Victoria International Tbk
 Gedung Bank Panin Senayan Lt. Dasar
 Jl. Jenderal Sudirman No. 1
 Jakarta 10270
 No Rekening: 88-00-00419.9

Dalam hal ini, semua biaya bank yang timbul sehubungan dengan menukarkan Waran Seri III menjadi saham ini menjadi tanggungan Pemegang Waran Seri III.

11. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri III

Harga Pelaksanaan Waran Seri III adalah sebesar Rp 100 (seratus rupiah) setiap saham.

Apabila Perseroan melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan jumlah modal, harga pelaksanaan dan jumlah Waran Seri III, sehingga Waran Seri III dapat mengalami perubahan dimana harga pelaksanaan baru dan jumlah Waran Seri III baru dapat menjadi pecahan. Dalam hal ini, Perseroan akan melakukan pembulatan ke atas yang terdekat.

Penyesuaian harga pelaksanaan dan jumlah Waran Seri III akan dilakukan sehubungan dengan hal-hal di bawah ini:

- a) Perubahan nilai nominal saham Perseroan akibat penggabungan, peleburan, konversi atau pemecahan (*stock split*).

$$\text{Harga Pelaksanaan baru} = \frac{\text{harga nominal baru setiap saham}}{\text{harga nominal lama setiap saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri III baru} = \frac{\text{harga nominal lama setiap saham}}{\text{harga nominal baru setiap saham}} \times B$$

A = harga pelaksanaan Waran Seri III yang lama

B = jumlah awal Waran Seri III yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat pengumuman hasil Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham sehubungan dengan penggabungan, peleburan, konversi atau pemecahan (*stock split*) mulai berlaku efektif yang akan diumumkan di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang minimal salah satunya memiliki peredaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan.

- b) Pembagian saham bonus atau saham dividen, konversi atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, penggabungan atau peleburan.

$$\text{Harga Pelaksanaan baru} = \frac{A}{(A + B)} \times X$$

$$\text{Jumlah Waran Seri III baru} = \frac{(A + B)}{A} \times Y$$

- A = jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus atau saham dividen.
 B = jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian bonus atau saham dividen, atau tambahan saham akibat penggabungan atau peleburan.
 X = harga pelaksanaan Waran Seri III yang lama
 Y = jumlah awal Waran Seri III yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat pengumuman hasil Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham sehubungan dengan saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang akan diumumkan di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang minimal salah satunya memiliki peredaran yang luas dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan.

- c) Pengeluaran saham baru atau efek-efek lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham dengan cara penawaran umum terbatas.

$$\text{Jumlah Waran Seri III baru} = \frac{C}{(C - D)} \times Y$$

$$\text{Harga Pelaksanaan baru} = \frac{(C - D)}{C} \times X$$

- C = harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman penawaran umum terbatas
 X = harga pelaksanaan Waran Seri III yang lama
 Y = jumlah awal Waran Seri III yang beredar
 D = harga teroris right untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula:

$$\frac{(C - F)}{(G + 1)}$$

- F = harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (right)
 G = jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (Right), penyesuaian ini berlaku efektif sejak tanggal perdagangan ex-Right di Bursa Efek Jakarta.

Penyesuaian harga pelaksanaan dan jumlah waran hasil penyesuaian harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya bahwa harga pelaksanaan Waran tidak boleh kurang dari harga nominal saham Perseroan.

12. Status Waran Seri III

Waran Seri III yang akan diterbitkan merupakan Waran Seri III Atas Nama yang dapat diperdagangkan tanpa warkat selama kurang dari 3 (tiga) tahun sejak tanggal pencatatannya di Bursa Efek Jakarta.

Surat Kolektif Waran Seri III akan memiliki nomor urut dan ditandatangani oleh Direktur Utama bersama-sama dengan Komisaris Utama dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Surat Kolektif Waran Seri III adalah surat yang dikeluarkan Perseroan yang membuktikan kepemilikan dari 1 (satu) Waran Seri III atau lebih yang dimiliki oleh seorang Pemegang Waran Seri II dimana harus disebutkan jumlah Waran Seri III yang bersangkutan.

Surat Bukti Kepemilikan Waran Seri III adalah surat yang dikeluarkan Perseroan yang membuktikan kepemilikan dari 1 (satu) Waran Seri III atau lebih yang dimiliki oleh seorang Pemegang Waran Seri III dimana harus disebutkan jumlah Waran Seri III yang bersangkutan.

Pemegang Waran Seri III tidak memiliki hak untuk mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan menerima dividen dalam bentuk apapun serta hak-hak lain yang terkait dalam saham biasa Perseroan.

13. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham hasil pelaksanaan Waran Seri III adalah saham yang telah disetor penuh dan merupakan bagian dari modal disetor Perseroan. Dengan demikian, Pemegang Saham hasil pelaksanaan yang sah akan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan Pemegang Saham Perseroan lainnya.

14. Daftar Pemegang Waran Seri III

Pengelola Administrasi Waran Seri III telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan pencatatan Daftar Pemegang Waran Seri III yang di dalamnya tercantum nomor Waran Seri III, nama dan alamat para Pemegang Waran Seri III serta hal-hal lainnya yang dianggap perlu.

Pengelola Administrasi Waran Seri III juga bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri III dalam kaitannya dengan transaksi perdagangan Waran Seri III di Bursa yang mencakup pengalihan dan pencatatan hasil transaksi termasuk di antaranya pelaksanaan hak Waran Seri III untuk kepentingan Perseroan.

15. Pengelola Administrasi Waran Seri III

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri III sebagai berikut:

PT Adimitra Transferindo
Jl. Bukit Gading Raya Blok A No.7
Kelapa Gading Barat
Jakarta Utara – 14241
Telp. (021) 4513616, 45844350 ; Fax. (021) 45845042

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri III bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri III sehubungan dengan transaksi perdagangan Waran Seri III di Bursa yang mencakup pengalihan dan pencatatan hasil transaksi termasuk di antaranya pelaksanaan hak Waran Seri III demi kepentingan Perseroan.

16. Peralihan Hak Atas Waran Seri III

Pemegang Waran Seri III dapat mengalihkan hak atas Waran Seri III dengan melakukan jual-beli, hibah dan warisan. Dengan melakukan transaksi jual beli di bursa, setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri III dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri III dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri III karena hibah maupun warisan akibat kematian dari Pemegang Waran Seri III atau sebab-sebab lain yang mengakibatkan pengalihan kepemilikan Waran Seri III menurut hukum, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri III yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk mendaftarkan diri sebagai Pemegang Waran Seri III dengan mengajukan bukti-bukti sehubungan dengan haknya atas Waran Seri III sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi Perseroan.

Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri III yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri III oleh beberapa orang, mereka yang secara bersama-sama memiliki hak atas Waran Seri III tersebut berkewajiban untuk menunjuk salah seorang diantara mereka untuk mewakili mereka dan hanya wakil mereka sajalah yang berhak untuk mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum kepada Waran Seri III tersebut.

Pengelola Administrasi Waran Seri III hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri III apabila telah menerima dengan baik dan menyetujui keabsahan dan kelengkapan dokumen-dokumen pendukung sehubungan dengan peralihan hak atas Waran Seri III.

Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri III hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri III yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri III berdasarkan akta hibah yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak atau berdasarkan surat-surat lain yang dapat membuktikan adanya peralihan hak atas Waran Seri III tersebut, semuanya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Peralihan hak atas Waran Seri III harus dicatat dengan baik di dalam Daftar Pemegang Waran Seri III maupun pada Surat Kolektip Waran Seri III yang bersangkutan, dan hanya dapat berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri III yang bersangkutan.

17. Penggantian Surat Kolektip Waran Seri III

Apabila Surat Kolektip Waran Seri III mengalami kerusakan atau karena hal-hal lain yang ditetapkan oleh Perseroan dan atau Pengelola Administrasi Waran Seri III dinyatakan tidak dapat dipakai lagi, pemegang Surat Kolektip Waran Seri III yang bersangkutan harus mengajukan permintaan tertulis kepada Perseroan atau kepada Pengelola Administrasi Waran Seri III untuk penggantian Surat Kolektip Waran Seri III.

Perseroan, melalui Pengelola Administrasi Waran Seri III, akan memberikan penggantian Surat Kolektip Waran Seri III yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektip Waran Seri III yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri III untuk kemudian dimusnahkan.

Apabila Surat Kolektip Waran Seri III hilang atau musnah, Surat Kolektip Waran Seri III yang baru akan diterbitkan dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti sah yang cukup dan dengan memberikan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Perseroan dan Pengelola Administrasi Waran Seri III dan diumumkan di Bursa Efek.

Perseroan dan atau Pengelola Administrasi Waran Seri III berhak untuk menentukan dan meminta jaminan-jaminan sehubungan dengan pembuktian dan penggantian kerugian pihak yang mengajukan permintaan penggantian Surat Kolektif Waran Seri III dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan.

Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada BAPEPAM sehubungan dengan pengeluaran Surat Kolektif Waran Seri III yang hilang atau rusak. Dalam hal ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri III yang hilang atau rusak ditanggung oleh mereka yang mengajukan permohonan penggantian Surat Kolektif Waran Seri III tersebut.

18. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

Jika selama masa berlaku pelaksanaan Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan Perseroan atau perusahaan yang merupakan hasil peleburan dengan Perseroan berkewajiban untuk bertanggung jawab dan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan Waran Seri III yang berlaku. Apabila Perseroan dilikuidasi atau dibubarkan, pada Pemegang Waran Seri III yang belum melakukan pelaksanaan atas Warannya akan diberikan kesempatan untuk melakukan pelaksanaan Warannya sampai dengan tanggal yang ditetapkan kemudian oleh Perseroan.

19. Hukum yang Berlaku

Seluruh perjanjian sehubungan dengan Waran Seri III ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

XVI. PERSYARATAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN PAKET EFEK

1. PEMESANAN YANG BERHAK

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 12 Maret 2003 pukul 16.00 WIB mempunyai 1 (satu) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "HMETD") untuk membeli 1 (satu) saham baru dengan harga penawaran Rp 100 (seratus rupiah) per saham, dimana setiap 10 (sepuluh) saham baru melekat 6 (enam) Waran Seri III yang diberikan secara cuma-cuma pada saat hak tersebut dilaksanakan menjadi saham sebagai insentif kepada Pemegang Saham. Apabila terdapat pecahan atas saham hasil pelaksanaan HMETD maka akan diadakan pembulatan ke bawah dan pecahan tersebut menjadi milik Perseroan dan harus dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya dimasukkan ke rekening Perseroan.

Pemesan yang berhak melakukan pembelian Paket Efek adalah:

- a. Para Pemegang Saham Perseroan yang memiliki Sertifikat Bukti HMETD yang sah dan tidak mengalihkannya kepada pihak lain; atau
- b. Para Pemegang HMETD berdasarkan peralihan dalam suatu perdagangan dengan memperhatikan ketentuan perdagangan HMETD; atau
- c. Pemegang Sertifikat Bukti Kepemilikan ("SBK") yang sah dikeluarkan oleh KSEI.

Pemesan haruslah perorangan dan atau Lembaga dan atau Badan Hukum baik Indonesia / Asing sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal maupun peraturan pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para Pemegang Saham yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD disarankan untuk mendaftar sebelum batas akhir penyerahan Surat Kolektif Saham untuk diregistrasi yaitu tanggal 12 Maret 2003 khusus bagi Pemegang Saham yang belum melakukan imobilisasi (konversi) saham.

2. PENYEDIAAN HMETD, FORMULIR-FORMULIR DAN PROSPEKTUS

HMETD akan diterbitkan tanpa warkat dan akan disimpan dalam penitipan kolektif KSEI. Pemegang saham Perseroan yang telah melakukan imobilisasi (konversi) saham akan memperoleh HMETD dalam bentuk elektronik yang akan dikreditkan ke Rekening Efek atas nama pemegang rekening di Rekening Efek atau Bank Kustodian yang terdaftar di KSEI. Bukti kepemilikan HMETD dalam penitipan kolektif akan disampaikan oleh KSEI berupa Sertifikat Bukti Kepemilikan kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Bagi Pemegang Saham Perseroan yang belum melakukan imobilisasi (konversi) saham, Sertifikat Bukti HMETD tersedia untuk diambil oleh para pemegang saham sejak tanggal 13 Maret 2003 sampai dengan 19 Maret 2003, di kantor BAE PT Adimitra Transferindo dengan membawa :

- a. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perseroan) dan fotokopi anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.
- b. Asli surat kuasa (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa.

3. PENDAFTARAN / PELAKSANAAN HMETD

Bagi Pemegang Saham yang memiliki saham di luar penitipan kolektif atau belum melakukan imobilisasi (konversi) dan akan melaksanakan HMETD yang dimilikinya maka pendaftaran / pelaksanaan HMETD dapat dilakukan sendiri atau dikuasakan dengan dilengkapi dokumen-dokumen tersebut di bawah ini melalui:

PT Adimitra Transferindo
Jl. Bukit Gading Raya Blok A No.7
Kelapa Gading Barat
Jakarta Utara – 14241
Telp. (021) 4513616, 45844350 ; Fax. (021) 45845042

dengan membawa:

- a) Sertifikat Bukti HMETD (SBHMETD) asli yang telah ditandatangani dan diisi lengkap.
- b) Bukti Pembayaran asli dari Bank berupa bukti transfer bilyet giro/cek/tunai asli dari bank.
- c) Fotokopi KTP/SIM/Paspor (untuk perorangan) yang masih berlaku, fotokopi Anggaran Dasar (bagi Badan Hukum/Lembaga).
- d) Surat Kuasa (jika dikuasakan) bermeterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dilengkapi fotocopy KTP yang memberi dan diberi kuasa. Bagi pemesan berkewarganegaraan asing, di samping mencantumkan nama dan alamat pemberi kuasa secara lengkap dan jelas, juga wajib mencantumkan nama dan alamat luar negeri domisili hukum yang sah dari pemberi kuasa secara lengkap dan jelas.
- e) FPPS tambahan asli yang diisi lengkap dan ditandatangani (jika memesan saham tambahan).
- d) Apabila saham hasil pelaksanaan HMETD akan dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif di KSEI maka permohonan pelaksanaan HMETD harus diajukan oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka rekening efek dan dengan melampirkan asli surat kuasa dari pemegang saham dan formulir penyetoran efek yang dikeluarkan oleh KSEI yang telah diisi lengkap. Di dalam surat kuasa wajib disebutkan bahwa pemegang saham memberi kuasa kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pencatatan saham hasil pelaksanaan HMETD ke dalam Penitipan Kolektif KSEI.

Bagi Pemegang Saham yang telah memasukkan saham-sahamnya ke dalam penitipan kolektif atau telah melakukan Imobilisasi (konversi) dan akan melaksanakan HMETD yang dimilikinya maka Pemegang Saham dapat mengajukan permohonan kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian untuk menerbitkan Surat Bukti Kepemilikan (SBK). Kemudian pemegang saham atau kuasanya melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian menyerahkan SBK tersebut kepada BAE dengan dilengkapi dokumen-dokumen tersebut di bawah ini melalui:

- a) Bukti Pembayaran asli dari Bank berupa bukti transfer bilyet giro/cek/tunai asli dari bank.
- b) Fotokopi KTP/SIM/Paspor (untuk perorangan) yang masih berlaku, fotokopi Anggaran Dasar (bagi Badan Hukum/Lembaga).
- c) Surat Kuasa (jika dikuasakan) bermeterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dilengkapi fotocopy KTP yang memberi dan diberi kuasa. Bagi pemesan berkewarganegaraan asing, di samping mencantumkan nama dan alamat pemberi kuasa secara lengkap dan jelas, juga wajib

mencantumkan nama dan alamat luar negeri domisili hukum yang sah dari pemberi kuasa secara lengkap dan jelas.

Waktu Pendaftaran / Pelaksanaan :

Tanggal : 20 Maret 2003 s/d 27 Maret 2003
Pukul : 09.00 s/d 16.00 WIB

HMETD dianggap telah dilaksanakan apabila pembayaran pemesanan pembelian saham telah diterima dengan efektif (*in good funds*) di rekening perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian saham.

Bitamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau SBK tidak sesuai dengan petunjuk / ketentuan yang tertera dalam Sertifikat Bukti HMETD atau SBK dan Prospektus maka dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

4. PEMESANAN TAMBAHAN

Pemegang Saham yang Bukti HMETDnya tidak dijual atau Pembeli / Pemegang Sertifikat Bukti HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan atau dalam Kolom Endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD atau pemilik Sertifikat Bukti Kepemilikan (SBK) yang sah yang dikeluarkan oleh KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah hak yang dimiliki dengan mengisi Formulir Pemesanan Saham Tambahan. Penolakan dapat dilakukan terhadap pemesan yang tidak mematuhi petunjuk sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau SBK. Pembayaran pemesanan tambahan harus sudah diterima efektif (*in good funds*) di rekening perseroan selambat-lambatnya tanggal 28 Maret 2003.

Pemesanan Pembelian Saham Tambahan harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 500 saham atau kelipatannya.

5. PERSYARATAN PEMBAYARAN

Pembayaran Pemesanan Pembelian Paket Efek atas hak dalam rangka Penawaran Umum Terbatas II ini harus dibayar penuh (*full amount*) dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindahbukuan atau setoran tunai pada saat pengajuan pemesanan pembelian saham dengan mencantumkan nomor Sertifikat Bukti HMETD atau nomor SBK. Pembayaran disetor ke rekening bank Perseroan di PT. Bank Victoria International Tbk dengan penincian sebagai berikut :

Rekening atas Nama: PT Bank Victoria International Tbk
Gedung Bank Panin Senayan Lt. Dasar
Jl. Jenderal Sudirman No. 1
Jakarta 10270
No. Rekening: 88.00.00419.9

Dalam hal ini, PT Bank Victoria International Tbk akan membenarkan tembusan bukti pembayaran dimana tercantum di dalamnya nama pemesan, nomor Sertifikat Bukti HMETD atau nomor SBK dan jumlah pesanan saham. Semua biaya bank yang timbul dalam rangka pembelian Paket efek ini akan menjadi beban pemesan. Perseroan berhak membatalkan pemesanan apabila persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

Semua cek atau wesel Bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Apabila pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, pemesanan pembelian saham dianggap

batal. Tanggal pembayaran dihitung dari tanggal penerimaan cek / pemindahbukuan / bilyet giro yang telah diterima dengan baik di rekening Perseroan sebagaimana yang tersebut di atas. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu telah terlaksana apabila pembayarannya, baik secara cek, bilyet giro, bank transfer, pemindahbukuan telah terbukti diterima dengan baik dan efektif (*in good funds*) di rekening bank Perseroan pada tanggal 28 Maret 2003.

6. SUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN PAKET EFEK

Pada saat menerima pengajuan pemesanan pembelian Paket Efek, Biro Administrasi Efek PT. Adimitra Transferindo akan menyerahkan kepada Pemesan, Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham yang telah dicap dan ditandatangani untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Surat Kolektif Saham atau merupakan bukti bahwa saham akan diterima dalam bentuk elektronik di Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian serta merupakan alat bukti untuk pengambilan pengembalian uang untuk pesanan yang tidak terpenuhi.

7. PENJATAHAN PEMESANAN TAMBAHAN

Penjataan Pemesanan Tambahan akan ditentukan pada tanggal 1 April 2003 berdasarkan proporsi atas jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Bukti HMETD yang mengajukan pemesanan tambahan saham.

8. PEMBATALAN PEMESANAN PAKET EFEK

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan saham secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Paket Efek akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjataan atas pesanan tambahan yaitu 1 April 2003.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan saham antara lain adalah: a) pengisian SBHMETD atau SBK tidak sesuai dengan petunjuk / syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD atau SBK dan Prospektus, b) persyaratan pembayaran tidak terpenuhi.

9. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Paket Efek yang lebih besar daripada haknya atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan Paket Efek, pengembalian uang dilakukan oleh Perseroan selambat-lambatnya tanggal 4 April 2003. Pengembalian uang yang dilakukan Perseroan sampai tanggal 4 April 2003 tidak akan disertai bunga. Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang yang dikembalikan akan disertai bunga yang diperhitungkan sejak tanggal 5 April 2003 dengan memperhatikan tingkat jasa giro yang berlaku pada PT. Bank Victoria International Tbk pada tanggal pemesanan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Pengembalian uang dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan atas nama Pemesan.

Uang yang dikembalikan dalam bentuk cek dan dapat diambil di:

PT Bank Victoria International Tbk
Gedung Bank Panin Senayan Lt. Dasar
Jl. Jenderal Sudirman No. 1
Jakarta 10270

Dengan menunjukkan KTP asli atau Tanda Bukti Diri asli lainnya (bagi perorangan) yang masih berlaku, fotocopy Anggaran Dasar dan surat kuasa (bagi Badan Hukum/Lembaga) serta menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham asli dan menyerahkan fotocopy KTP atau Tanda Bukti Diri. Pemesan tidak dikenakan biaya bank atau biaya transfer untuk jumlah yang dikembalikan tersebut.

10. PENYERAHAN SAHAM DAN WARAN SERI III HASIL PELAKSANAAN HMETD

Bagi Pemegang Saham yang memiliki saham di luar penitipan kolektif atau belum melakukan Imobilisasi (konversi) dan akan melaksanakan HMETD yang dimilikinya maka Surat Kolektif Saham dan Surat Kolektif Waran Seri III dapat diambil mulai tanggal 27 Maret 2003 sampai dengan 4 April 2003 pada setiap hari kerja (Senin s/d Jumat) antara pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek PT. Adimitra Transferindo. Para Pemegang Saham yang akan mengambil Surat Kolektif Saham dan Surat Kolektif Waran Seri III harus menunjukkan KTP asli atau Tanda Bukti Diri asli lainnya (bagi perorangan) yang masih berlaku, fotocopy Anggaran Dasar dan surat kuasa (bagi Badan Hukum/Lembaga) serta menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian asli dan fotocopy KTP atau Tanda Bukti Diri. Jika pengambilan tersebut dikuasakan maka penerima kuasa harus melampirkan surat kuasa bermeterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dari pemegang saham disertai dengan KTP / Tanda Bukti Diri asli (bagi perorangan), fotocopy Anggaran Dasar (bagi Badan Hukum/Lembaga) pemberi kuasa dan menyerahkan fotocopy KTP atau Tanda Bukti Diri yang masih berlaku dari penerima kuasa.

Penyerahan Surat Kolektif Saham dan Surat Kolektif Waran Seri III tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Bagi pemesan yang memesan kurang dari atau sama dengan jumlah Hak yang dimiliki, maka Surat Kolektif Saham dan Surat Kolektif Waran Seri III akan diserahkan selambat-lambatnya 2 (dua) hari bursa setelah tanggal pembayaran uang pemesanan tersebut tersedia pada rekening Perseroan (*in good funds*).
- b. Bagi pemesan yang memesan lebih dari jumlah Hak yang dimiliki, maka Surat Kolektif Saham dan Surat Kolektif Waran Seri III sejumlah Hak yang dimiliki akan diserahkan selambat-lambatnya 2 (dua) hari bursa setelah tanggal pembayaran uang pemesanan tersebut tersedia pada rekening Perseroan (*in good funds*). Sedangkan kelebihan pemesanan saham di atas jumlah Haknya akan dilakukan penjatahan secara proporsional berdasarkan Hak yang telah dilaksanakan (selambat-lambatnya) 2(dua) hari kerja setelah penjatahan.

Bagi Pemegang Saham yang telah memasukkan saham-sahamnya ke dalam penitipan kolektif atau telah melakukan Imobilisasi (konversi) maka Perseroan tidak akan menerbitkan saham dan waran dalam bentuk Surat Kolektif Saham dan Surat Kolektif Waran Seri III. Saham hasil pelaksanaan HMETD dan Waran Seri III yang melekat kepadanya akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI melalui rekening efek Perusahaan Efek dan Bank Kustodian tempat Pemegang Saham membuka Rekeningnya.

11. ALOKASI TERHADAP HMETD SISA SAHAM YANG TIDAK DILAKSANAKAN

Jika Paket Efek yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas II tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang Saham lainnya yang

mengajukan pemesanan tambahan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau SBK secara proposional berdasarkan HMETD yang telah dilaksanakan.

XVII. KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas II ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang dapat diperdagangkan baik di luar Bursa maupun melalui Bursa.

1. Pemegang Saham Yang Berhak Menerima HMETD

Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 12 Maret 2003 pukul 16.00 WIB berhak mendapatkan HMETD. Setiap pemegang 1 (Satu) saham lama akan mendapatkan 1 (Satu) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD akan memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan saham biasa atas nama Perseroan.

2. Pemegang HMETD Yang Sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- a. Para Pemegang Saham Yang Berhak Menerima HMETD yang tidak dijual HMETD-nya,
- b. Pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD, atau
- c. Para pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

3. Perdagangan HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan HMETD yang dimilikinya selama Periode Perdagangan, yaitu mulai tanggal 20 Maret 2003 sampai tanggal 26 Maret 2003.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan Bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu PT Bursa Efek Jakarta dan peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi dengan penasehat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik, atau penasehat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek, sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar Bursa. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas rekening efek atas nama bank kustodian atau perusahaan efek di KSEI.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

4. Bentuk Dari HMETD

Bagi pemegang saham yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, dan jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham, serta kolom jumlah saham yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, dan jumlah pemesanan saham tambahan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan rekening efek atas nama bank kustodian atau perusahaan efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI. Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD

Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat

melakukan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal 13 Maret 2003 sampai tanggal 19 Maret 2003.

Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon, yaitu sebesar Rp 11.000 (sebelas ribu rupiah) per Sertifikat Bukti HMETD baru hasil pemecahan. Biaya tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

5. Nilai HMETD

- a. Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dengan yang lainnya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada pada saat ditawarkan.
- b. Berikut disajikan perhitungan teoritis nilai HMETD dalam Penawaran Umum Terbatas II ini. Perhitungan di bawah ini hanya merupakan ilustrasi teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi diberikan untuk membenarkan gambaran umum dalam menghitung nilai HMETD.

Bila Harga saham pada tanggal terakhir perdagangan saham yang mengandung HMETD (Cum HMETD) = Rp C

Harga Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas II (Exercise Price) = Rp E

Bila setiap pemegang sejumlah L saham lama berhak membeli sejumlah B saham baru, maka jumlah seluruh saham setelah pelaksanaan HMETD adalah L + B.

Dengan demikian Harga Teoritis Saham Baru mulai tanggal perdagangan saham yang tidak mengandung HMETD adalah:

$$= \frac{(Rp C \times L) + (Rp E \times B)}{(L + B)}$$

Harga Teoritis Saham Baru = Rp N

Harga HMETD per saham = Rp N - Rp E

6. Pecahan HMETD

Sesuai dengan Peraturan No. IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, maka atas pecahan HMETD tersebut harus dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

7. Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD

Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli saham biasa atas nama yang ditawarkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas II. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotocopy.

Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

XVIII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan Penawaran Umum Terbatas II ini melalui iklan pada surat kabar Investor Indonesia pada tanggal 24 Januari 2003.

1. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 12 Maret 2003 pukul 16.00 WIB. Prospektus Final, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS Tambahan) dan formulir lainnya akan didistribusikan oleh Perseroan kepada KSEI dan dapat diperoleh oleh pemegang saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama Pemegang Saham. Para pemegang saham dapat mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus Final, FPPS Tambahan dan formulir lainnya di Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 13 Maret 2003 sampai dengan 19 Maret 2003 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotocopynya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri.

Apabila para pemegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 12 Maret 2003 pukul 16.00 belum mengambil Prospektus, Sertifikat Bukti HMETD dan formulir-formulir lainnya, dan tidak menghubungi Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan yang berakibat terhambatnya pelaksanaan atau perdagangan HMETD, maka seluruh resiko ataupun kerugian yang mungkin timbul bukan menjadi tanggung jawab Perseroan ataupun Biro Administrasi Efek, melainkan merupakan tanggung jawab pemegang saham yang bersangkutan.

XIX. INFORMASI TAMBAHAN

Para pemegang saham dapat meminta informasi tambahan lainnya sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas II ini kepada :

Perseroan
PT Bank Victoria Internasional Tbk
Gedung Bank Panin Serayan Lt. Dasar
Jl. Jenderal Sudirman No. 1
Jakarta 10270
Telp. (021) 5735425 ; Fax. (021) 5735429

atau

Penasehat Keuangan Perseroan
PT Victoria Sekuritas
Graha ZIP, Lt. 8
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 23
Jakarta 127930
Telp. (021) 5258333 ; Fax. (021) 5258216